

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMELIHARA
BENDA CAGAR BUDAYA DI PULAU PENYENGAT
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN WARISAN
BUDAYA MELAYU**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota**

Oleh:

**MEITYA YULIANTY
L4D 003 102**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMELIHARA BENDA CAGAR
BUDAYA DI PULAU PENYENGAT SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN
WARISAN BUDAYA MELAYU**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

MEITYA YULIANTY
L4D003102

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 22 Desember 2005

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Desember 2005

Pembimbing Pendamping



Ir. Nurini, MT

Pembimbing Utama



Ir. Ragil Haryanto, MSP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

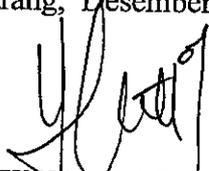


Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, Desember 2005



MEITYA YULIANTY
NIM L4D 003 102

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4188 / T / MTPUK / 01
Tgl.	5-5-2006

ABSTRAK

Pulau Penyengat termasuk kawasan cagar budaya di Propinsi Kepulauan Riau yang merupakan situs kerajaan yang masih memiliki artefak bangunan arsitektural dan makam. Di sisi lain keberadaannya berdampingan dengan pemukiman penduduk yang semakin bertambah sehingga memerlukan penanganan yang serius agar dapat mengembangkan kepariwisataan pada masa kemudian. Adanya nilai lebih itu menjadikan Pemerintah Kota berkeinginan untuk memanfaatkan benda cagar budaya tersebut menjadi salah satu daya tarik wisata Kota Tanjungpinang karena memiliki sejarah melayu. Namun saat ini belum adanya legalitas lokal (Peraturan Daerah) sedangkan legalitas formal dari pusat sudah ada berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat keputusan menteri. Keberadaan warga asli yang mempunyai karakteristik khas dan mempunyai keterikatan dengan budaya masa lalunya merupakan potensi yang dapat dijadikan sarana memajukan dan melestarikan budaya yang terdapat di Pulau Penyengat.

Sehubungan dengan itu, maka dapat dikemukakan pertanyaan penelitian (*Research Question*) adalah *Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya di Pulau Penyengat sebagai upaya pelestarian warisan budaya Melayu?*

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut maka dilakukan suatu tahapan analisis kualitatif untuk yang terdiri dari analisis partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan benda cagar budaya di pulau penyengat yang terdiri dari analisis faktor pengaruh partisipasi masyarakat, analisis skala peran serta partisipasi masyarakat, analisis klasifikasi tipe partisipasi masyarakat, analisis bentuk partisipasi masyarakat, analisis tingkat partisipasi masyarakat, serta upaya pelestarian benda cagar budaya di pulau penyengat berbasis partisipasi masyarakat.

Dari hasil analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa karakteristik masyarakat khas dari penduduk Pulau Penyengat mempengaruhi cara mereka berpartisipasi. Suku bangsa, lama tinggal, agama merupakan faktor penentu utama tingkat partisipasi masyarakat di Pulau Penyengat. Selain itu, latar belakang ekonomi, pendidikan, dan usia turut mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti proses pembangunan di lingkungannya. Peran serta masyarakat dalam berpartisipasi memelihara dan melestarikan benda cagar budaya cukup tinggi dengan melibatkan diri secara langsung tanpa diwakilkan dalam kegiatan yang melibatkan keseluruhan masyarakat. Dari karakteristik partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya di Pulau Penyengat ini, didapatkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan dalam keikutsertaan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya. Pada tahapan tingkatan partisipasi masyarakat telah mencapai tataran *placation* atau perujukan, dimana beberapa anggota masyarakat telah berperan penting dalam proses partisipasi yang dijalaninya, namun belum terdapat kesejajaran dengan pihak pemerintah.

Partisipasi masyarakat di Pulau Penyengat cukup tinggi dan sangat potensial digerakkan sebagai langkah awal dalam pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya di kawasan Pulau Penyengat. Adanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat akan menciptakan pelestarian benda cagar budaya di Pulau Penyengat.

Kata kunci : partisipasi masyarakat, benda cagar budaya.

ABSTRACT

Penyengat Island is one of cultural conservation area in Riau Islands which have an empire site with architectural build artifacts and graves. The existence of that site needs more serious handling because of the population's development. That reason makes the City Government want to use that cultural site as Tanjungpinang's power of tourism attraction by its Malayan history. At this time there is no local legality, although there is a formal legality from the government. The population existence with certain characteristic and being bound with their culture were potential as a medium to conserve and develop the Penyengat Island's culture.

In connection with that, the question for this research is how is communities participation form and level in keeping Penyengat Island's cultural heritage as a Malayan's culture inheritance.

A qualitative analysis was done to answer the question. The qualitative analysis were consist of community's participation effect analysis, community's participation role scale analysis, community's participation type classification analysis, community's participation form analysis, community's participation level analysis, and culture preserve thing's community based conservation efforts in Penyengat Island.

The analysis showed that community's characteristic in Penyengat Island affect their participation way Ethnic group, living time, religion are prime factors in determining community's participation in Penyengat Island. In addition to that, the economics background, education, and age also affect the community's participation in the development process. The community's participation is high in keeping and preserving the culture preserve by involved in the activities. From community's participation characteristic in culture preserve conservation program in Penyengat Island, it was showed that community's participation form was materialized by their participation in cultural heritage planning and realization process. The community's participation level is Placation, where some community member had an important role in their participation process, but without acceleration with the government.

Community participation at Penyengat Island can potentially moved as an early steps to maintain and preserve cultural sites at Penyengat Island. Better synergi between the government and the community can create preservation movement at Penyengat Island heritage sites.

Keywords: community participation, cultural heritage

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti sehingga penulis mempunyai kesempatan dan kemampuan guna menyusun tesis ini. Tesis ini disusun merupakan salah satu prasyarat guna menyelesaikan program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Secara substansial tesis ini bertujuan untuk mengadakan studi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap pemeliharaan benda cagar budaya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini dipandang sangat aktual mengingat pelestarian benda cagar budaya akan tetap terjaga apabila anggota masyarakat setempat mempunyai partisipasi dalam memelihara benda cagar budaya tersebut.

Tesis ini menelaah tentang analisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya di Pulau Penyengat sebagai upaya pelestarian warisan budaya Melayu. Perlu diketahui bahwa keberadaan benda cagar budaya di pulau ini berdampingan dengan pemukiman masyarakat sehingga timbul pemikiran bagaimana keberadaan benda cagar budaya ini tidak tersentuh dan bersinggungan dengan perumahan penduduk yang semakin padat. Gejala yang terlihat pada saat ini, benda cagar budaya dan situs lainnya yang ada di pulau Penyengat keberadaannya terancam karena perumahan penduduk ada yang berada di atas lokasi situs dan adanya upaya pengambilan batu bata yang

ada pada benda cagar budaya untuk bahan bangunan perumahan oleh penduduk. Masa mendatang, bertambahnya jumlah penduduk di Pulau Penyengat mempunyai konsekuensi dengan penambahan jumlah rumah dan ada kemungkinan dibangun di atas situs purbakala yang ada di pulau ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dengan setulus hati kepada :

1. Bapak Ir. Ragil Hariyanto, MSP, sebagai Mentor yang di tengah kesibukannya masih sempat meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada penulis,
2. Ibu Ir. Nurini, MT sebagai Co-Mentor yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis,
3. Ibu Suryatati A. Manan sebagai Walikota Tanjungpinang serta Kepala Dinas/Instansi terkait yang telah memberikan data dan informasi mengenai pariwisata kota Tanjungpinang, serta
4. Suami dan buah hati tersayang yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi selama penulis menyelesaikan pratesis ini.

Penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir sehingga dalam penulisan tesis ini banyak ditemui kelemahan. Oleh kerana itu, sumbang saran sangat penulis harapkan agar lebih sempurna nantinya.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Semarang, Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Sasaran	5
1.4 Ruang Lingkup	6
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial.....	6
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial	7
1.4.3 Posisi Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	12
1.6 Kerangka Pemikiran	14
1.7 Metode Penelitian	16
1.7.1 Pendekatan Penelitian	16
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.7.3 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	20
1.7.4 Teknik Analisis	20
1.7.5 Teknik Sampling.....	21
1.8 Sistematika Penulisan	23

BAB II KAJIAN TEORI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMELIHARA CAGAR BUDAYA MELAYU DI PULAU PENYENGAT	26
2.1 Kajian Partisipasi Masyarakat	26
2.1.1 Pengertian.....	26
2.1.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat	28
2.1.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat	32
2.1.4 Logika Proses Partisipasi Masyarakat.....	37
2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	38
2.1.6 Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat.....	41
2.2 Pelestarian Benda Cagar Budaya.....	43
2.3 Masyarakat.....	49
2.4 Ringkasan Kajian Teori	51
2.5 Variabel Penelitian	52
BAB III GAMBARAN UMUM PULAU PENYENGAT	55
3.1 Letak Geografis dan Keadaan Alam.....	55
3.2 Struktur Penduduk.....	56
3.3 Ekonomi.....	57
3.4 Sosial Budaya	58
3.5 Aspek Kesejarahan	60
3.6 Aspek Benda Cagar Budaya	63
BAB IV ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMELIHARA CAGAR BUDAYA DI PULAU PENYENGAT.....	81
4.1 Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat	82
4.1.1 Analisis Faktor Pengaruh Partisipasi Masyarakat	82
4.1.2 Analisis Skala Peran Serta Partisipasi Masyarakat	92
4.1.3 Analisis Klasifikasi Tipe Partisipasi Masyarakat	102
4.1.4 Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	111
4.1.5 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	120
4.2 Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat Berbasis Partisipasi Masyarakat	126
4.3 Rumusan Analisis	135

BAB V PENUTUP.....	141
5.1 Kesimpulan	141
5.2 Rekomendasi.....	143
Daftar Pustaka	147
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	: Posisi Penelitian	11
Tabel I.2	: Lokasi Penyebaran Kuesioner	22
Tabel II. 1	: Logika Proses Partisipasi Masyarakat.....	37
Tabel II. 2	: Sintesa Teori.....	51
Tabel II. 3	: Kajian dan Variabel Penelitian.....	52
Tabel III. 1	: Komposisi Penduduk	57
Tabel IV. 1	: Jenis Kelamin Responden	82
Tabel IV. 2	: Klasifikasi Umur Responden.....	84
Tabel IV. 3	: Pendidikan Responden.....	85
Tabel IV. 4	: Pekerjaan Responden	86
Tabel IV. 5	: Agama Responden.....	88
Tabel IV. 6	: Suku Bangsa Responden.....	88
Tabel IV. 7	: Lama Berdomisili Responden	90
Tabel IV. 8	: Frekuensi Kehadiran Responden Dalam Pertemuan Perencanaan, Pemeliharaan Dan Pelestarian BCB	94
Tabel IV. 9	: Frekuensi Kehadiran Dalam Pertemuan Pelaksanaan Pemeliharaan BCB.....	95
Tabel IV. 10	: Tingkat Keaktifan Responden Dalam Pertemuan.....	96
Tabel IV. 11	: Tingkat Keaktifan Responden Dalam Pertemuan Pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian BCB	98
Tabel IV. 12	: Frekuensi Kehadiran Dalam Kehadiran Gotong Royong	100
Tabel IV. 13	: Tingkat Kesiediaan Responden Memberikan Sumbangan.....	101
Tabel IV. 14	: Faktor Pendorong Keikutsertaan Memelihara BCB	103
Tabel IV. 15	: Keikutsertaan Dalam Pertemuan Pengambilan	105
Tabel IV. 16	: Pertemuan dalam Melaksanakan Memelihara Benda Cagar Budaya	106
Tabel IV. 17	: Partisipasi Berdasarkan Cara KeterlibatanMemelihara BCB	107
Tabel IV. 18	: Partisipasi Berdasarkan Lingkup Kegiatan Pemeliharaan.....	109
Tabel IV. 19	: Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan BCB.....	110
Tabel IV. 20	: Pihak Yang Terlibat Dalam Pemeliharaan BCB.....	112
Tabel IV. 21	: Keikutsertaan Responden Dalam Pertemuan	114
Tabel IV. 22	: Partisipasi Daam Pertemuan Pemeliharaan BCB	116

Tabel IV. 23	: Bentuk Partisipasi Dalam Pemeliharaan BCB.....	118
Tabel IV. 24	: Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pemeliharaan BCB.....	120
Tabel IV. 25	: Minat Responden Dalam Pemeliharaan dan Pelestarian BCB	122
Tabel IV. 26	: Perhatian Responden dalam Pemeliharaan dan Pelestarian BCB.....	123
Tabel IV. 27	: Keinginan Responden Dalam Memelihara Dan Melestarikan BCB.....	124
Tabel IV. 28	: Pengetahuan Tentang Benda Cagar Budaya.....	127
Tabel IV. 29	: Keinginan Responden Terhadap Pelestarian BCB	128
Tabel IV. 30	: Saran Terhadap Peningkatan Pengembangan BCB	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	: Peta Orientasi Wilayah Studi.....	8
Gambar 1. 2	: Peta Wilayah Administrasi dan Persebaran Permukiman P.Penyengat	9
Gambar 1. 3	: Posisi Penelitian.....	12
Gambar 1. 4	: Kerangka Pikir.....	14
Gambar 1. 5	: Kerangka Analisis.....	22
Gambar 3. 1	: Masjid Raya Sultan Riau	64
Gambar 3. 2	: Perpustakaan Kuno Khutub Khana Yamtuan Ahmady	65
Gambar 3. 3	: Bekas Gedung Engku Haji Daud (Tabib Kerajaan).....	66
Gambar 3. 4	: Makam Engku Putri	67
Gambar 3. 5	: Makam Raja Haji Fisabilillah.....	68
Gambar 3. 6	: Bekas Gedung Tengku Bilik	69
Gambar 3. 7	: Makam Raja Ja'far.....	70
Gambar 3. 8	: Bekas Istana Raja Ali Marhum Kantor.....	71
Gambar 3. 9	: Istana Bahjah (Istana Raja Ali Kelana).....	72
Gambar 3. 10	: Makam Yang Dipertuan Muda Ke-VII.....	73
Gambar 3. 11	: Makam Embung Fatimah	74
Gambar 3. 12	: Gedung Mesiu atau Gedung Obat Bedil.....	74
Gambar 3. 13	: Kubu (Benteng) dan Parit-Parit Pertahanan	75
Gambar 3. 14	: Bekas Gedung Rusydiah Klab dan Percetakan Kerajaan	76
Gambar 3. 15	: Bekas Gedung Raja Haji Abdullah (Hakim Mahkamah Syariah)....	77
Gambar 3. 16	: Perigi Puteri (Perigi Kunci).....	78
Gambar 3.17	: Taman Pantai	79
Gambar 3. 18	: Peta Lokasi Benda Cagar Budaya di pulau Penyengat	80
Gambar 4. 1	: Prosentase Komposisi Jenis Kelamin Penduduk	83
Gambar 4. 2	: Komposisi Umur Responden.....	84
Gambar 4. 3	: Tingkat Pendidikan Responden.....	86
Gambar 4. 4	: Komposisi Mata Pencarian Responden	87
Gambar 4. 5	: Komposisi Suku Bangsa Responden	89
Gambar 4. 6	: Komposisi Lama Domisili	91

Gambar 4. 7	: Grafik Frekuensi Kehadiran Gotongroyong BCB	100
Gambar 4. 8	: Grafik Tingkat Kesiediaan Memberikan Sumbangan.....	102
Gambar 4. 9	: Grafik Faktor Pendorong Ikut Serta Dalam Pemeliharaan.....	104
Gambar 4. 10	: Grafik Keikutsertaan Pengambilan Rumusan Pemeliharaan.....	105
Gambar 4. 11	: Grafik Pertemuan Melaksanakan Pemeliharaan BCB	106
Gambar 4. 12	: Grafik Cara Ketrlibatan Dalam Partisipasi Pemeliharaan BCB	108
Gambar 4. 13	: Lingkup Kegiatan partisipasi Berdasarkan Lingkup Keg. Pemeliharaan.....	109
Gambar 4. 14	: Grafik Pihak Terlibat Dalam pemeliharaan BCB.....	110
Gambar 4. 15	: Grafik Keikutsertaan Pertemuan Perencanaan Pemeliharaan BCB.....	114
Gambar 4. 16	: Grafik Partisipasi dalam Pertemuan Pemeliharaan BCB	115
Gambar 4. 17	: Grafik Partisipasi dalam Pertemuan Pemeliharaan BCB	117
Gambar 4. 18	: Grafik Partisipasi Pelaksanaan Pemeliharaan BCB.....	120
Gambar 4. 19	: Grafik Pengetahuan Tentang Cagar Budaya	127
Gambar 4. 20	: Grafikk Keinginan Responden Terhadap Pelestarian BCB.....	129
Gambar 4. 21	: Grafik Saran Terhadap Peningkatan Pengembangan Cagar Budaya	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Tanjungpinang yang baru dimekarkan statusnya dari Kota Administratif menjadi Kota berdasarkan UU No. 5 Tahun 2001 pada bulan Agustus 2001 memberikan arti positif terhadap dunia kebudayaan dan kepariwisataan. Arti positif yang dimaksud adalah karena adanya satu kelurahan yaitu Kelurahan Penyengat yang dalam wilayah administratifnya banyak terdapat artefak, benda cagar budaya dan situs. Keberadaan benda cagar budaya yang berwujud bangunan arsitektural dan makam merupakan potensi pariwisata yang ada di kota Tanjungpinang khususnya potensi pariwisata sejarah dan budaya yang merupakan potensi utama dimiliki.

Penyengat merupakan satu kelurahan di kota Tanjungpinang yang dibangun berdasarkan perkembangan sejarah, budaya dan adat istiadat Melayu. Posisi Pulau Penyengat mempunyai letak geografis yang strategis karena berseberangan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Kondisi ini mendukung potensi dunia pariwisata untuk dikembangkan secara profesional. Selain itu, secara historis Pulau Penyengat juga memiliki hubungan yang khas, karena merupakan bagian masa lalu yang tak terpisahkan dari kerajaan Riau Lingga (Melayu) dengan negara Malaysia. Seperti diketahui dari data sejarah, Pulau Penyengat, Singapura, dan Johor Malaysia merupakan satu imperium di bawah Kerajaan Melayu Riau Lingga. (Novendra, dkk, 2000: 37)

Pulau Penyengat hanya mempunyai luas $\pm 3,5 \text{ km}^2$ akan tetapi di dalamnya terdapat banyak peninggalan berupa potensi cagar budaya yang berwujud bangunan-bangunan arsitektural, mesjid, istana, makam dan situs. Mengingat dahulunya Pulau Penyengat merupakan salah satu pusat kerajaan Riau Lingga Johor dan Pahang, maka banyak ditemukan tapak atau bekas bangunan makam, istana atau kantor yang saat ini dilindungi dan dilestarikan keberadaannya sehingga menjadi situs dan benda cagar budaya.

Pentingnya pelestarian benda cagar budaya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tersebut di atas, SK Menteri Budpar No.14/Tahun 2004, serta Piagam Pelestarian Indonesia 2003. Guna mengimplementasikan Undang-Undang ini maka dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan oleh pemerintah guna melindungi dan melestarikan benda cagar budaya agar tidak punah seperti menetapkan Pulau Penyengat sebagai situs benda cagar budaya. Pelestarian benda cagar budaya diharapkan bisa dilakukan tidak hanya pemerintah, namun juga yang paling penting melibatkan masyarakat setempat atau sekitar benda cagar budaya tersebut.

Kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Pulau Penyengat guna melihat benda cagar budaya rata-rata setiap hari sekitar 100–200 orang. Pada akhir pekan, seiring banyaknya wisatawan Singapura dan Malaysia yang berkunjung ke kota Tanjungpinang, kunjungan wisdom dan wisman mencapai

1.000–1.500 orang. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Penyengat tidak dapat dipungkiri merupakan pemanfaatan dari benda cagar budaya.

Benda cagar budaya di Pulau Penyengat perawatan dan pengelolaannya dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Benda cagar budaya di sini sebagian besar sudah dikonservasi, namun pengawetannya tidak dilakukan secara sinergi sehingga banyak diantaranya yang mengalami kerusakan.

Pada benda cagar budaya di Pulau Penyengat, konservasi hanya baru dilaksanakan pada taraf upaya pemeliharaan dan pelestarian bangunan. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan setiap tahunnya hanya sebatas pengecatan bangunan cagar budaya dan penjagaan yang dilakukan oleh petugas lapangan benda cagar budaya. Sementara itu di sisi lain keberadaan benda cagar budaya terancam punah karena semakin ramainya pemukiman penduduk dan pemukiman yang dibangun tersebut berada di sekitar benda cagar budaya (situs), bahkan ada beberapa anggota masyarakat yang mendirikan bangunan di atas tanah situs benda cagar budaya tersebut.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana partisipasi masyarakat setempat terhadap keberadaan benda cagar budaya tersebut di lingkungan tempat tinggalnya. Di samping itu, pemukiman penduduk yang makin padat mengkhawatirkan keberadaan benda cagar budaya karena banyak perumahan yang dibangun berdampingan dan bahkan ada yang berada di atas tapak situs benda cagar budaya. Seyogyanya peninggalan sejarah budaya ini tidak terganggu

dan tetap dipelihara keberadaannya. Hal ini menjadi sangat menarik untuk dilakukan penelitian mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan Pulau Penyengat yang penuh historis serta letaknya yang strategis berseberangan dengan Kota Tanjungpinang memiliki beberapa permasalahan antara lain :

- Berdasarkan SK Menteri Budpar No. 14 Tahun 2004, telah ditetapkannya Pulau Penyengat sebagai kawasan cagar budaya yang merupakan situs kerajaan yang masih memiliki artefak bangunan arsitektural dan makam. Di sisi lain keberadaannya berdampingan dengan pemukiman penduduk yang semakin bertambah sehingga memerlukan penanganan yang serius agar dapat mengembangkan kepariwisataan pada masa kemudian.
- Pemerintah Kota berkeinginan untuk memanfaatkan benda cagar budaya tersebut menjadi salah satu daya tarik wisata Kota Tanjungpinang karena memiliki sejarah melayu namun saat ini belum adanya legalitas lokal (Peraturan Daerah) sedangkan legalitas formal dari pusat sudah ada berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat keputusan menteri, serta Piagam Pelestarian Indonesia.
- Sebagian masyarakat pemukiman ada yang bersikap memelihara tapi sebagian justru merusak benda cagar budaya yang ada. Kegiatan yang merusak benda cagar budaya yang dilakukan anggota masyarakat seperti mengambil batu bata

untuk bangunan rumah, mendirikan bangunan rumah di atas fondasi benda cagar budaya dan berkebun di areal situs benda cagar budaya.

Sehubungan dengan itu, maka dapat dikemukakan pertanyaan penelitian (*Research Question*) adalah :*Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya di Pulau Penyengat sebagai upaya pelestarian warisan budaya Melayu?*

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya di Pulau Penyengat sebagai warisan budaya Melayu.

1.3.2 Sasaran

Guna melihat secara jelas dan komprehensif tentang partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya di Pulau Penyengat maka sasaran yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi potensi sejarah, potensi budaya, dan adat istiadat di Pulau Penyengat yang berpotensi dilestarikan dan dikembangkan untuk kegiatan pariwisata
2. Mengkaji karakteristik masyarakat sehingga terlihat bentuk dan tingkat partisipasi dalam pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya di Pulau Penyengat.

3. Mengkaji upaya pelestarian di sekitar kawasan benda cagar budaya
4. Merekomendasikan langkah-langkah dalam upaya keterlibatan masyarakat dalam usaha memelihara dan melestarikan benda cagar budaya Melayu di Pulau Penyengat.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Materi dalam suatu penelitian sangat luas dan tidak mungkin ditelusuri seluruhnya, sehingga materi dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Analisis partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya Melayu di Pulau Penyengat dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dengan ini akan memudahkan memberi arahan mengenai pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya.
2. Pengkajian difokuskan pada kondisi Pulau Penyengat sebagai cagar budaya Melayu yang keberadaannya berdampak dengan pemukiman penduduk dan tempat pelayanan umum yang jumlahnya semakin bertambah, meliputi pertambahan jumlah rumah penduduk, warung. Pusat informasi kebudayaan Melayu, jasa, dan tempat pelayanan umum (sekolah, mesjid, dan pusat kesehatan).

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Pulau Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota. Lokasinya terletak disebelah Barat Kota Tanjungpinang dengan jarak sekitar 1,5 km, dan dapat ditempuh dengan menggunakan *pompong* (perahu motor) selama 15 menit. Keseluruhan wilayah administrasi pulau ini dibatasi oleh Selat Riau. Pulau Penyengat terletak pada jalur transportasi Tanjungpinang – Kota Batam, Singapura, dan Johor (Malaysia).

Adapun batas wilayah dengan administrasi tetangga adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Senggarang
- Sebelah Selatan : Desa Pangkil
- Sebelah Timur : Kelurahan Tanjungpinang Kota dan Tanjungpinang Barat
- Sebelah Barat : Kelurahan Senggarang

Pulau Penyengat memiliki luas wilayah daratan, pantai dan laut sebesar 240 Ha. Wilayah darat hanya seluas 3,5 km² yang terbagi menjadi enam kampung yaitu Kampung Jambat, Kampung Balik Kota, Kampung Datuk, Kampung Baru, Kampung Bulang dan Kampung Ladi. Sedangkan untuk pembagian wilayah dalam rukun warga dan rukun tetangga terdiri dari 5 RW dan 11 RT. Untuk lebih jelasnya, posisi Pulau Penyengat dapat lihat Peta.



MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

TESIS

PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMELIHARA BENDA CAGAR BUDAYA DI PULAU PENYENGAT
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA MELAYU

WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERSEBARAN
PERMUKIMAN DI PULAU PENYENGAT

LEGENDA

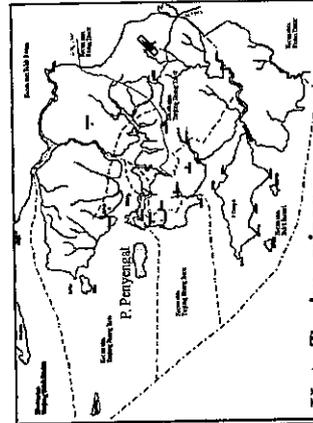
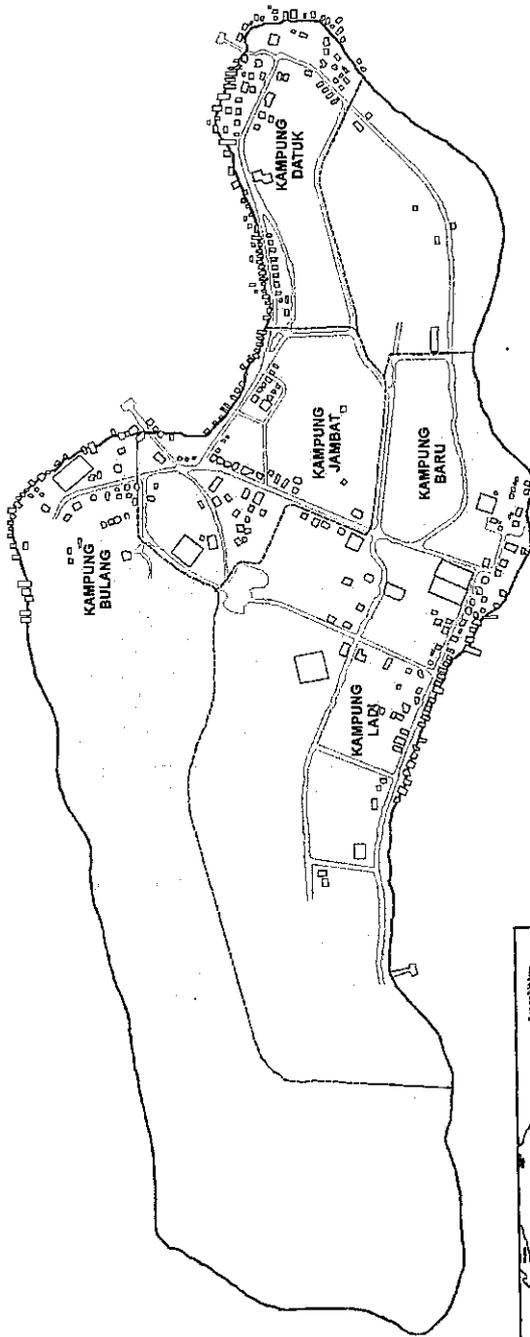
- BATAS PULAU
- BATAS KAMPUNG (RW)
- JALAN
- PERSEBARAN PEMUKIMAN

ARAH	SKALA	NO.GBR
	1 : 11.000 	1.5
		NO.HAL
		9

SUMBER:

Master Plan P. Penyengat Th. 2003

SELAT RIAU



Kota Tanjungpinang

Pemilihan benda cagar budaya Melayu di Pulau Penyengat sebagai lokasi penelitian didasari pertimbangan:

1. Pulau Penyengat banyak memiliki cagar budaya Melayu yang merupakan warisan dari Kerajaan Melayu Riau.
2. Pulau Penyengat merupakan tempat bersejarah dan pada masa lalu salah satu pusat kerajaan Melayu Riau.
3. Karakteristik wisata, yaitu benda cagar budaya Melayu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kepariwisataan dan kepentingan ekonomi kota.
4. Sesuai dengan Program Pariwisata Inti Rakyat (PIR), maka situs cagar budaya di Pulau Penyengat dipandang layak karena memiliki karakter berdampingan dengan pemukiman penduduk yang semakin bertambah padat sehingga perlu penanganan yang serius.
5. Letak geografis Pulau Penyengat sangat strategis bagi lalu lintas pelayaran laut antara Riau (Indonesia) – Singapura –Malaysia,

1.4.3 Posisi Penelitian

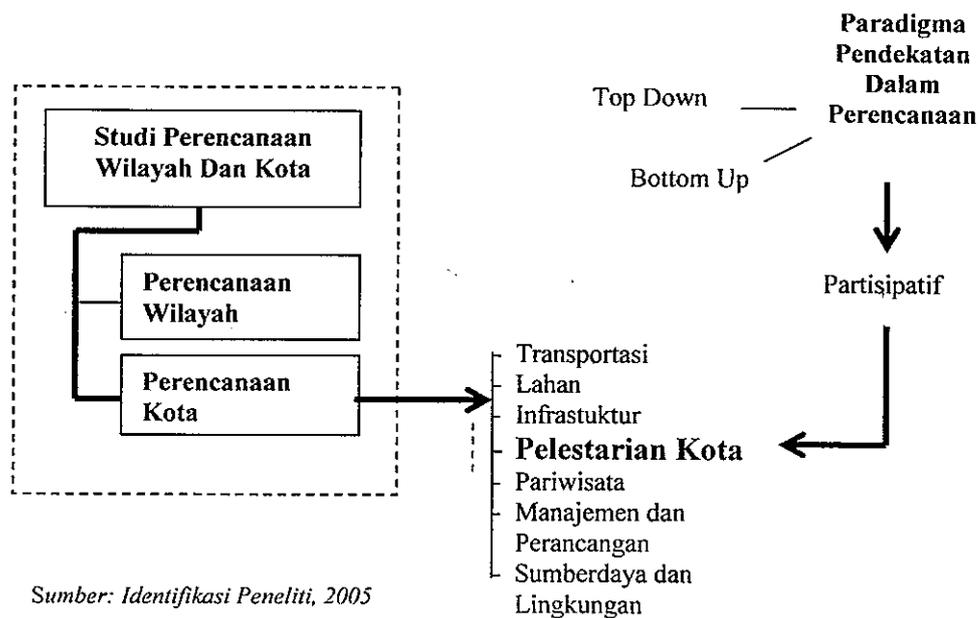
Posisi penelitian terhadap penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan kedudukan penelitian terhadap penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel I.1. Pembahasan yang dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya mencerminkan perencanaan pembangunan partisipatif yang diimplementasikan di beberapa sektor pembangunan. Dalam pembahasan posisi penelitian, dapat ditunjukkan bahwa beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulisan lebih membahas proses implementasi perencanaan partisipatif di sektor prasarana wilayah dan

permukiman, yaitu: peremajaan pasar, penataan lingkungan permukiman kumuh dan pemeliharaan prasarana.

TABEL I.1
POSISI PENELITIAN

NO	JUDUL PENELITIAN	LOKASI	TAHUN	PENELITI
1	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Peremajaan Pasar	Kota Bandung	1989	Gunawan Wibisana
2	Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Malang	Kota Malang	2002	Sigit Widyaninduto
3	Partisipasi masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana Pasca Pelaksanaan Program P2D Di Kecamatan bantam Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis	2004	Wan Evrizal
4	Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara Benda Cagar Budaya Di Pulau Penyengat Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Melayu	Pulau Penyengat	2005	Meitya Yulianti

Sumber: Hasil Analisis. 2005



GAMBAR 1.3
POSISI PENELITIAN

Posisi penelitian ini berada dalam kerangka perencanaan partisipatif sebagaimana penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun penelitian ini membahas implementasi perencanaan dalam pemeliharaan benda-benda cagar budaya. Dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, penelitian ini merupakan studi di bidang pelestarian kota dengan paradigma pendekatan perencanaan yang partisipatif. Gambar posisi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.1.

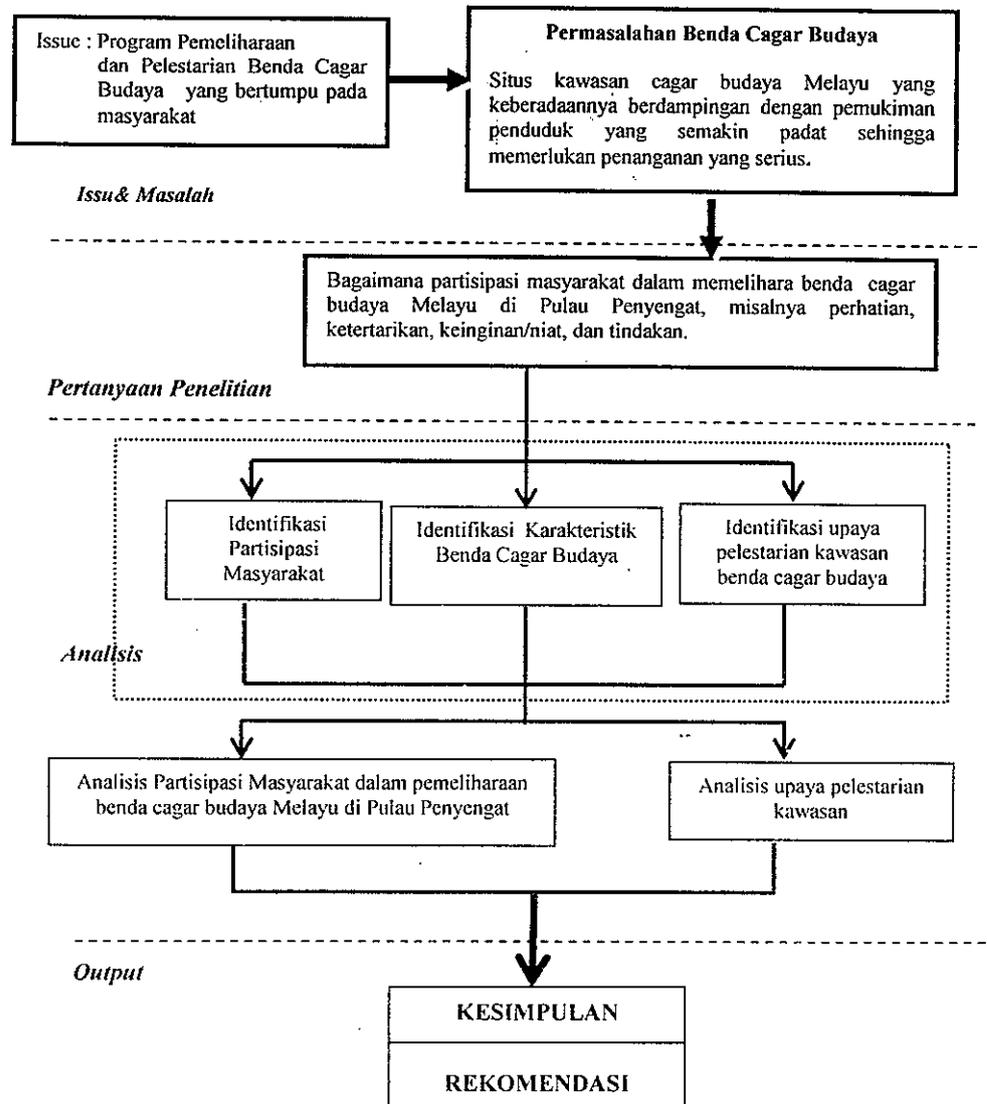
1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai landasan bagi penyempurnaan dan peningkatan pengembangan kepariwisataan, bermanfaat, yaitu:

1. Bagi masyarakat kelompok sasaran.
 - Memperoleh gambaran yang jelas tentang partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya Melayu di Pulau Penyengat sehingga dapat memotifasi masyarakat dalam ikut melestarikan peninggalan sejarah. Mengingat lokasinya yang strategis perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin baik untuk kepentingan kepariwisataan maupun kepentingan ekonomi kota.
 - Membuka wacana bagi masyarakat tentang pemanfaatan benda cagar budaya sehingga mampu melihat peluang kesempatan yang ditimbulkannya.
2. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang.
 - Landasan bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang guna mengembangkan pariwisata daerah,
 - Mengetahui bentuk kepedulian masyarakat pada objek sosial sejarah sehingga dapat merekomendasikan dalam kebijakan-kebijakan tentang pemeliharaan yang melibatkan masyarakat.

Disamping manfaat tersebut di atas, sebagai sumber referensi bagi akademisi dan pemerhati masalah sejarah Melayu.

1.6 Kerangka Pemikiran



Sumber : Peneliti, 2005

GAMBAR 1.4
KERANGKA PIKIR

Deskripsi kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Issue berkembang dari adanya program pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya. Keberadaan situs budaya Melayu di Pulau Penyengat yang berdekatan dengan kawasan permukiman memerlukan suatu penanganan yang serius agar situs tetap terjaga keasliannya. Untuk penanganan kawasan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan partisipatif dari masyarakat agar situs dapat terjaga dengan baik, sehingga diperlukan suatu cara untuk bagaimana partisipasi masyarakat

Pulau Penyengat sebagai situs cagar budaya Melayu keberadaannya berdampingan dengan pemukiman penduduk yang semakin padat sehingga memerlukan penanganan yang serius.

Dari kondisi tersebut diatas, maka dapat dimunculkan pertanyaan penelitian (*Research Question*), yaitu bagaimana partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya Melayu di Pulau Penyengat?

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat di Pulau Penyengat dilakukan analisis identifikasi dan karakteristik masyarakat, analisis bentuk partisipasi, dan analisis tingkat partisipasi. Dari analisis yang dilakukan maka diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu suku bangsa, agama, lama domisili, pekerjaan, latar pendidikan, alamat, umur, dan jenis kelamin. Adapun hasil akhir dari penyusunan tesis ini adalah kesimpulan dan rekomendasi.

Selengkapnya kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 1.2.

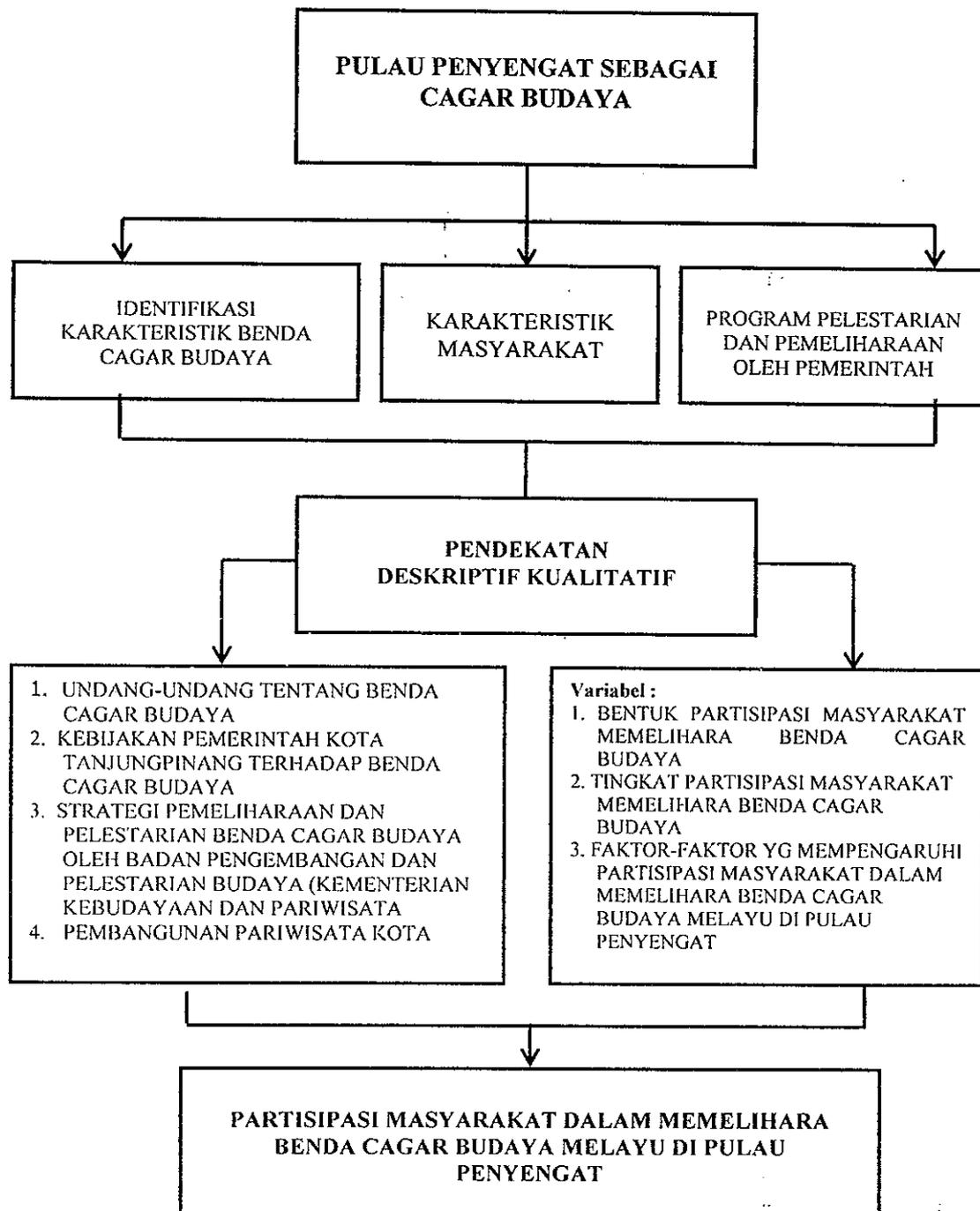
Dengan *research question* ini, akan diperoleh suatu kajian penelitian yang terarah dan terfokus;

- Identifikasi partisipasi dalam memelihara benda cagar budaya Melayu di Pulau Penyengat berdasarkan karakteristik masyarakat yang mencakup ekonomi dan sosial budaya,
- Analisis meliputi partisipasi masyarakat sekitar yang terdiri dari perhatian dan ketertarikan, keinginan/niat dan cara tindakan.
- Kesimpulan dan rekomendasi, merupakan hasil rangkuman dari kajian yang dilakukan dan masukan atau saran terhadap pengembangan benda cagar budaya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Kajian partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan benda cagar budaya Melayu di Pulau Penyengat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analitis akan menceritakan realitas sosial atau gambaran kejadian yang berlangsung selama penelitian akan direkam dan dicatat serta dituangkan dalam bentuk naratif. Sementara pendekatan kuantitatif akan menganalisis data, fakta dan informasi lainnya yang diperoleh dari sampel penelitian. Analisis kuantitatif sesuai dengan indikator dari variabel yang ada dalam penelitian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.



Sumber : Analisis Peneliti, 2005

GAMBAR 1.5
KERANGKA ANALISIS (KERANGKA PENDEKATAN)

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:

1. Review data sekunder, yaitu untuk mengetahui teori-teori, undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan benda cagar budaya,
2. Analisis partisipasi, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya Melayu di Pulau Penyengat,
3. Analisis masalah, yaitu analisis untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan benda cagar budaya,
4. Analisis pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya, serta peningkatan peran pemerintah Kota Tanjungpinang dan masyarakat di Pulau Penyengat sehingga mempunyai hubungan yang sinergis bagi pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya di Pulau Penyengat.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti membahas permasalahan ini dengan pendekatan kualitatif serta kajian yang bersifat deskriptif analisis. Artinya, data, fakta, dan informasi yang terkumpul dari wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap stake holder, pengisian kuesioner oleh masyarakat di sekitar objek wisata (responden), pengamatan di lapangan (*observation*), dan analisis data sekunder (studi pustaka) merupakan gambaran realitas yang terjadi yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya di Pulau Penyengat.

A. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan pemerintahan kota Tanjungpinang. Wawancara terstruktur akan dilakukan terhadap informan kunci yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sementara itu wawancara bebas dilakukan terhadap informan kunci yaitu tokoh masyarakat di Pulau Penyengat. Data yang ingin diperoleh, yaitu: latar belakang sejarah benda-benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat, keadaan fisik benda cagar budaya, program pelestarian dan pengembangan benda cagar budaya, serta pemanfaatan benda cagar budaya bagi Pemerintahan Kota Tanjungpinang dan masyarakat setempat.

B. Kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan terhadap semua sampel penelitian dari populasi masyarakat di Pulau Penyengat dalam bentuk pilihan. Setiap responden hanya menjawab satu kategori jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan atau mengisi pertanyaan terbuka untuk mendapatkan data tentang bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat Melayu setempat terhadap benda cagar budaya yang ada disekelilingnya. Pengisian kuesioner ini ditujukan untuk melihat perhatian, ketertarikan, sikap, minat, dan partisipasi anggota dalam pengembangan benda cagar budaya.

C. Observasi

Observasi dilakukan guna melihat realitas sosial yang terjadi pada masyarakat di sekitar lokasi cagar budaya. Di samping itu dari observasi juga

diharapkan terlihat realitas nyata dari partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya di Pulau Penyengat.

1.7.3 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah diperoleh diolah sesuai dengan indikator-indikator dari variabel penelitian dan kemudian disajikan dalam bentuk:

- a. Tabulasi, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel
- b. Gambar dan grafik, yaitu menyajikan data dalam bentuk gambar dan grafik yang inovatif sehingga mudah dibaca.

1.7.4 Teknik Analisis

1.7.4.1 Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode penelitian kualitatif menggambarkan atau melukiskan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat. Melalui metode ini peneliti menganalisis obyek penelitian dalam bentuk uraian, pengertian ataupun penjelasan.

Analisa data secara kualitatif terhadap data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder dijabarkan secara deskriptif dan normatif didasarkan dari kondisi umum obyek penelitian dan benda cagar budaya yang terdapat di Pulau Penyengat.

1.7.4.2 Analisis Data Kuantitatif

Berbagai teknik analisis kuantitatif dikenal dalam penelitian ilmiah yang digunakan oleh para peneliti. Analisis ini biasanya didasarkan dari data kuesioner yang telah diisi oleh responden penelitian.

Dalam kajian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis distribusi frekuensi. Analisis ini dilakukan terhadap data kuantitatif yang berhubungan dengan karakteristik yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya Melayu di Pulau Penyengat: seperti pandangan, kesadaran terhadap nilai-nilai seni dan budaya dari benda cagar budaya, keterlibatan secara sukarela dan keinginan melestarikan benda cagar budaya, sikap dan perilaku terhadap benda cagar budaya.

1.7.5 Teknik Sampling

Pengambilan sampel dilakukan terhadap masyarakat di Pulau Penyengat (populasi) yang bertempat tinggal di sekitar benda cagar budaya. Setelah populasi diketahui kemudian ditentukan bagaimana cara mengambil sampel serepresentatif mungkin. Mengingat menyebarnya pemukiman masyarakat di sekitar lokasi benda cagar budaya, maka sampel penelitian dipilih secara *purposive sampling* (sampel purposif). Pengambilan secara purposif pada penelitian ini didasarkan atas dasar data jumlah Kepala Keluarga (KK) di wilayah perencanaan. Banyaknya KK di wilayah perencanaan sebanyak 600 KK tersebar dalam enam wilayah kampung. Adapun wilayah kampung yang menjadi daerah sebaran kuesioner difokuskan terhadap tiga wilayah paling padat penduduknya, dan paling banyak sebaran benda cagar budayanya. Pengambilan sampel sebanyak 60 KK dari sekitar 600

Kepala Keluarga dimungkinkan karena minimal 10% dari keseluruhan populasi (Sevilla,1993:163). Adapun proporsi pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel

I.2.

TABEL I.2
LOKASI PENYEBARAN KUESIONER

NO.	LOKASI PENYEBARAN KUESIONER	EKSEMPLAR	PERSENTASE (%)	JUMLAH KK
1.	Kampung Jambat	26	43	258
2.	Kampung Bulang	17	28,5	171
3.	Kampung Ladi	17	28,5	171
J U M L A H		60	100	600

Sumber : Hasil Analisis. 2005.

Alasan penyebaran kuesioner di tiga lokasi benda cagar budaya tersebut karena letaknya yang berdekatan dengan perumahan penduduk sehingga menjadi bagian dari kehidupan penduduk di sekitarnya.

Pemilihan didasarkan atas faktor padatnya perumahan penduduk di sekitar benda cagar budaya sehingga besar kemungkinan mempengaruhi keberadaan benda cagar budaya tersebut. Penyebaran kuesioner pada masing-masing wilayah tidak sama dikarenakan populasi penduduk pada masing-masing lokasi benda cagar budaya tersebut juga berbeda. Penyebaran kuesioner terbanyak dilakukan di Kampung Jambat, yaitu sebanyak 43% .

Sampel pemilihan informan kunci (*key informan*) untuk wawancara adalah pejabat pemerintahan Kota Tanjungpinang yang mempunyai tanggung jawab terhadap benda cagar budaya dan tokoh masyarakat di Pulau Penyengat

yang mengetahui latar belakang sejarah benda cagar budaya. Sampel yang dijadikan informan ini dipilih secara *selective purposive sampling* sebanyak 10 orang. Informan yang dipilih antara lain: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Kepala Sub Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Kepala Sub Dinas Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tanjungpinang. Sementara itu dari golongan tokoh masyarakat adalah: Ketua Balai Maklumat Pulau Penyengat, Ketua Balai Adat Pulau Penyengat, Lurah Penyengat, Ketua Yayasan Indera Sakti Pulau Penyengat dan Bapak Raja Mahmud (seniman dan budayawan Pulau Penyengat).

Dari informan dan responden penelitian diharapkan dapat terkumpul data, fakta, dan informasi tentang partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya di Pulau Penyengat sebagai upaya pelestarian warisan budaya Melayu.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mencapai maksud dan tujuan penulisan studi ini, secara keseluruhan pembahasan di bagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan perlunya dan mengapa penelitian ini dilakukan. Dimulai dengan uraian tentang latar belakang masalah yang berisi penjelasan tentang situasi dan kondisi dari yang perlu diteliti. Perumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk

pertanyaan penelitian dengan tujuan, sasaran dan manfaat studi yang ingin dicapai. Ruang lingkup penelitian menggambarkan lokasi dan batasan penelitian. Kerangka pikir yang merupakan alur pikir penulis dalam menuangkan pemikiran penulisan serta metode penelitian yang merupakan alat bantu dalam analisis dan hipotesis yang merupakan dugaan sementara.

BAB II KAJIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN BENDA CAGAR BUDAYA MELAYU DI PULAU PENYENGAT

Merupakan penelaahan literatur guna mendapat teori-teori yang diharapkan mampu mendasari arah pemikiran peneliti. Kajian ini berisikan teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian mengenai partisipasi masyarakat dan kaitannya dengan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya. Dari hasil kajian ini dipakai sebagai acuan penentuan variable penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM SITUS CAGAR BUDAYA PULAU PENYENGAT

Merupakan tinjauan wilayah penelitian berupa geografis dan demografis serta sejarah menyangkut keberadaan benda cagar budaya di Pulau Penyengat.

BAB IV ANALISIS

Berisikan analisis karakteristik masyarakat, bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya

berdasarkan karakteristik masyarakat serta dikaitkan dengan kondisi geografis, demografis dan psikografis daerah penelitian, analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya di Pulau Penyengat sebagai upaya pelestarian warisan budaya Melayu, dan rumusan hasil analisis. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif maupun kuantitatif.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian tentang simpulan hasil analisis yang telah dilakukan serta memberikan saran atau rekomendasi tentang pemeliharaan benda cagar budaya di Pulau Penyengat.

BAB II

KAJIAN TEORI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMELIHARA BENDA CAGAR BUDAYA MELAYU DI PULAU PENYENGAT

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian teori sebagai dasar dari penelitian yang dilakukan. Adapun teori yang dikaji adalah mengenai partisipasi masyarakat, pelestarian benda cagar budaya, dan kajian mengenai masyarakat setempat.

2.1 Kajian Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Pengertian

Partisipasi menurut Mikkelsen (2003) adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Aktivitas keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program merupakan salah satu indikasi pelaksanaan partisipasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sementara itu, partisipasi tidak langsung berwujud bantuan keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan (Wibisana, 1989: 41).

Menurut PBB (dalam Slamet, 1994) dalam hubungannya dengan pembangunan, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan yang berbeda, meliputi: (a) proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut, (b) pelaksanaan program dan proyek secara sukarela, dan (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek.

Partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu maupun komunal (Hall, 1986: 9). Adanya faktor dinamis dalam kegiatan ini menandakan bahwa kegiatan ini sangat bergantung kepada penggerak aktivitas, yang dalam hal ini adalah masyarakat untuk menentukan jalannya kegiatan partisipasi.

Selanjutnya ditambahkan Hall (1986) bahwa partisipasi masyarakat merupakan kemampuan menerima untuk melibatkan diri secara sukarela dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungannya dalam berbagai hal, khususnya kebudayaan. Keterlibatan secara sukarela ini biasanya lahir dari sikap keinginan adanya perubahan yang ditentukannya sendiri dan peka terhadap lingkungan mereka. Sesuai dengan salah satu semangat otonomi daerah, partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan menjadi kekuatan serta pendorong yang efektif. Sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidupnya.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Slamet (1994) dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan proyek pembangunan tersebut. Partisipasi dalam perencanaan merupakan pelibatan masyarakat yang paling tinggi karena masyarakat turut serta dalam membuat keputusan.

Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, mencakup kegiatan merumuskan tujuan, maksud dan target, merumuskan program-program, menilai program apakah program itu dapat mewujudkan tujuan, merencanakan dan menilai biaya dan sumber-sumber biayanya. Bentuk partisipasi dalam tahap perencanaan ini dapat diikuti langsung oleh warga masyarakat maupun melalui lembaga yang ada seperti LKMD, RW maupun RT (Evrizal, 2004: 25).

Partisipasi dalam pelaksanaan, pengukurannya bertitik pangkal pada bagaimana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas riil yang merupakan perwujudan program yang telah digariskan di dalam kegiatan fisik. Dengan demikian pengukurannya adalah bagaimana masyarakat memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan kegiatan lembaga yang bersangkutan. Sumbangan tersebut dapat berupa uang, tenaga dan dapat pula berwujud barang (material). Klasifikasi yang memberikan sumbangan uang penduduk kaya, sumbangan tenaga penduduk berekonomi lemah, dan sumbangan barang biasanya tidak terbatas pada kelas sosial tertentu tapi berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan bentuk sumbangan masyarakat ketiga hal sekaligus. Kasus seperti

ini berbeda-beda pada tiap daerah tergantung karakteristik masyarakatnya (Slamet, 1994).

Duseldorp, dalam Slamet (1994) membuat klasifikasi dari tipe partisipasi masyarakat berdasarkan:

1. Partisipasi berdasarkan pada derajat kesukarelaan

Partisipasi ini dalam dua bentuk, yaitu partisipasi bebas dan terpaksa. Partisipasi bebas terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara sukarela secara spontan berdasarkan keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan. Partisipasi terbujuk terjadi bila seseorang memulai partisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau dipengaruhi untuk terlibat. Partisipasi terpaksa terjadi karena adanya paksaan dari peraturan hukum dan sosial ekonomi.

2. Penggolongan berdasarkan pada cara keterlibatan

Penggolongan ini dibagi dua, yaitu partisipasi langsung dan tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi bila orang menampilkan diri dari kegiatan tertentu seperti mengambil peran dalam pertemuan, diskusi, menyumbangkan tenaga dan sebagainya. Partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan partisipasinya misalnya dalam pengambilan keputusan seperti halnya di senat, DPR, dewan-dewan koperasi dan sebagainya. Orang yang mewakili diharapkan memperjuangkan kepentingan serta melindungi hak-hak yang diwakili, harapannya adalah agar para wakil itu dapat mengambil bagian di dalam proses pembuatan keputusan pada tingkatan yang lebih tinggi.

3. Penggolongan berdasarkan pada keterlibatan dalam berbagai tahap proses pembangunan

Pada bagian ini terdapat enam langkah, yaitu: perumusan tujuan, penelitian, persiapan rencana, penerimaan rencana, pelaksanaan dan penilaian. Disebut partisipasi lengkap bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh tahapan tersebut. Disebut partisipasi sebagian bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung hanya terlibat di sebagian tahapan tersebut.

4. Penggolongan berdasarkan pada tingkatan organisasi

Partisipasi ini dibedakan antara partisipasi terorganisasi dan tidak terorganisasi. Partisipasi terorganisasi terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan. Sedang partisipasi tidak terorganisasi terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya kadang-kadang saja yang umumnya karena keadaan memaksa. Partisipasi tidak terorganisasi akan tumbuh menjadi terorganisasi bila kegiatan yang dilakukan itu berulang-ulang sehingga demi kelancaran pelaksanaannya diperlukan pengorganisasian.

5. Penggolongan berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan

Partisipasi intensif terjadi bila didalamnya terdapat aktivitas partisipatif yang tinggi. Sedang partisipasi ekstensif terjadi bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak teratur dan memerlukan interval waktu panjang.

6. Penggolongan berdasarkan pada lingkup kegiatan

Digolongkan menjadi partisipasi tak terbatas bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat diawasi oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi anggota komunitas. Kedua adalah partisipasi terbatas yang terjadi bila hanya sebagian kegiatan sosial, politik, administrasi dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipatif.

7. Penggolongan berdasarkan pada efektivitas

Dalam hal ini partisipasi dibedakan menjadi partisipasi efektif dan tidak efektif. Partisipasi efektif yaitu kegiatan-kegiatan partisipatif yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktivitas partisipasi. Partisipasi tidak efektif terjadi bila tidak satupun atau sejumlah kecil saja dari tujuan-tujuan aktivitas partisipatif yang dicanangkan terwujud.

8. Penggolongan berdasarkan pada siapa yang terlibat

Orang-orang yang dapat berpartisipasi dibedakan :

- a. Anggota masyarakat setempat
 - Penduduk setempat
 - Pemimpin setempat
- b. Pegawai pemerintah
 - Penduduk dalam masyarakat
 - Bukan penduduk
- c. Orang-orang luar

- Penduduk dalam masyarakat

- Bukan penduduk

- d. Wakil-wakil masyarakat yang terpilih

9. Penggolongan berdasarkan gaya partisipasi

Dibedakan menjadi tiga model praktek organisasi, yaitu:

- a. Bangunan lokalitas

Memiliki maksud melibatkan orang-orang didalam pembangunan mereka sendiri dan dengan cara ini menumbuhkan energi sosial yang dapat mengarahkan pada kegiatan menolong diri sendiri.

- b. Perencanaan Sosial

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan sosial memiliki tujuan utama untuk mencocokkan terhadap kebutuhan yang dirasakan dan membuat program lebih efektif.

- c. Aksi sosial

Tujuan utama tipe ini adalah memindahkan hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-sumber.

2.1.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Menurut Arstein (dalam Panudju, 1999: 69-76) tingkat peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digolongkan dalam delapan tipologi tingkat peran serta masyarakat. Secara garis besar tipologi tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Manipulation* atau manipulasi

Tingkat peran serta ini adalah yang paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasihat *advising board*. Dalam hal ini tidak ada peran serta masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

b. *Therapy* atau penyembuhan

Dengan berkedok melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, para perancang memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan dari mereka.

c. *Informing* atau pemberian informasi

Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan peran serta masyarakat. Meskipun demikian yang sering terjadi penekanannya lebih pada pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kuasa kepada masyarakat. Tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

d. *Consultation* atau konsultasi

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju peran serta penuh dari masyarakat. Akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dipergunakan adalah survei tentang arah pikir masyarakat, pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.

e. *Placation* atau perujukan

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota lainnya berasal dari wakil-wakil berbagai instansi pemerintah. Walaupun usul dari masyarakat diperhatikan namun suara masyarakat itu sering kali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

f. *Partnership* atau kemitraan

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab

dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

g. *Delegated power* atau pelimpahan kekuasaan

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan yang dalam hal ini adalah pemerintah harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas.

h. *Citizen control* atau masyarakat yang mengontrol

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana, tanpa melewati pihak ketiga.

Dari kedelapan tipologi tersebut, menurut Arnstein secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada peran serta atau *non participation* yang meliputi *manipulation* dan *therapy*.
- b. Peran serta masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau *degrees of tokenism* yang meliputi *informing*, *consultation* dan *placation*.

- c. Peran serta masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau *degrees of citizen power* yang meliputi *partnertship*, *delegated power* dan *citizen control*.

Meskipun tipologi tersebut di atas berdasarkan kasus-kasus peremajaan kota, dapat pula dipakai sebagai gambaran atau contoh pada kegiatan-kegiatan lain. Untuk mengukur tingkat peran serta dapat dilakukan dengan mengukur tingkat peran serta individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan Chapin dan Goldhamer (dalam Slamet, 1994: 82-89). Chapin mengungkapkan bahwa skala peran serta dapat diperoleh dari penilaian-penilaian terhadap kriteria-kriteria tingkat peran serta sosial yaitu :

- a. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial.
- b. Kehadiran dalam pertemuan.
- c. Membayar iuran/sumbangan.
- d. Keanggotaan di dalam kepengurusan.
- e. Kedudukan anggota di dalam kepengurusan.

Untuk mengukur peran serta masyarakat, menurut Goldhamer menggunakan variabel yaitu :

- a. Jumlah asosiasi yang dimasuki.
- b. Frekuensi kehadiran.
- c. Jumlah asosiasi dimana dia memangku jabatan.
- d. Lamanya menjadi anggota.

Berdasarkan skala peran serta individu tersebut maka dapat disimpulkan skala untuk mengukur peran serta masyarakat yaitu :

- a. Frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan.
- b. Keaktifan anggota kelompok dalam berdiskusi.
- c. Keterlibatan anggota dalam kegiatan fisik.
- d. Kesiapan memberi iuran rutin atau sumbangan berbentuk uang yang telah ditetapkan.

2.1.4 Logika Proses Partisipasi Masyarakat

Menurut Lund (dalam Mikkelsen, 2003: 66) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dalam dua model logika. Kedua logika ini didasarkan pada efisiensi dan pemberdayaan. Di bawah ini digambarkan kedua model logika tersebut

TABEL II.1
LOGIKA PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT

STRATEGI	EFISIENSI	PEMBERDAYAAN
Rumusan Dasar	Pembangunan melalui kemitraan <i>Top Down</i> dengan masyarakat (jangkauan ke bawah yang inklusif)	Pembangunan alternatif yang dirumuskan oleh masyarakat dan organisasi setempat (jangkauan ke atas yang integratif)
Asumsi Normatif	Masyarakat miskin harus dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti yang ditentukan oleh negara	Masyarakat miskin harus memperoleh proyek pembangunan yang mereka sendiri butuhkan
Asumsi Deduktif	Mensyaratkan partisipasi sebelumnya dalam proses pembangunan. Karena itu mereka harus dibuat mampu untuk lebih berpartisipasi lagi	Berarti bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikiran serta kehendak mereka
Asumsi Teoritis Sebab Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik di antara kelompok sosial dapat diredam melalui pola demokrasi setempat. Partisipasi masyarakat adalah mungkin. 2. Partisipasi masyarakat berdampak positif terhadap pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antar kelompok masyarakat dapat diredam melalui pola demokrasi setempat. Karena itu partisipasi masyarakat adalah mungkin. 2. Pembangunan menjadi positif bila ada partisipasi masyarakat

Lanjutan Tabel II.1

STRATEGI	EFISIENSI	PEMBERDAYAAN
	<p>3. Partisipasi masyarakat merupakan alat positif untuk memobilisasi sumber-sumber setempat (manusia dan alam) dengan tujuan Melaksanakan program pembangunan tertentu</p> <p>4a. Kurangnya partisipasi merupakan suatu ekspresi dari Ketidakmampuan untuk berpartisipasi : kurangnya dana, pendidikan dan sumber-sumber lain, serta tingkat organisasinya rendah</p> <p>4b. Atau bisa juga berarti bahwa rancangan program kurang disesuaikan pada kebutuhan kelompok sasaran. Dalam hal ini perencanaan dan pelaksanaan prosedur yang menyimpang atau teknologi yang tidak tepat. (hambatan operasional untuk Partisipasi). Jadi al itu menunjukkan perlunya perbaikan pada pendidikan, teknik, administrasi dan keuangan</p>	<p>3. Pembangunan masyarakat merupakan hal yang mutlak perlu untuk mendapatkan partisipasinya karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan kesejahteraan yang ditetapkan oleh masyarakat, kecuali masyarakat itu sendiri memiliki untuk memaksa pemerintahnya</p> <p>4a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berarti penolakan (secara internal dikalangan anggota masyarakat itu dan secara eksternal terhadap pemerintah atau pelaksanaan proyek)</p> <p>4b. Atau hal itu menunjukkan adanya struktur sosial yang tidak memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi (hambatan struktural untuk berpartipasi). Jadi ini merupakan konflik sosial yang harus diatasi melalui musyawarah mufakat, kompromi atas kebijakan yang bertentangan itu tidak menghilangkan struktur yang tidak memungkinkan partisipasi melalui reformasi politik.</p>

Sumber : Lund (dalam Mikkelsen, 2003)

2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap sesuatu hal berhubungan dengan faktor internal dan eksternal yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, terdiri dari: jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, agama, daerah asal (etnis), dan lama tinggal pada suatu tempat.

Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri personal individu dengan tingkat peran serta. Ciri-ciri individu tersebut yang terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota dan terlibat dalam kegiatan

yang dilakukan serta besarnya pendapatan (Slamet, 1994: 137-143) akan sangat berpengaruh pada kegiatan peran serta masyarakat.

Partisipasi dari kaum laki-laki dan perempuan terhadap sesuatu hak akan berbeda. Hal ini terjadi karena adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan pada derajat yang berbeda. Perbedaan ini pada akhirnya melahirkan kedudukan dan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, hal ini juga akan membedakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat (Soekanto, 1982).

Kelompok umur juga akan mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap sesuatu hal. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas sehingga akan memunculkan golongan usia tua dan muda yang berbeda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan.

Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan muncul golongan tua dan golongan muda, yang berbeda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Faktor usia tentunya memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk berperan serta. Beberapa temuan menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia dengan keanggotaan seseorang untuk ikut dalam suatu kelompok atau organisasi. Selain itu beberapa fakta juga mengindikasikan bahwa usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berperan serta (Slamet, 1994: 142).

Faktor pendidikan dianggap penting karena melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. Dengan demikian dapat dipahami bila ada hubungan antara tingkat pendidikan dan peran serta. Sedangkan faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu (Slamet, 1994: 115-116).

Besarnya tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Besarnya biaya investasi yang akan dilakukan oleh masyarakat tidak semata-mata bergantung kepada kemampuan menanamkan uangnya, tetapi juga pada keuntungan dan kepuasan dari apa yang akan mereka dapatkan dari investasi tersebut. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju, 1999: 77-78).

Peran serta masyarakat hanya akan terjadi bila sejumlah warga dalam unit geografi tertentu merupakan sebuah komunitas atau minimal merupakan sebuah kelompok kepentingan yang akan dilayani oleh adanya peran serta tersebut. Kelompok ini merupakan wujud dari interaksi sosial antar warga. Lebih jauh Bierens den Haan mengatakan (dalam Susanto, 1999: 33-37), bahwa suatu kelompok memperoleh bentuknya dari kesadaran akan keterikatan pada anggota-anggotanya. Suatu kelompok bukan merupakan jumlah anggotanya saja, akan tetapi mempunyai suatu ikatan psikologis. Adanya suatu kebutuhan psikologis

manusia untuk mempunyai dan digolongkan pada suatu kelompok, tempat ia berlindung dan merasa aman. Semakin banyak orang berinteraksi semakin kuat ikatan psikologisnya dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka semakin tinggi ikatan psikologisnya dengan lingkungan yang berpengaruh pada besarnya keinginan untuk terlibat dalam kegiatan bersama.

Akhirnya lama waktu tinggal pada suatu daerah juga akan mempengaruhi partisipasi seseorang terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Seseorang yang sudah lama tinggal di sekitar benda cagar budaya akan mempunyai partisipasi yang berbeda dengan orang yang belum lama tinggal di tempat tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa makin lama seseorang tinggal di kawasan cagar budaya maka tingkat partisipasinya akan berbeda mengingat rutinitas yang dijalani sehari-hari melihat benda-benda cagar budaya akan mempertinggi tingkat kekagumannya.

2.1.6 Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 1999: 69-71).

Peran serta masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan dengan menerima tanggung jawab dan aktifitas tertentu serta dengan memberikan kontribusi sumber daya yang dimilikinya.

Masalah pelestarian benda cagar budaya tidak hanya mutlak harus dilakukan oleh pemerintah. Upaya pelestarian juga diharapkan dari partisipasi anggota masyarakat dan swasta agar terjadi kesinambungan dalam pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut.

Peran serta masyarakat sebenarnya sangat besar, dan sangat diperlukan, dalam menjaga dan mengembangkan benda cagar budaya. Mereka juga berhak menetapkan apa yang menjadi "pusaka" masing-masing berdasarkan kriteria yang ditetapkan sendiri. Sudah saatnya tumbuh kembali kepekaan dan kemandirian dalam melihat dan mencermati lingkungannya sebagaimana halnya kondisi yang telah mengakar di masyarakat pada masa lalu. Kemudian bila telah ditetapkan berdasar UU No. 5, tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, pusaka tersebut akan disebut pula Benda Cagar Budaya (Adishakti, 2003b).

Potensi sosial yang dimiliki sekarang sebagai modal dalam pelibatan masyarakat ini adalah kepedulian masyarakat setempat terhadap pelestarian dan pengembangan semua benda cagar budaya yang ada di pulau Penyengat. Selain itu, dukungan dari pemerintah kota dalam bentuk kebijakan-kebijakan sudah harus diarahkan kepada upaya pelestarian dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya yang ada di pulau Penyengat. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah kota yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, tentu keterlibatan masyarakat setempat akan lebih mendukung upaya pelestarian serta dapat diambil manfaatnya.

2.2 Pelestarian Benda Cagar Budaya

Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Untuk menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya. (Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992).

Benda cagar budaya pada saat ini sering kali diartikan sebagai "*Pusaka Saujana Budaya*". Penyebutan demikian karena benda cagar budaya termasuk ke dalam kelompok barang-barang atau benda-benda yang tergabung dalam pusaka saujana budaya. (Draft Kaliurang, 2003).

Menurut Adishakti (2003b, 1) pusaka Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Lautan Cina hingga Samudera Indonesia. Hadir dalam keanekaragaman, terlihat maupun tidak, yang terbentuk oleh alam atau olah budi manusia, serta interaksi antar keduanya dari waktu ke waktu. Ketika membicarakan pusaka budaya, tidak akan dapat dilepaskan dari aspek pusaka alam, begitu juga sebaliknya. Pusaka Indonesia mengandung keduanya. Manifestasi kesatuan ini merupakan pusaka saujana budaya (*cultural landscape heritage*). Sedangkan masing-masing ragam yang membentuk keanekaragaman itu memiliki keunikan tersendiri, apakah yang tumbuh di lingkungan budaya tertentu, ataukah hasil percampuran antar budaya baik di waktu lampau, saat ini

dan nanti. Diyakini, Indonesia merupakan mosaik pusaka saujana budaya terbesar di dunia.

Dalam penyusunan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia disepakati pemahaman pusaka Indonesia adalah pusaka alam dan pusaka budaya yang membentuk kesatuan pusaka saujana yang beraneka ragam, yang merupakan bentukan alam dan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya lebih dari 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, baik secara sendiri-sendiri, perpaduan dengan budaya lain, dan sebagai kesatuan bangsa Indonesia di sepanjang sejarah keberadaannya. Mengingat eratnya kaitan antara alam dan budaya, maka disepakati untuk menggunakan istilah “pusaka saujana” untuk menggambarkan kesatuan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu (Draft Kaliurang, 3 Oktober 2003).

Benda cagar budaya sangat memerlukan perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan terhadap sesuatu sering kali disebut dengan konservasi. Konservasi menurut Poerwadarminta adalah kegiatan pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan. Secara artifisial konservasi juga diartikan dengan pengawetan atau pelestarian.

Konservasi dapat juga dikatakan sebagai upaya penjagaan/pengawetan suatu tempat dengan tetap memanfaatkan kegunaan dari tempat tersebut untuk memberi wadah bagi kegiatan yang telah ada maupun kegiatan baru sehingga dapat membiayai sendiri kelangsungan eksistensinya.

Benda-benda cagar budaya yang terdapat di Pulau Penyengat keberadaannya tidak hanya dilindungi oleh pemerintah, namun juga masyarakat setempat. Pemeliharaan oleh masyarakat setempat diperlukan mengingat benda cagar budaya merupakan warisan sejarah dan budaya dari leluhur mereka, khususnya anggota masyarakat Melayu Pulau Penyengat.

Pelestarian benda cagar budaya sangat diperlukan mengingat benda ini merupakan aset nasional yang dapat dipergunakan dalam jangka yang lama. Pelestarian benda cagar budaya berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan benda cagar budaya tersebut yang pada akhirnya ditujukan demi menarik minat wisatawan guna berkunjung ke daerah tempat benda cagar budaya tersebut berada.

Berkaitan dengan benda cagar budaya, Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa: "*....kebudayaan Indonesia harus dipelihara guna meningkatkan kualitas hidup, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan*".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya menetapkan bahwa benda cagar budaya yang dimiliki oleh negara, pengelolaannya diselenggarakan oleh menteri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya menyatakan bahwa perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan usaha untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jati diri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.

Untuk kepentingan perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya, baik mengenai penguasaan, pemilikan, pendaftaran, pengalihan, penemuan, pencarian, pemeliharaan maupun pemanfaatan benda cagar budaya dalam Peraturan Pemerintah ini senantiasa tetap memperhatikan hak dan kewajiban serta kepentingan pemilik ataupun masyarakat.

Menurut Adishakti (2003a:1), fenomena keanekaragaman dan keunikan pusaka yang dimiliki Indonesia ini menjadi perhatian terus menerus para pemerhati dan pelaku pelestarian dari berbagai daerah di Indonesia dan memicu banyak pertanyaan serta pemikiran kritis. Disadari pelestarian pusaka merupakan persoalan lintas ilmu, lintas sektor, dan lintas daerah. Sementara, kenyataan yang ada sangat memprihatinkan. Persoalannya, pelestarian pusaka masih merupakan arogansi sektoral, keilmuan, bahkan dengan adanya otonomi daerah tumbuh menjadi arogansi daerah, dan yang paling memprihatinkan adalah justru pusaka dan pelestarian tidak terpedulikan.

Selanjutnya dikatakan oleh Adishakti (2003b: 1-2) beberapa prinsip penting dalam proses pelestarian kebudayaan nasional Indonesia adalah:

- a. Masyarakat sebagai pusat pengelolaan (*people-centered management*),
- b. Pentingnya kerjasama/kolaborasi antar disiplin ilmu maupun sektor,
- c. Tercipta mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi partisipasi dan aksi masyarakat,
- d. Dukungan dan penegakan aspek legal, dan perlu diwujudkan pasar pelestarian untuk menunjang kesinambungan pengelolaan.

Dalam penyusunan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia disepakati bahwa pelestarian adalah upaya pengelolaan perubahan secara selektif melalui kegiatan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan/atau pengembangan pusaka saujana untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman, kualitas hidup yang lebih baik serta menciptakan pusaka masa datang (Draft Kaliurang, 3 Oktober 2003).

Dalam pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya menurut Adishakti (2000) berbagai benturan sering terjadi dan diperlukan kemampuan publik dalam melindunginya, seperti berikut:

1. Benturan-benturan ini merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang selalu tumbuh dan berkembang sepanjang jaman.
2. Keberhasilan upaya pelestarian terletak pada kemampuan publik dalam memperdulikan aset yang dimilikinya.

Agenda aksi pelestarian benda cagar budaya (Draft Kaliurang, Oktober, 2003), adalah:

1. Melakukan tindakan aktif perlindungan.
2. Melakukan inventarisasi, dokumentasi, klasifikasi yang sistematis dan komprehensif.
3. Meningkatkan kesadaran publik.
4. Meningkatkan upaya-upaya pelestarian secara efektif dan sinergis.
5. Memperkuat penegakan hukum dan kontrol masyarakat untuk perbaikan.
6. Melakukan upaya pendampingan bagi masyarakat untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pelestarian benda cagar budaya bukan tidak mempunyai permasalahan yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Menurut Bappeko (2003:47) permasalahan pokok dalam pelestarian artefak dan benda cagar budaya di pulau Penyengat adalah:

1. Penanganan fisik, dalam arti pemeliharaan dan perbaikan.
2. Pembiayaan, untuk penanganan fisik benda cagar budaya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit,
3. Relokasi penduduk untuk tidak menghuni di dekat atau di atas benda cagar budaya.

Selanjutnya menurut Bappeko (2003:III-2) konsep pengembangan benda cagar budaya memuat tiga konsep pengembangan, yaitu:

1. Konsep pengembangan daya tarik artefak, bertujuan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang sejarah dan budaya Melayu,
2. Konsep pengembangan daya tarik baru, agar masyarakat tertarik untuk berkunjung dan memperpanjang *length of stay*,
3. Konsep pemanfaatan bagi masyarakat, agar masyarakat mendapatkan manfaat dan nilai tambah.

2.3 Masyarakat

Masyarakat menurut Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Koentjaraningrat (1978) mengatakan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh rasa identitas bersama.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang merupakan bagian dari keluarga yang bertempat tinggal di suatu daerah dimana masing-masing individu saling berinteraksi dan mempunyai kepentingan untuk mengembangkan hidup bersama dengan norma-norma dan adat istiadat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan jenis tempat tinggal, masyarakat dapat dibagi menjadi dua yaitu masyarakat kota dan desa. Masyarakat kota adalah orang-orang yang bermukim dan bertempat tinggal di daerah perkotaan. Sementara itu masyarakat desa adalah orang-orang yang bermukim dan bertempat tinggal di daerah pedesaan.

Di samping pengelompokan masyarakat dalam kategori masyarakat kota dan desa, ada bentuk masyarakat lainnya yaitu masyarakat setempat. Soerjono Soekanto (1983) mengatakan masyarakat setempat merupakan suatu kelompok hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa mereka dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama.

Selo Soemardjan mengatakan bahwa masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya dibandingkan dengan penduduk di luar wilayahnya.

Berdasarkan pengertian tentang masyarakat setempat, ada 4 (empat) kriteria yang saling berpautan, yaitu:

- a. Jumlah penduduk,
- b. Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman,
- c. Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat,
- d. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan.

2.4 Ringkasan Kajian Teori

Dari kajian teori yang telah dilakukan, dapat disintesis menjadi beberapa kajian seperti pada tabel berikut ini.

**TABEL II.2
SINTESA TEORI**

KAJIAN TEORI	SINTESA ISI TEORI	MANFAAT
Pemanfaatan benda cagar budaya; - UU Nomor 5 Thn 1992 - PP Nomor 10 Thn 1993 - Adishakti Thn 2000 - Mendubpar - Draft Kaliurang, 2003 - Bappeko Tanjungpinang, 2003	- Menemukenali sejarah - Pengembangan ilmu Pengetahuan - Memajukan perekonomian - Mengetahui latar belakang sosial budaya masyarakat sekitar benda cagar budaya - Meningkatkan perekonomian masyarakat setempat	- Memberikan arahan untuk program pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan benda cagar budaya - Memberi gambaran tentang aksi tindak dalam pemanfaatan benda cagar budaya
Pengertian Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat; - Britha, 2003 - Adishakti, 2003 - Disbudpar. 2002 - Hall, 1986	- Kesadaran terhadap nilai- nilai seni dan bu-daya - Keterlibatan secara sukarela pada benda budaya dilingkungannya - Kesadaran untuk menanggapi pembangunan diri dan kehidupannya - Keinginan melestarikan benda budaya - Sikap mengutamakan sesuatu - Manusia terikat pada budaya yang sama	- Memberi pengertian umum mengenai sikap dan perilaku masyarakat terhadap benda budaya - Berguna untuk analisis studi
Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat - Disbudpar 2003 - Adishakti 2000 - Bappeko Tanjungpinang thn 2003 - Soekanto, 1983 - Koencoroningrat, 1978	- Pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap benda cagar budaya - Perilaku untuk melestarikan benda cagar budaya - Partisipasi masyarakat melestarikan benda cagar budaya	- Memberi arahan tentang komponen penting bagi pemberdayaan masyarakat - Sumber masukan bagi pertimbangan dalam melibatkan masyarakat melestarikan benda cagar budaya
Bentuk dan tingkat partisipasi - Slamet, 2004	- Partisipasi dalam perencanaan pembangunan	- Memberi arahan dalam melihat bentuk dan tingkat partisipasi

Lanjutan Tabel II.2

KAJIAN TEORI	SINTESA ISI TEORI	MANFAAT
<ul style="list-style-type: none"> - Britha, 2003 - Panudju, 1999 - Evrizal, 2004 	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan - Partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan - Partisipasi berdasarkan tingkat intensitas dan frekuensi kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> masyarakat - Sumber masukan dalam menganalisis penelitian

Sumber : Sintesa Penulis, 2005.

2.5 Variabel Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dilakukan, maka selanjutnya ditentukan variabel penelitian yang akan digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan penelitian. Adapun variabel yang diambil adalah seperti pada tabel II.3.

TABEL II. 3
KAJIAN DAN VARIABEL PENELITIAN

KAJIAN PENELITIAN	SUBSTANSI KAJIAN	VARIABEL PENELITIAN
Partisipasi Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Matheos ▪ Britha, 2003 ▪ PBB (dalam Slamet, 1994) ▪ Hall, 1986 ▪ Wibisana, 1989 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Upaya membuat peka pihak masyarakat untuk meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan ▪ Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka ▪ Keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program. ▪ Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan yang berbeda: (a) dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skala peran serta ▪ Tipe partisipasi ▪ Bentuk partisipasi ▪ Tingkat partisipasi ▪ Faktor pengaruh

Lanjutan Tabel II.3

KAJIAN PENELITIAN	SUBSTANSI KAJIAN	VARIABEL PENELITIAN
	<p>untuk mencapai tujuan tersebut, (b) pelaksanaan program dan proyek secara sukarela, dan (c) pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu maupun komunal. 	
<p>Skala peran serta</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chapin dan Goldhamer (dalam Slamet, 1994) 	<p>Tingkat peran serta yang dilakukan individu dalam kegiatan bersama</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan ▪ Keaktifan anggota kelompok dalam berdiskusi ▪ Keterlibatan anggota dalam kegiatan fisik ▪ Kesiediaan memberi iuran rutin atau sumbangan berbentuk uang yang telah ditetapkan
<p>Klasifikasi tipe partisipasi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Slamet, 1994. 	<p>Pengklasifikasian implementasi partisipasi masyarakat dalam tahapan pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Derajat kesukarelaan ▪ Cara keterlibatan ▪ Keterlibatan dalam tahap proses pembangunan ▪ Tingkatan organisasi ▪ Intensitas dan frekuensi kegiatan ▪ Lingkup kegiatan ▪ Efektivitas ▪ Aktor terlibat ▪ Gaya partisipasi
<p>Bentuk Partisipasi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evrizal, 2004 ▪ Slamet, 1994 	<p>Bentuk/wujud partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan tahapan pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam proses perencanaan ▪ Dalam pelaksanaan proyek
<p>Tingkat Partisipasi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arstein (dalam Panudju, 1999) 	<p>Penilaian tingkatan partisipasi masyarakat yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. <i>Manipulation</i> atau manipulasi b. <i>Therapy</i> atau <i>penyembuhan</i> c. <i>Informing</i> atau pemberian informasi d. <i>Consultation</i> atau konsultasi e. <i>Placation</i> atau <i>perujukan</i> f. <i>Partnership</i> atau kemitraan g. <i>Delegated power</i> atau pelimpahan kekuasaan h. <i>Citizen control</i> atau <i>masyarakat yang mengontrol</i>
<p>Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat</p>	<p>Faktor dari dalam diri masyarakat (internal) yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis kelamin ▪ Umur ▪ Pendidikan ▪ Pekerjaan ▪ Agama

Lanjutan Tabel II.3

KAJIAN PENELITIAN	SUBSTANSI KAJIAN	VARIABEL PENELITIAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slamet, 1994 ▪ Soekanto, 1982 ▪ Turner (dalam Panudju, 1999) ▪ Bierens den Haan (dalam Susanto, 1999) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah asal (etnis) ▪ Lama tinggal pada suatu tempat.
<p>Pelestarian Benda Cagar Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Draft Kaliurang, 3 Oktober 2003. ▪ Adishakti, 2003. ▪ Soekanto, 1982. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelestarian benda cagar budaya berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan benda cagar budaya tersebut yang pada akhirnya ditujukan demi menarik minat wisatawan guna berkunjung ke daerah tempat benda cagar budaya tersebut berada. ▪ Adishakti (2003b: 1-2) Beberapa prinsip penting dalam proses pelestarian kebudayaan nasional Indonesia adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat sebagai pusat pengelolaan (<i>people-centered management</i>), b. Pentingnya kerjasama/kolaborasi antar disiplin ilmu maupun sektor, c. Tercipta mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi partisipasi dan aksi masyarakat, d. Dukungan dan penegakan aspek legal, dan perlu diwujudkan pasar pelestarian untuk menunjang kesinambungan pengelolaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cara pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya ▪ Peran stakeholder dalam pelestarian benda cagar budaya

Sumber : Identifikasi Peneliti, 2005

BAB III

GAMBARAN UMUM PULAU PENYENGAT

3.1 Letak Geografis dan Keadaan Alam

Pulau Penyengat merupakan sebuah pulau yang terletak di wilayah administratif Kota Tanjungpinang. Pulau penyengat merupakan wilayah pintu gerbang untuk masuk ke Kota Tanjungpinang, dan dalam sistem pemerintahan kota pulau ini adalah sebuah kelurahan yaitu Kelurahan Penyengat yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota.

Pulau Penyengat merupakan sebuah pulau kecil yang memiliki luas daratan kurang lebih 3,5 km². Lokasinya terletak disebelah Barat Kota Tanjungpinang dengan jarak sekitar 1,5 Km, dan dapat ditempuh dengan menggunakan pompong (perahu motor) selama 15 menit. Pulau Penyengat terletak pada jalur transportasi Tanjungpinang – Kota Batam, Singapura, dan Johor (Malaysia). Berdasarkan lokasi ini maka Pulau Penyengat sangat strategis dan mudah dicapai dari arah manapun dengan sarana transportasi laut. Guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, penduduk pulau ini sering melakukan perjalanan ke Tanjungpinang, misalnya untuk bekerja, berbelanja, mengunjungi keluarga di Kota Tanjungpinang, dan keperluan lainnya.

Lokasi yang strategis dan mudah dicapai ini akan menunjang dalam pengembangan Pulau Penyengat sebagai cagar budaya Melayu sekaligus sebagai salah satu daerah tujuan wisata sejarah dan budaya di Kota Tanjungpinang.

Secara umum topografi Pulau Penyengat bervariasi, yaitu dataran rendah sekitar 80 % dan sisanya sebesar 20 % berupa bukit-bukit. Titik tertinggi terdapat di Kampung Jambat dan Kampung Bulang sekitar 50 meter di atas permukaan laut.

Dilihat dari struktur geologinya, kondisi tanah di Pulau Penyengat didominasi oleh pasir bercampur kerikil, sedangkan pantainya tergolong landai, berlumpur dan diselingi dengan batu karang. Jenis tanahnya mengandung organosol, podsol, podsolik merah kuning, litosol dan latosol, serta tanah dasarnya kebanyakan berupa bahan granit. Sedangkan suhu udara sekitar 18-27 °C di Pulau Penyengat dan kelembaban udara rata-rata antara 61-90 %. Selain itu terdapat dua musim, yaitu kemarau pada bulan Juli dan Agustus dan hujan Oktober sampai dengan Juni.

3.2 Struktur Penduduk

Jumlah penduduk di Pulau Penyengat berdasarkan data terakhir dari kantor Lurah Penyengat Desember 2003 berjumlah 2.215 jiwa. Penduduk ini tersebar di berbagai kampung dan Rukun Warga (RW) yang ada di pulau ini. Jumlah penduduk terbesar terdapat di RW 3, yaitu sebesar 505 jiwa dan penduduk terkecil terdapat di RW 2 sebanyak 309 jiwa. Keseluruhan jumlah penduduk ini terbagi ke dalam sekitar 600 Kepala Keluarga (KK). Rata-rata KK mempunyai dua orang anak yang menandakan program Keluarga Berencana cukup diminati oleh penduduk.

Pulau Penyengat merupakan pulau yang terbuka bagi pendatang tetapi mayoritas penduduk Pulau Penyengat merupakan penduduk asli yang berasal dari suku bangsa Melayu. Selain itu juga terdapat penduduk suku bangsa lainnya yang

merupakan keturunan dan pendatang dari berbagai suku bangsa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat komposisi penduduk pada tabel III.1 di bawah ini.

Tabel III.1
Komposisi Penduduk

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH (jiwa)
1	Penduduk asli (Melayu)	1962
2	Keturunan (campuran)	119
3	Pendatang	134
JUMLAH		2215

Sumber : Kantor Lurah Penyengat, 2003

3.3 Ekonomi

Aktivitas perekonomian masyarakat Pulau Penyengat sangat beragam. Perbedaan jenis mata pencaharian ini dipengaruhi oleh keadaan alam yang ada dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan jenis mata pencaharian penduduk yang utama adalah nelayan, PNS/ABRI, pegawai swasta, pertanian, wiraswasta, perdagangan, buruh, dan sektor informal. Secara umum tingkat perekonomian masyarakat Pulau Penyengat termasuk baik, dan mayoritas penduduk usia produktif memiliki pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keinginannya.

Mata pencaharian sebagai nelayan merupakan ciri kehidupan ekonomi masyarakat Melayu. Pekerjaan sebagai nelayan merupakan warisan turun-temurun dan tetap dipertahankan oleh masyarakat Melayu sampai sekarang. Hasil yang diperoleh dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari serta memenuhi kebutuhan lainnya. Selain bekerja di bidang perikanan (nelayan),

banyak masyarakat Melayu yang bekerja di bidang pertanian, berdagang, dan jasa dan transportasi laut juga para pendatang dari suku bangsa Jawa dan Bugis.

Faktor yang dapat dipakai sebagai indikator perkembangan ekonomi suatu daerah dan masyarakatnya adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang perekonomian seperti pusat perbelanjaan (pasar), pusat hiburan, hotel, restoran, dan sebagainya. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kemudahan aksesibilitas, transportasi yang memadai, serta ketersediaan media komunikasi. Tingkat keberhasilan ekonomi anggota masyarakat juga merupakan salah satu indikator majunya perekonomian, dan saat ini perekonomian masyarakat relatif maju. Perekonomian yang maju terlihat dari terpenuhinya kebutuhan sekunder, seperti kepemilikan mobil, radio, TV, dan sepeda motor.

3.4 Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat di Pulau Penyengat saat ini diatur oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pranata-pranata sosial lainnya yang menuju ke arah pembauran masyarakat modern. Pranata sosial itu berupa kelompok sosial kemasyarakatan, organisasi sosial, dan sistem pelapisan sosial. Lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial ini mempersatukan semua anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa agar dapat hidup bersama dan bertoleransi.

Pada umumnya agama yang dipeluk oleh masyarakat yaitu Agama Islam, selain itu ajaran agama lain yang dipeluk oleh masyarakat di Pulau Penyengat

adalah Agama Hindu, Budha dan Kristen. Sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama yang perlu tetap dijaga dan terjalin dengan baik dan saling bertoleransi.

Kegiatan kemasyarakatan dilakukan oleh masyarakat dengan cara bergotong-royong bersama. Sistem gotong-royong ini merupakan salah satu tradisi budaya yang masih dipertahankan dan tetap terjaga dengan baik. Musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama juga terlihat pada saat diadakan pertemuan antar warga di RT, RW, dan lingkungan tempat tinggal lainnya. Kegiatan organisasi sosial juga berjalan dengan baik dan dinamis karena menerapkan azas kepentingan bersama. Pada acara-acara tertentu misalnya perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia, mereka berpartisipasi dengan menampilkan kesenian tradisionalnya untuk dinikmati oleh anggota masyarakat suku bangsa lainnya.

Kebudayaan Melayu identik dengan Kerajaan Malaka dan bahasa Melayu berkembang pesat sebagai bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi hubungan perniagaan. Selain itu, agama Islam yang sudah menjadi agama resmi orang Melayu merupakan sendi dasar kebudayaan Melayu yang membentuk unsur-unsur kebudayaan Melayu lainnya seperti adat istiadat dan nilai-nilai di dalam kehidupan.

Pulau Penyengat ditetapkan sebagai pusat pemerintahan, pusat kebudayaan dan adat istiadat karena adanya tradisi, nilai-nilai budaya, dan Agama Islam yang sangat berperan didalam perkembangan Pulau Penyengat. Bahasa Melayu digunakan dalam kehidupan sehari-hari sedangkan Agama Islam yang telah lama menjiwai kebudayaan Melayu menjadi ukuran, nilai-nilai, ketentuan-

ketentuan yang menyelaraskan tindakan-tindakan atau perilaku penduduk setiap hari. Sehingga terkenal istilah "adat bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah (Al Quranil Azim)", hal ini terkait dengan adanya tiga prinsip pokok dalam kehidupan masyarakat Melayu yaitu berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu, dan beragama Islam.

3.5 Aspek Kesejarahan

Pulau Penyengat merupakan desa yang berada di sebelah Barat Kota Tanjungpinang, tepatnya di Kecamatan Tanjungpinang Kota. Pulau ini menyimpan kekayaan budaya dan peninggalan sejarah serta kekayaan alam seperti keindahan pantai dan bukit-bukitnya.

Dahulu, pulau yang berhadapan dengan muara Sungai Riau ini menjadi tempat pemberhentian para pelaut yang lewat di kawasan ini, terutama untuk mengambil air tawar. Konon, para pelaut yang sedang mengambil air tawar tersebut diserang oleh sejenis lebah yang disebut penyengat. Akibat serangan lebah tersebut jatuh korban jiwa dari pihak pelaut tersebut. Kemudian serangga-serangga tersebut dianggap sakti oleh para pelaut. Sejak saat itulah pulau ini dinamakan Pulau Penyengat Indra Sakti, dan selanjutnya lebih dikenal sebagai Pulau Penyengat sampai sekarang. Ketika pusat pemerintahan Kerajaan Riau bertempat di Pulau ini, tempat ini diresmikan dengan nama "**Pulau Penyengat Indra Sakti**".

Banyak bangunan bersejarah, terutama peninggalan abad ke-19 yang menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan dan agama pada masa tersebut yang sudah tidak utuh lagi dan beberapa hanya tinggal puing-puingnya saja. Namun

masih ada bangunan bersejarah yang masih utuh dan difungsikan sampai sekarang seperti Istana Marhum Kantor dan Masjid Agung Sultan Riau. Selain itu masih terdapat istana, makam dan benteng yang keberadaannya kurang terawat dengan baik.

Karena letaknya yang cukup strategis bagi pertahanan Kerajaan Riau yang berpusat di Hulu Sungai (Riau Lama), Pulau Penyengat dijadikan pusat kendali dan pertahanan utama. Pulau ini berkali-kali menjadi medan pertempuran, bahkan ketika terjadi perang antara Riau dengan Belanda (1782-1784), yang waktu itu dipimpin oleh Raja Haji Yang Dipertuan Muda Riau IV (Raja Haji Syahid Fisabilillah Marhum Teluk Ketapang). Raja tersebut mendirikan benteng pertahanan Kerajaan Riau di Pulau Penyengat, dimana benteng-benteng yang dibuat menggunakan sistem pertahanan gaya Portugis yang telah dikembangkan. Benteng-benteng yang tersisa yang dapat kita lihat sisanya saat ini adalah benteng yang berada di Bukit Penggawa, Bukit Tengah, dan Bukit Kursi. Benteng-benteng tersebut dilengkapi dengan meriam-meriam dalam berbagai ukuran dan parit-parit sebagai tempat pertahanan dan persembunyian.

Pada tahun 1803, Pulau Penyengat telah berkembang dari pusat pertahanan menjadi sebuah kerajaan, yang dijadikan mahar (mas kawin) oleh Baginda Raja Sultan Mahmud kepada Raja Hamidah atau Engku Putri, anak dari Raja Haji Fisabilillah atau Marhum Teluk Ketapang. Selanjutnya Pulau Penyengat menjadi tempat kediaman resmi Yang Dipertuan Muda Kerajaan Riau Lingga, sementara Sultan (Yang Dipertuan Besar) berkedudukan di Daik-Lingga.

Sultan Riau Lingga terakhir, Abdul Rahman Muazam Syah, memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Riau ke Pulau Penyengat pada tahun 1900. Sejak itulah Pulau Penyengat mempunyai peranan penting sebagai pusat pemerintahan, adat istiadat, pengembangan Agama Islam, dan kebudayaan Melayu. Akan tetapi ketika Sultan Abdul Rahman Muazam Syah mengungsi ke Singapura karena tidak bersedia menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menghilangkan hak dan kekuasaan raja dan pembesar-pembesar tradisional Kesultanan Riau, Pulau Penyengat mengalami kemunduran sehingga untuk menghindari perampasan oleh pihak Belanda maka bangunan-bangunan yang ada diruntuhkan, tanah kosong yang ada ditanami agar tidak dibangun, dan menghancurkan apa saja yang akan dirampas oleh Belanda.

Meskipun Kesultanan Riau-Lingga belum 100 tahunan berakhir, sisa-sisa keagungan dan kebesarannya dapat dikatakan sudah pupus sama sekali dan tinggal puing-puingnya saja. Diantara puing-puing tersebut, masih terdapat beberapa peninggalan sebagai bukti sejarah kebesaran kekuasaan Sultan Riau pada masa lampau, yaitu:

1. Masjid Agung Sultan Riau yang masih terawat dengan baik;
2. Empat buah kompleks makam raja;
3. Dua buah bekas istana dan beberapa buah gedung lama; dan
4. Benteng pertahanan, sumur dan taman.

3.6. Aspek Benda Cagar Budaya

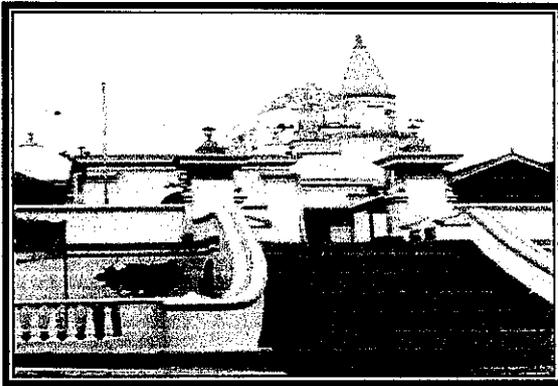
Potensi benda cagar budaya di Pulau Penyengat menjadi salah satu tujuan wisata sejarah dan budaya. Obyek wisata budaya merupakan sumberdaya budaya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai obyek dan daya tarik wisata, sehingga orang akan tertarik untuk melakukan perjalanan wisata. Oleh karena itu seni dan budaya serta tata cara hidup yang unik dan khas perlu dipertahankan dan dikembangkan, selain itu menjadi daya tarik tersendiri juga sebagai kebanggaan dan jati diri bangsa.

Permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah kondisi lingkungan sekitar dan fisik benda cagar budaya tersebut sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi karena penambahan jumlah penduduk tinggi sehingga kebutuhan perumahan juga tinggi, karena itu terjadi konflik pemanfaatan lahan. Akibat yang dapat kita lihat adalah area benda cagar budaya (situs) menjadi semakin sempit, bahkan ada kecenderungan masyarakat mendirikan bangunan di atas areal benda cagar budaya yang hanya tinggal puing-puingnya saja.

Di samping semakin padatnya pemukiman penduduk, pemeliharaan benda cagar budaya di Pulau Penyengat sangat tergantung kepada kepedulian Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga sangat dirasakan kurangnya perawatan dan pemeliharaan warisan budaya yang sangat berharga ini. Walaupun masyarakat setempat peduli terhadap pelestariannya, namun tidak secara optimal mengingat mahalnya biaya perawatan dan pusat perhatian mereka terfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha pelestarian yang dilakukan masyarakat terhadap benda bersejarah ini sangat kurang bahkan tidak peduli lagi, karena

tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaktahuan cara merawat dan memelihara benda cagar budaya tersebut. Benda cagar budaya yang saat ini masih terdapat di Pulau Penyengat adalah:

1. Masjid Raya Sultan Riau



Sumber: Masterplan, 2003

**GAMBAR 3.1
MASJID RAYA SULTAN RIAU**

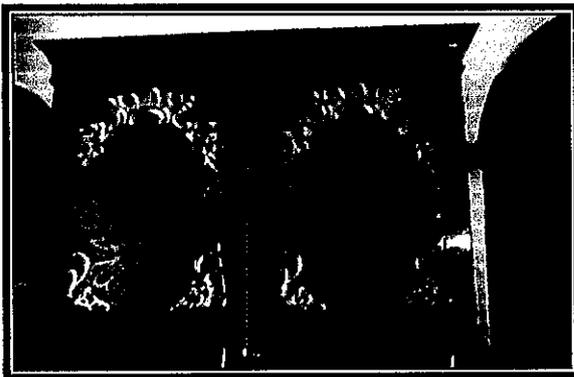
Didirikan pada tanggal 1 Syawal 1249 H (1832 M) atas prakarsa Yang Dipertuan Muda ke-IV, Raja Abdurrahman (Marhum Kampung Bulang). Masjid ini panjangnya 19,8 meter dan lebar 18 meter ditopang oleh 4 buah tiang beton. Terdapat 17 buah

menara dan kubah atau dapat diartikan sebanyak rakaat shalat fardlu (shalat wajib bagi umat Islam) selama sehari semalam.

Luas keseluruhannya adalah 54,4 m x 23,2 m dengan tembok mengelilingi bangunan masjid setinggi 7 hasta dan tiga pintu gerbang masuk yang terdapat di samping kiri, kanan serta satu lagi di muka dengan 13 buah anak tangga. Keunikan masjid tersebut adalah terbuat dari campuran tanah liat, kapur, dan putih telur sebagai penguat untuk dinding / tembok. Dari masjid ini melahirkan tokoh-tokoh agama, penyair, dan pengarang. Salah satunya adalah Raja Ali Haji, yang terkenal sebagai pengubah soneta dan Gurindam XII. Masjid Agung Sultan Riau sampai saat ini masih dipergunakan sebagai tempat shalat penduduk di Pulau Penyengat. Saat ini masjid tetap digunakan masyarakat sebagai

tempat ibadah sehingga bangunan masjid tetap terawat dan terpelihara. Di sekitar masjid terdapat pemukiman asli Melayu yang mayoritas penduduknya asli walaupun terdapat suku bangsa lainnya seperti Cina atau Jawa. Untuk tetap menjaga kelestarian dan terpeliharanya Masjid ini maka pemerintah menetapkan sebagai benda cagar budaya dengan Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata no 9 tahun 2003.

2. Perpustakaan Kuno Khutub Khana Yamtuan Ahmady



Sumber: : *Masterplan, 2003*

GAMBAR 3.2
PERPUSTAKAAN KUNO KHUTUB
KHANA YAMTUAN AHMADY

Khutub Khana Yamtuan Ahmady merupakan kumpulan kitab-kitab perpustakaan Yang Dipertuan Muda Riau X Raja Muhammad Yusuf Ahmady, yang terdiri dari kitab-kitab ushuluddin, fiqih, tasyawuf, tafsir, tarikh, kitab-kitab yang dibeli dari Mesir, Arab, India, sekitar tahun 1883

yang sampai sekarang masih tersimpan di Masjid Pulau Penyengat. Kitab-kitab ini jarang digunakan mengingat umur kitab yang sudah kuno sehingga keawetannya akan tetap terjaga dan dapat terus dilestarikan pada masa datang.

3. Bekas Gedung Engku Haji Daud (Tabib Kerajaan)



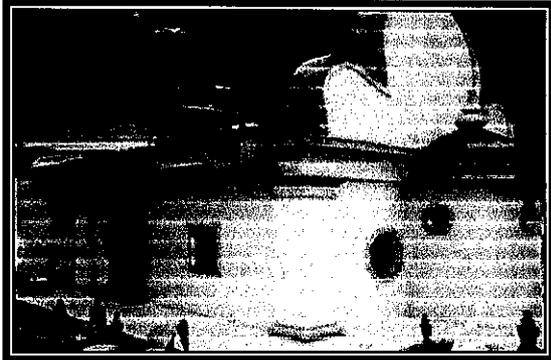
Sumber: : Survey, 2005

**GAMBAR 3.3
BEKAS GEDUNG ENSKU HAJI
DAUD (TABIB KERAJAAN)**

Gedung Tabib adalah kediaman Raja Haji Daud yang dikenal sebagai tabib kerajaan. Puing-puing bangunan ini bertingkat dan hanya tersisa ke empat dindingnya yang ditumbuhi pohon ara. Raja Haji Daud adalah seorang tabib yang mengarang kitab-kitab pengobatan tradisional dan kitab

perbintangan atau zodiak dalam bentuk syair. Meskipun sisa gedung Haji Daud ini hanya berupa empat bidang tembok dengan beberapa buah rangka pintu dan jendela dan kondisi yang tidak terawat terlihat dari tumbuhnya semak belukar disekitarnya, tetapi karena bangunan ini merupakan bentuk peninggalan abad ke-19 dan letaknya di tengah-tengah pemukiman, maka bekas gedung ini banyak menarik perhatian pengunjung. Untuk pemeliharannya dibutuhkan keikutsertaan warga dan peran aktif pemerintah.

4. Makam Engku Putri



Sumber: : Survey, 2005

GAMBAR 3.4
MAKAM ENGKU PUTRI

Engku Putri meninggal dunia di Pulau Penyengat pada bulan Juli 1844. Makam ini merupakan sebuah kompleks yang diberi pagar tembok dan di dalamnya terdapat beberapa makam lainnya, seperti makam Raja Haji Abdullah Yang Dipertuan Muda IX atau Raja Ali Haji yang terkenal

dengan karyanya “Gurindam Dua Belas”, makam Raja Ahmad serta makam-makam kerabat kerajaan lainnya. Engku Putri / Raja Hamidah adalah anak Raja Haji Fisabilillah atau Yang Dipertuan Muda Riau IV, beliau merupakan permaisuri Sultan Mahmud Syah 3 dan pemegang Regalia Kerajaan Riau Lingga Johor dan Pahang. Dalam adat istiadat Engku Putri merupakan tokoh kunci yang meligitimasi pengangkatan seorang Sultan. Perkawinannya dengan Sultan Mahmud Syah 3 merupakan simbol pemersatu bagi pihak yang bercanggah akibat praktek pecah belah oleh pihak Belanda pada masa perang Riau - Belanda pada tahun 1782 – 1784. Saat ini makam masih tetap dikunjungi oleh penduduk sekitar yang berziarah ataupun wisatawan dari luar negeri, sehingga kondisinya terawat dan terpelihara. Makam ini terletak diantara pemukiman penduduk yang tetap merawat dan menjaga makam tersebut. Pihak pemerintah juga menetapkan Makam Engku Putri sebagai benda cagar budaya dengan Kepmen Kebudayaan

dan Pariwisata No. KM 14/PW.007/KKP/2004 untuk menjaga dan melestarikannya.

5. Makam Raja Haji Fisabilillah



Sumber: Survey, 2005

GAMBAR 3.5
MAKAM RAJA HAJI FISABILILLAH

Makam Raja Haji Fisabilillah (Marhum Teluk Ketapang) adalah Yang Dipertuan Muda Riau Lingga Johor dan Pahang ke IV terletak di Bukit Bahjah. Beliau adalah tokoh dan pahlawan Melayu terkemuka juga sebagai Pahlawan Nasional, karena

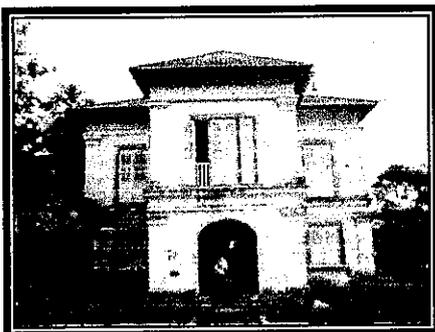
nilai-nilai perjuangannya mengangkat harkat dan martabat bangsanya dan menjadi raja pada tahun 1777-1784. Raja Haji mangkat pada tahun 1784 di Teluk Ketapang (Malaysia) ketika melakukan penyerangan terhadap pusat kedudukan kompeni Belanda (eskador Jacob van Braam), dan dikebumikan di Malaka. Pada masa pemerintahan anaknya Raja Jaafar Yang Dipertuan Muda VI, pusara Raja Haji dipindahkan ke Pulau Penyengat. Makam Raja Haji ini dipugar pada tahun 1972 oleh Pemda Tk. II Kepulauan Riau, kemudian direnovasi kembali pada tahun 1986. Walau makam ini terletak jauh dari pemukiman penduduk tetapi kondisinya masih terawat dan terpelihara dengan baik karena selalu dikunjungi atau diziarahi oleh berbagai suku bangsa baik penduduk lokal atau turis mancanegara. Pemerintah menetapkan sebagai benda cagar budaya dengan

Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata no KM 14/PW.007/KKP/2004 agar makam tersebut tetap terpelihara dan terawat.

6. **Bekas Istana Sultan Abdul Rahman Muazam Syah**

Sisa bangunan istana 'Kedaton' Sultan Riau-Lingga yang terakhir ini sudah tidak ada lagi bekas-bekasnya. Istana Sultan Abdul Rahman Muazam Syah di Pulau Penyengat yang bentuk dan besarnya bersamaan dengan Gedung Daerah Tanjungpinang ini, hanya tinggal alun-alun yang disebut "padang semen" dan sepotong "balai" tempat musik kerajaan (*Nobat* dan *Band*) dimainkan dalam upacara-upacara resmi. Di tengah puing-puing dimana pada zaman dahulu berdiri dengan megahnya sebuah istana, kini telah dipenuhi oleh pohon-pohonan, sedangkan sebagian dari alun-alun sudah menjadi pekarangan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pulau Penyengat. Sultan Abdul Rahman Muazam Syah merupakan Sultan terakhir kerajaan Riau-lingga yang dimusuhi oleh Belanda, karena sikap pembangkangannya dan anti terhadap Belanda, dimana Sultan Abdul Rahman Muazam Syah memerintah selama tahun 1886–1911.

7. **Bekas Gedung Tengku Bilik**



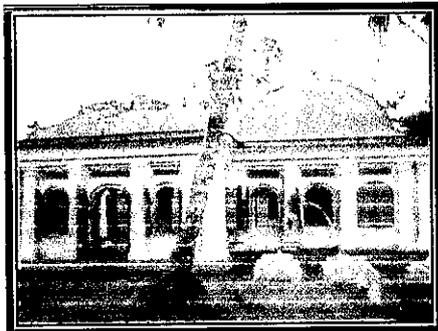
Sumber: : Survey, 2005

**GAMBAR 3.6
BEKAS GEDUNG
TENGGU BILIK**

Pemilik gedung ini adalah Tengku Bilik yang merupakan adik Sultan Riau-Lingga terakhir, yaitu Sultan Abdul Rahman Muazam Syah yang bersuamikan Tengku Abdul Kadir, seorang arsitek atau salah seorang intelektual semasa hidupnya. Luas bangunan ini hampir seluas lapangan sepak

bola. Para bangsawan Melayu pada akhir abad ke-19 sangat menyukai bentuk atau model bangunan tersebut, yaitu bangunan yang bergaya Eropa yang dikelilingi tembok setinggi 2 meter dengan pagar berkisi-kisi pada bagian depan. Pada tahun 1997 bangunan ini dipugar oleh bidang PSK Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tk. I Riau. Walaupun dekat dengan pemukiman penduduk tetapi kondisinya kurang terawat yang terlihat dari banyaknya semak belukar dan tampak kusam. Pihak pemerintah telah menetapkan gedung ini sebagai benda cagar budaya dengan Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata no KM 14/PW.007/KKP/2004.

8. Makam Raja Ja'afar



Sumber: Survey, 2005

**GAMBAR 3.7
MAKAM RAJA JA'AFAR**

Komplek makam Raja Ja'afar termasuk salah satu bangunan indah dengan pilar, kubah kecil yang dilengkapi dengan ukiran timbul, kolam air tempat untuk berwudlu dan hiasan-hiasan lain yang megah. Bangunan ini nyaris hancur jika tidak segera diperbaiki oleh pemerintah. Pemerintah

menyelenggarakan pemugaran kompleks makam Raja Ja'afar dan Raja Ali pada tahun 1983–1984. Raja Jaafar adalah Yang Dipertuan Muda Riau-Lingga Johor dan Pahang ke VI, yang memerintah pada tahun 1806–1832. Masa pemerintahannya adalah periode sulit bagi Riau karena berada di tengah-tengah transisi perebutan negara Inggris-Belanda. Raja Ja'afar berpulang ke Rahmatullah di Daik-Lingga, jenazahnya kemudian dibawa dan dimakamkan di Pulau

Penyengat. Berdampingan dengan pusara Raja Ja'afar dalam satu dewal yang sama, dimakamkan pula jasad Raja Ali Yang Dipertuan Muda ke V3 yang terkenal dengan sebutan "Marhum Kantor". Raja Ali memerintah tahun 1844–1857. Pada masa pemerintahannya banyak mendatangkan ulama dari berbagai penjuru. Amalan Thariqat Naksyahbandy berkembang dan dapat diterima oleh penduduk Pulau Penyengat. Sedangkan untuk bangunan masjid kecil tempat komplek makam Raja Ali dan Raja Ja'afar ini dipercaya sebagai tempat khusus pelaksanaan ritual amalan-amalan khusus Thariqat tokoh-tokoh tersebut. Kedua tokoh tersebut (Raja Ja'afar dan Raja Ali) merupakan tokoh yang kuat dalam menjalankan syariat Islam. Komplek makam ini telah dipugar pada tahun 1983–1984 oleh bidang PSK Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Tk. I Riau. Kondisi makam ini terlihat terawat dan terpelihara dengan baik karena sering dikunjungi oleh wisatawan yang berziarah baik dari mancanegara atau lokal. Letaknya dekat dengan bekas Gedung Tengku Bilik dan pemukiman penduduk. Pihak pemerintah telah menetapkan sebagai benda cagar budaya dengan Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata no KM 14/PW.007/KKP/2004.

9. Bekas Istana Raja Ali Marhum Kantor



Sumber: : Survey, 2005

GAMBAR 3.8
BEKAS ISTANA RAJA ALI MARHUM
KANTOR

Komplek bekas istana Marhum Kantor sebesar lapangan sepak bola atau sekitar lebih dari satu hektar. Pada tahun 1987 bangunan ini dipugar oleh bidang PSK Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tk. I Riau. Komplek istana

ini disebut Istana Kantor karena kental sekali dengan gelar pusthomus Raja Ali dengan Marhum Kantor. Raja Ali menjadikan Kantor ini sebagai bagian dari Istana kediamannya dan tempat pengelolaan administrasi pemerintahannya. Di samping sebagai pengendali negeri Raja Ali Marhum Kantor juga sebagai seorang pengarang, dan salah satu hasil karyanya adalah berupa Syair Nasihat. Kondisi dari bekas Istana ini terawat dan terpelihara, tidak tumbuh rumput liar disekitarnya serta visualisasi bangunan tampak menarik. Lokasi yang jauh dari pemukiman tidak berpengaruh terhadap pemeliharaan dan perawatan bangunan tersebut karena terdapatnya petugas khusus yang menjaga dan merawat. Pihak pemerintah telah menetapkan sebagai benda cagar budaya dengan Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata no KM 14/PW.007/KKP/2004.

10. Istana Bahjah (Istana Raja Ali Kelana)



Sumber: : Survey, 2005

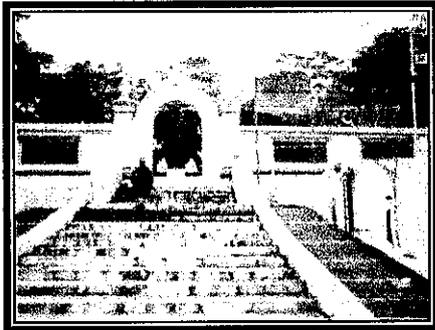
GAMBAR 3.9
ISTANA BAHJAH (ISTANA
RAJA ALI KELANA)

Bangunan yang disebut dengan Istana Bukit Bahjah atau merupakan kediaman Raja Ali Kelana. Gelar Kelana adalah sebagai calon Yang Dipertuan Muda.

Bekas bangunan terdiri dari dinding yang berjendela dengan pintu gerbang masuk menelusuri anak tangga yang menyatu dengan gedung Raja Haji Abdullah ke arah Timur terus menyambung ke tapak-tapak bangunan memenuhi bukit di kawasan yang disebut dengan Kampung Gelam. Raja Ali Kelana adalah sosok intelektual handal pada masanya dan mengarang beberapa kitab, sebagai anggota senior Rusydiah Klub, seorang

diplomata yang telah beberapa kali dikirim ke Turki dalam urusan Kerajaan Riau-Lingga setelah dibubarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kondisinya terlihat tak terawat dan dipenuhi dengan semak belukar di sekitarnya.

11. Makam Yang Dipertuan Muda Ke-VII



Sumber: Survey, 2005

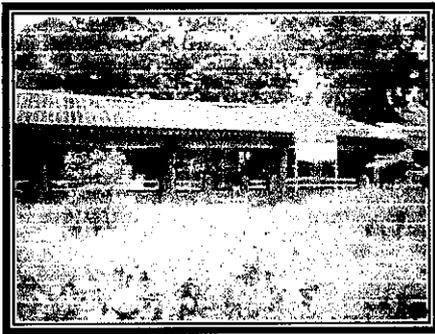
**GAMBAR 3.10
MAKAM YANG
DIPERTUAN MUDA KE-
VII**

Makam Raja Abdul Rahman Yang Dipertuan Muda ke VII (Marhum Kampung Bulang) terletak pada lereng bukit, beberapa ratus meter dari belakang Masjid Pulau Penyengat. Pusaranya dikelilingi oleh tembok yang dihiasi dengan ukiran timbul dan jaringan porselin, terutama pada bagian muka tembok-tembok tersebut. Karena kurang terawat, makam ini nyaris rusak berat, tetapi

masih dapat diselamatkan oleh Proyek Pemugaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1982–1983. Almarhum Raja Abdul Rahman memerintah pada tahun 1732–1844 dan merupakan seorang raja yang banyak memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi Kerajaan Riau pada umumnya dan penduduk Pulau Penyengat khususnya, antara lain dengan pembangunan Masjid Sultan Riau yang agung dan indah tersebut. Makam ini terletak jauh dari pemukiman penduduk tetapi tetap dikunjungi oleh wisatawan baik mancanegara atau domestik, perawatan dan pemeliharaan makam ini dilakukan oleh petugas yang ada. Makam yang Dipertuan Muda Ke VII ini ditetapkan sebagai benda cagar

budaya dengan Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 14/PW.007/KKP/2004.

12. Makam Embung Fatimah



Sumber: Survey, 2005

**GAMBAR 3.11
MAKAM EMBUNG
FATIMAH**

Terletak di Bukit Bahjah tidak jauh dari jalan menuju ke Makam Raja Haji Fisabilillah. Tengku Embung Fatimah adalah anak dari Sultan Mahmud Syah IV yang kemudian menjadi permaisuri Yang dipertuan Muda Riau IX, Raj Muhammad Yusuf – Ahmady. Makam ini terletak jauh dari

permukiman penduduk tetapi tetap dikunjungi oleh wisatawan baik mancanegara atau domestik, perawatan dan pemeliharaan makam ini dilakukan oleh petugas yang ada.

13. Gedung Mesiu atau Gedung Obat Bedil



Sumber: :Survey, 2005

**GAMBAR 3.12
GEDUNG MESIU ATAU GEDUNG OBAT BEDIL**

Sebuah bangunan kecil yang secara keseluruhan masih utuh dan telah dijadikan obyek pemugaran oleh Bidang PSK Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tk. I Riau pada tahun 1987. Bangunan beton

dengan dinding setebal hasta, kubah bertingkat dan jendela kecil-kecil berjeruji

besi tersebut adalah bekas gudang tempat menyimpan mesiu atau obat bedil. Berdasarkan hasil observasi terdapat empat buah gudang mesiu atau obat bedil di Pulau Penyengat yang pernah pula dijadikan sebagai rumah pasung atau penjara pada masa pemerintahan Hindia – Belanda (Resident Riau), namun gudang yang lain sudah musnah dan hanya tinggal bekasnya saja. Gudang ini terletak dekat dari pemukiman penduduk tetapi tidak dikunjungi oleh wisatawan baik mancanegara atau domestik, perawatan dan pemeliharaan makam ini dilakukan oleh petugas yang ada. Pemerintah menetapkan Gudang Mesiu ini sebagai benda cagar budaya dengan Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No. 9 tahun 2003.

14. Kubu (Benteng) dan Parit-Parit Pertahanan



Sumber: Masterplan, 2003

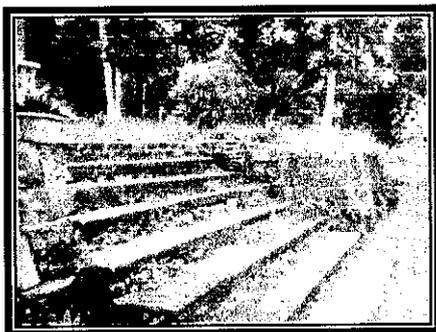
**GAMBAR 3.13
KUBU (BENTENG) DAN PARIT-PARIT PERTAHANAN**

Benteng sebagai pusat pertahanan di Pulau Penyengat terletak di Bukit Kursi, Bukit Tengah, dan di Bukit Penggawa. Benteng-benteng tersebut dilindungi oleh parit-parit

pertahanan dengan struktur batu yang terdapat di sekitar benteng sedalam ± 3 meter. Umumnya benteng tersebut ditempatkan tidak jauh dari pantai. Kubu atau benteng tersebut dibangun menjelang perang antara Kerajaan Riau dengan Kompeni Belanda pada tahun 1782–1784 semasa pemerintahan Yang Dipertuan Muda Riau IV Raja Haji. Menurut pendapat Mayor K.M. Nair, Atase Militer India

bersama-sama dengan Atase Militer Australia yang telah mengunjungi kubu-kubu tersebut pada tahun 1970, menerangkan bahwa konstruksi benteng-benteng tersebut sangat sempurna dan merupakan peninggalan terbaik dalam usaha mempelajari sistem pertahanan di abad ke-18. Benteng-benteng di Pulau Penyengat telah mengalami pemugaran oleh Bidang PSK Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tk. I Riau, dengan pemugaran pada Benteng Bukit Kursi yang strukturnya menyatu dengan rentangan parit-parit ke arah selatan sampai dengan Benteng Bukit Nibung yang berpola serupa namun lebih kecil dengan bentangan tanah lapang, seperti alun-alun. Benteng ini terletak jauh dari pemukiman penduduk tetapi kondisinya tidak terawat terlihat dari temboknya yang runtuh, tetapi dikunjungi oleh wisatawan baik mancanegara atau domestik, tidak adanya perawatan dan pemeliharaan benteng ini karena lokasinya yang berada diatas bukit. Pemerintah telah menetapkan sebagai benda cagar budaya dengan Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 14/PW.007/KKP/2004.

15. **Bekas Gedung Rusydiah Klab dan Percetakan Kerajaan**



Sumber: Survev. 2005

**GAMBAR 3.14
BEKAS GEDUNG RUSYDIAH KLAB
DAN PERCETAKAN KERAJAAN**

Rusydiah Klab adalah organisasi cendekiawan Melayu di Pulau Penyengat, anggota-anggotanya banyak menulis, menterjemahkan dan mencetak berbagai karya, seperti syair, ikhwal agama, adat-istiadat dan lain-lain yang sebagian masih dapat ditemui

hingga sekarang. Organisasi tersebut dikelola oleh Rusydiah Klub di Pulau Penyengat pada tahun 1980-an dan telah ditumbuhkan sebuah percetakan di samping tapak bangunan Rusydiah Klub yang bernama “Mathba`atul Riauiyah”, yaitu wadah yang menerbitkan berbagai karya anggota-anggotanya. Dibangun berseberangan dengan Istana Kedaton dan masih menyatu dengan struktur bangunan yang terdapat di Bukit Bahjah. Pada saat Kerajaan Riau-Lingga dilikuidasi oleh Pemerintah Belanda percetakan ini pun dirampas. Bekas gedung ini hanya tersisa reruntuhan pondasinya saja. Pada bagian atasnya telah dijadikan pemukiman oleh penduduk.

16. Bekas Gedung Raja Haji Abdullah (Hakim Mahkamah Syariah)



Sumber: Survey, 05

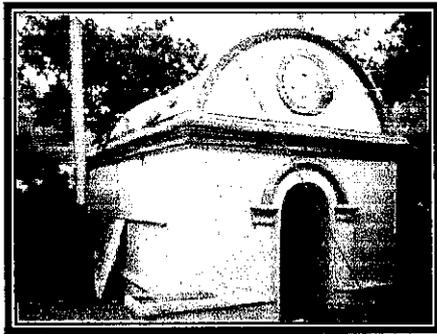
GAMBAR 3.15
BEKAS GEDUNG RAJA HAJI
ABDULLAH (HAKIM
MAHKAMAH SYARIAH)

Bangunan bekas gedung Raja Haji Abdullah, Hakim Syariah terletak di bagian Selatan Pulau Penyengat tidak jauh dari pantai. Bekas gedung ini masih menampilkan coraknya walaupun mengalami kerusakan yang cukup berat. Disamping bangunan utama, beberapa bentuk bangunan dengan kamar yang banyak menyatu

dengan struktur bangunan lainnya. Raja Abdullah dikenal juga dengan nama Abu Muhammad Adnan (nama pena). Raja Abdullah telah mengarang beberapa buah kitab dan ahli di dalam ilmu rohani. Bekas gedung ini terletak jauh dari pemukiman penduduk tetapi tidak dikunjungi oleh wisatawan baik mancanegara

atau domestik. Bekas gedung ini tidak terawat dan terpelihara terlihat dari semak belukar yang tumbuh subur.

17. Perigi Puteri (Perigi Kunci)



Sumber: : *Masterplan, 2003*

GAMBAR 3.16
PERIGI PUTERI (PERIGI KUNCI)

Perigi Puteri (Perigi Kunci) merupakan bangunan tempat pemandian kaum hawa. Banyak bangunan perigi yang disebut sebagai perigi kunci di Pulau Penyengat namun salah satu bentuk yang paling unik adalah perigi beratap kubah setengah

silinder ini. Pada tahun 1982 dipugar oleh Bidang PSK Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tk. I Riau dan kemudian diadakan pemugaran kembali pada tahun 1984 dan namanya dikekalkan dengan nama Perigi Puteri.

Kondisi perigi atau sumur ini terlihat terawat dan terpelihara dengan baik karena sering dikunjungi oleh wisatawan yang berziarah baik dari mancanegara atau lokal. Letaknya dekat pemukiman penduduk dan masih digunakan oleh penduduk disekitarnya. Pemerintah telah menetapkan sebagai benda cagar budaya dengan Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata no KM 14/PW.007/KKP/2004.

18. Taman Pantai

Suatu tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (PUSPRN) yang mengunjungi Pulau Penyengat dalam rangka kajian peninggalan Islam, mempunyai kesan bahwa Pulau Penyengat sebelum dibangun menjadi pusat kerajaan lebih dahulu telah memiliki pola perencanaan yang memadai.



Sumber: Masterplan, 2003

**GAMBAR 3.17
TAMAN PANTAI**

Penempatan masjid, istana, gedung-gedung, dan jaringan jalan berdasarkan suatu sistem terencana, termasuk tempat-tempat rekreasi, salah satu diantaranya ialah “Taman Pantai” yang terletak di pinggir pantai dan menghadap ke laut lepas dengan pemandangan yang cukup mengesankan serta dibatasi oleh bagian muka sebuah gedung megah dengan pintu dan jendela-jendela semu. Menurut cerita di tempat tersebut pernah dibangun beberapa buah ayunan buatan, balai peranginan, kapal-kapal dari beton dan sarana rekreasi lainnya. Sebagian dari peninggalan-peninggalan tersebut masih ada sisanya sampai sekarang. Bekas taman ini terletak jauh dari pemukiman penduduk dan tidak dikunjungi oleh wisatawan baik mancanegara atau domestik. Bekas taman ini tidak terawat dan terpelihara terlihat dari semak belukar yang tumbuh subur. Akan tetapi tidak seluruh benda cagar budaya lainnya dapat dijelaskan dalam pembahasan ini. (Lihat Peta Lokasi Persebaran Benda Cagar Budaya).

Penempatan masjid, istana, gedung-gedung, dan jaringan jalan berdasarkan suatu sistem terencana, termasuk tempat-tempat rekreasi, salah satu diantaranya ialah “Taman Pantai” yang terletak di pinggir pantai dan menghadap ke laut lepas dengan



MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

TESIS

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MELIHARA BENDA CAGAR BUDAYA DI PULAU PENYENGAT
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA MELAYU**

**LOKASI BENDA CAGAR BUDAYA
DI PULAU PENYENGAT**

LEGENDA

- BATAS PULAU
- BATAS KAMPUNG (RW)
- JALAN
- PERSEBARAN PEHUKIMAN
- LOKASI BENDA CAGAR BUDAYA

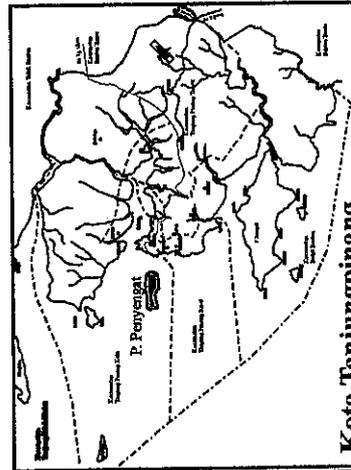
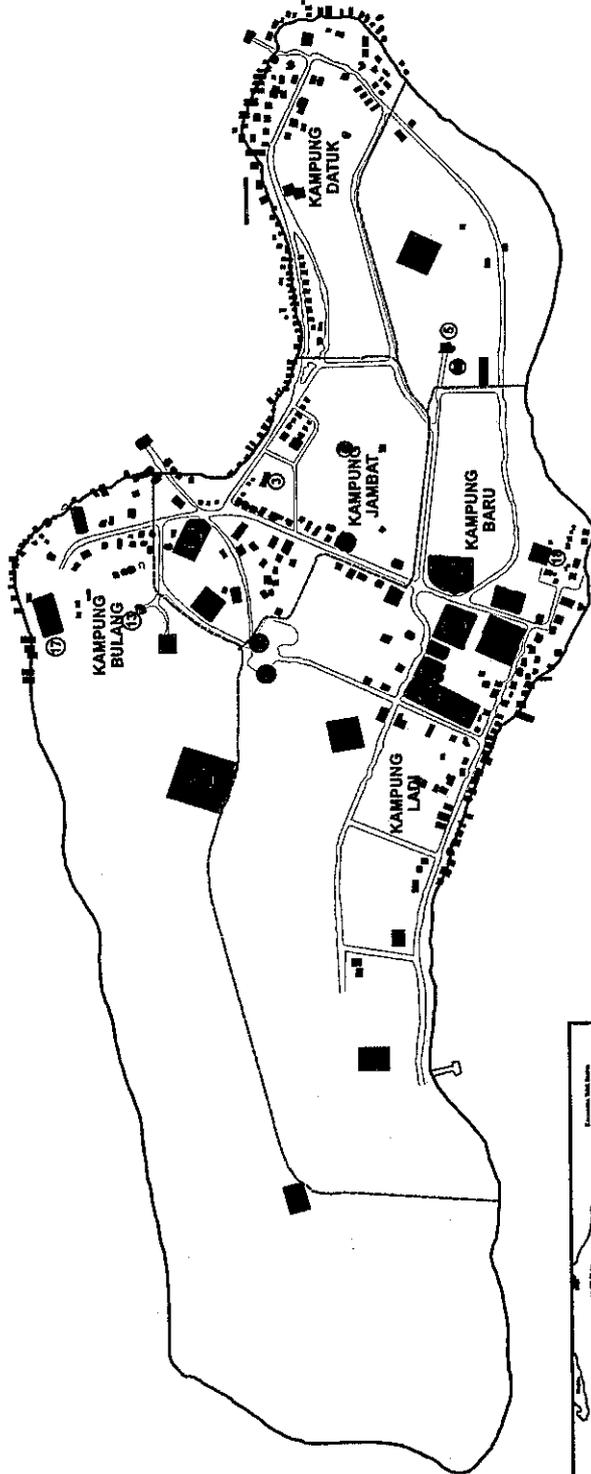
- KETERANGAN NAMA BCB**
- 1 : MASJID PUJAU SULTAN RAJU
 - 2 : BEKAS GEDUNG TAMBAH KESUKUMAHAN
 - 3 : KAMPUNG DATUK
 - 4 : KOMPLEKS MAKAM RAJA HAJI FISABILLAH
 - 5 : BEKAS ISTANA SULTAN ABDUL RAHMAN MUAZAM SYAH
 - 6 : GEDUNG TENGAH BILUK
 - 7 : KOMPLEKS MAKAM RAJA JAFAAR
 - 8 : BEKAS ISTANA RAJA ALI MARRUM KUBURAN BASA
 - 9 : ISTANA BARJAH
 - 10 : MAKAM RAJA ABDURRAHMAN YDM RAJU KE VII
 - 11 : MAKAM EMBUNG FATIMAH
 - 12 : GEDUNG MESID RUNTUHAN BANGUNAN
 - 14 : KUBURAN PARIT PERTAHANAN
 - 15 : BEKAS GEDUNG MALIK KURSI
 - 16 : BEKAS GEDUNG MALIK KURSI
 - 17 : BEKAS ISTANA LAUT
 - 18 : TAMAN PANTRAI

ARAH	SKALA	NO.GBR
U	1 : 11.000	3.18
		NO.HAL
		80

SUMBER:

Master Plan P.Penyengat Th 2003

SELAT RIAU



Kota Tanjungpinang

BAB IV

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMELIHARA BENDA CAGAR BUDAYA DI PULAU PENYENGAT

Bab ini merupakan analisis terhadap partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan benda cagar budaya di Pulau Penyengat sebagai upaya pelestarian warisan budaya Melayu. Analisis dilakukan berdasarkan variabel yang telah ditentukan, dengan menggunakan metoda kualitatif deskriptif, yang didukung oleh pengamatan dan data hasil temuan lapangan yang merupakan kompilasi dari sebaran kuesioner kepada reponden terpilih. Komponen analisis terdiri dari analisis partisipasi masyarakat, yang meliputi analisis faktor pengaruh partisipasi, skala peran serta, klasifikasi tipe, bentuk, dan tingkat partisipasi masyarakat; serta analisis keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan benda cagar budaya di Pulau Penyengat.

4.1 Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat

Dalam bahasan mengenai partisipasi masyarakat akan diidentifikasi dahulu mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pemeliharaan benda cagar budaya di Pulau Penyengat secara umum. Hasil dari analisis ini nantinya dijadikan sebagai suatu langkah strategi dalam pemberdayaan secara khusus dalam upaya pelestarian benda cagar budaya di kawasan ini.

4.1.1 Analisis Faktor Pengaruh Partisipasi Masyarakat

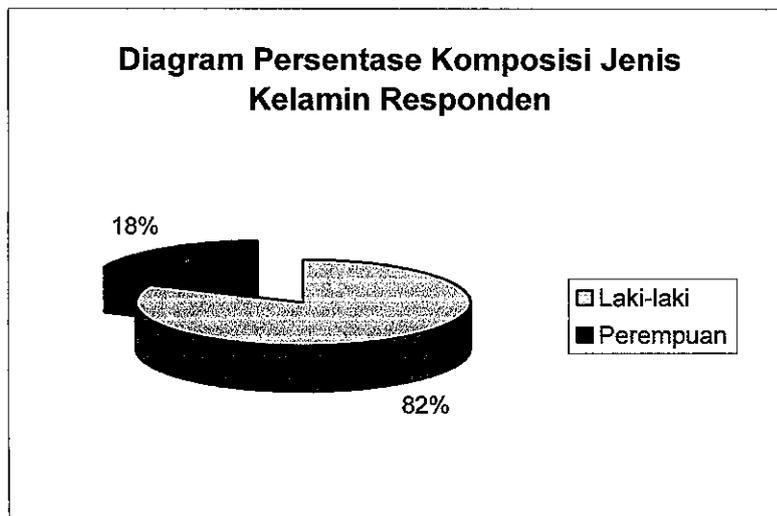
Untuk mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat secara internal, maka berdasarkan variabel yang telah ditetapkan perlu dikenali terlebih dulu karakteristik masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, partisipasi masyarakat di Pulau Penyengat akan mencirikan karakter yang khas. Identifikasi terhadap karakteristik partisipasi masyarakat ini dilakukan dengan mengenali jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, agama, daerah asal, dan lama tinggal.

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada 60 orang responden, dapat digambarkan bahwa partisipasi masyarakat Pulau Penyengat berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 81,67% adalah kaum laki-laki, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 18,33% adalah perempuan.

TABEL IV.1
JENIS KELAMIN RESPONDEN

NO	JENIS KELAMIN	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Laki-laki	49	81,67
2.	Perempuan	11	18,33
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005.



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4.1
PERSENTASE KOMPOSISI JENIS KELAMIN RESPONDEN

Dari hasil kuesioner tersebut dapat disinyalir bahwa aksesibilitas informasi bagi kaum laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kaum laki-laki lebih terbuka dan lebih cepat menerima informasi karena mereka lebih banyak beraktivitas di luar rumah daripada kaum perempuan. Informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada beberapa kelompok masyarakat masih menggunakan cara penyampaian secara tradisional yang disampaikan secara lisan berantai. Kaum lelaki yang lebih banyak diluar rumah tentu saja akan lebih cepat menerima informasi sehingga akan lebih cepat juga merespon perintah informasi tersebut. Dalam hal ajakan turut berpartisipasi, dengan kondisi masyarakat seperti tersebut maka akan lebih cepat direspon oleh kaum laki-laki.

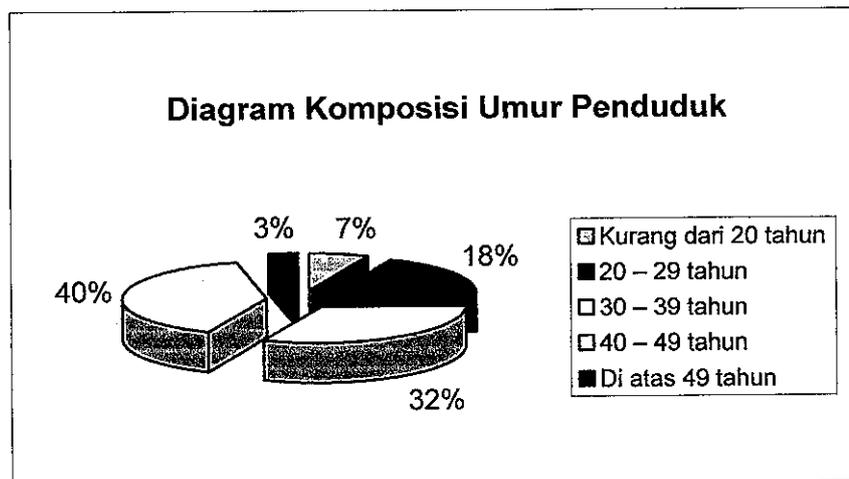
Karakteristik umur yang merupakan faktor internal dari masyarakat juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Di Pulau Penyengat, masyarakat dengan klasifikasi umur 40-49 tahun mendominasi jumlah responden, yang tergolong

jenjang usia senior. Banyaknya usia klasifikasi ini di kalangan responden mengindikasikan bahwa usia banyak berperan dalam proses berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini dimungkinkan berkaitan dengan keberanian dalam mengambil keputusan dan berpendapat.

TABEL IV.2
KLASIFIKASI UMUR RESPONDEN

NO.	KLASIFIKASI UMUR RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Kurang dari 20 tahun	4	6,67
2.	20 – 29 tahun	11	18,33
3.	30 – 39 tahun	19	31,67
4.	40 – 49 tahun	24	40,00
5.	Di atas 49 tahun	2	3,33
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005.



Sumber : Analisis Peneliti, 2005.

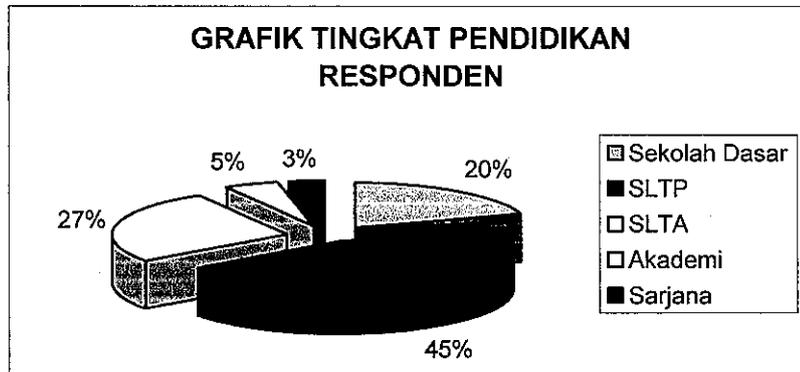
GAMBAR 4.2
KOMPOSISI UMUR RESPONDEN

Dalam hal karakteristik pendidikan, masyarakat yang mayoritas berpartisipasi secara aktif adalah yang berpendidikan SLTP sebanyak 27% kemudian disusul dengan responden yang berpendidikan SLTA 16%. Masyarakat yang berpendidikan tinggi, yaitu akademi dan sarjana berturut-turut sebanyak 3% dan 2% justru sedikit yang berperan serta. Kecenderungan minimnya masyarakat berlatar pendidikan tinggi yang berpartisipasi aktif di Pulau Penyengat berkaitan dengan berkembangnya gaya hidup yang dianut oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi lebih memilih untuk tinggal di kota, yaitu ke Kota Tanjungpinang, dan meninggalkan Penyengat. hal ini berkaitan dengan pergeseran gaya hidup dari masyarakat yang tradisional yang masih paguyuban, menuju gaya hidup masyarakat perkotaan yang patembayan. Komposisi tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel IV.3.

TABEL IV.3
PENDIDIKAN RESPONDEN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Sekolah Dasar	12	20
2.	SLTP	27	45
3.	SLTA	16	26,67
4.	Akademi	3	5
5.	Sarjana	2	3,33
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005.



Sumber : Hasil Analisis, 2005.

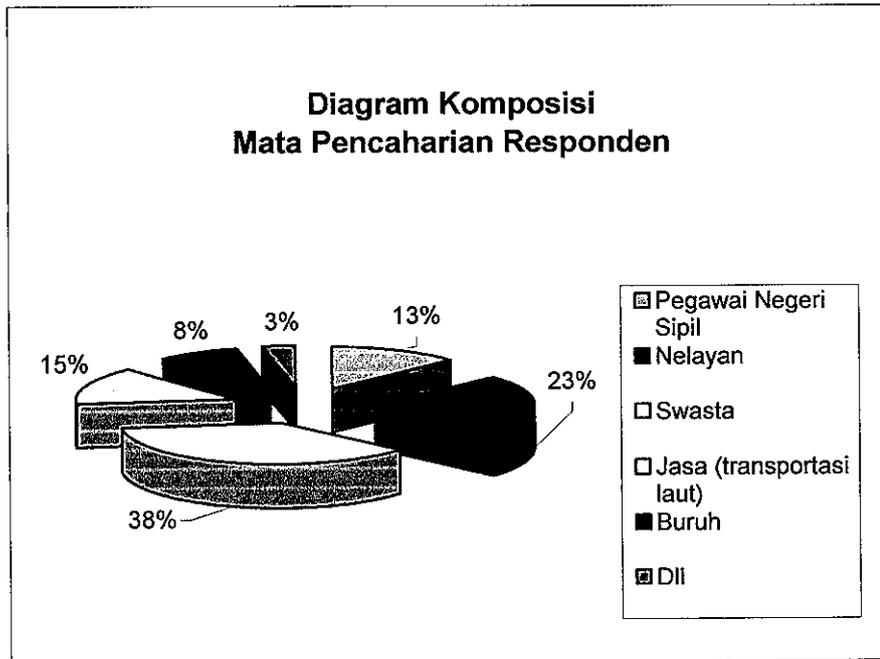
GAMBAR 4.3
TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

Dari karakteristik berdasarkan pekerjaan, masyarakat yang lebih banyak berperanserta dalam proses partisipasi adalah mereka yang bekerja di bidang swasta. Kecenderungan ini dimungkinkan karena pada bidang pekerjaan inilah yang bersentuhan langsung dengan proses pemeliharaan dan pariwisata budaya di Pulau Penyengat, sehingga secara otomatis orang yang bekerja pada sektor ini lebih banyak berpartisipasi dalam proses pemeliharaan benda cagar budaya di Pulau Penyengat. Selengkapnya hasil kuesioner dan diagram lingkaran dapat dilihat pada tabel IV.4 dan gambar 4.4 berikut.

TABEL IV.4
PEKERJAAN RESPONDEN

NO	PEKERJAAN RESPONDEN	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Pegawai Negeri Sipil	8	13,33
2.	Nelayan	14	23,33
3.	Swasta	22	36,67
4.	Jasa (transportasi laut)	9	15
5.	Buruh	5	8,33
6.	Dll	2	3,33
JUMLAH		60	100

Sumber : Hasil Analisis, Agustus 2005.



Sumber : Hasil Analisis, 2005.

**GAMBAR 4.4
KOMPOSISI MATA PENCAHARIAN RESPONDEN**

Karakteristik agama masyarakat di wilayah penelitian mayoritas adalah beragama Islam sebanyak 96,67%. Hal ini berkaitan dengan tanah leluhur yang merupakan kerajaan Melayu yang merupakan kerajaan berdasar syariat Islam. kecenderungan ini mengindikasikan masih banyak penduduk asli yang tinggal secara turun temurun di Pulau Penyengat yang tentu saja mempunyai agama sama dengan yang dipeluk para leluhurnya. Terdapatnya masyarakat beragama Budha sebanyak 3,33% mengindikasikan adanya penduduk pendatang yang tinggal di Pulau Penyengat. Keberadaan mereka tidak membentuk suatu pengkotakan, namun mampu bersimbiosis dengan penduduk asli, sehingga proses partisipasi tidak mempunyai kendala. Selanjutnya data mengenai agama responden dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut.

TABEL IV.5
AGAMA RESPONDEN

NO	AGAMA RESPONDEN	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Islam	58	96,67
2.	Khatolik	-	-
3.	Protestan	-	-
4.	Budha	2	3,33
5.	Hindu	-	-
6.	Aliran Kepercayaan	-	-
J U M L A H		60	100

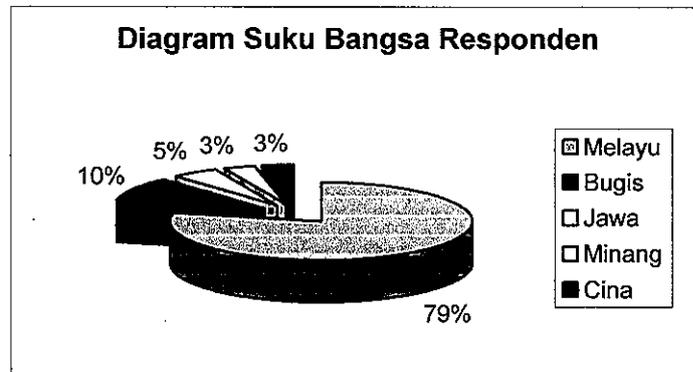
Sumber : Hasil Analisis, 2005.

Faktor daerah asal juga mempengaruhi karakteristik responden dalam berpartisipasi. Berdasarkan hasil tabulasi data yang dilakukan terhadap indikator suku bangsa ini terlihat bahwa responden yang bersuku bangsa Melayu sebanyak 47 orang (78,33 %), suku bangsa Bugis berjumlah 6 orang (10 %), suku bangsa Jawa sebanyak 3 orang (5%), dan masing-masing suku bangsa Minang dan Cina 2 orang atau jumlah mereka 6,67 % dari keseluruhan jumlah responden.

TABEL IV.6
SUKU BANGSA RESPONDEN

NO	SUKU BANGSA	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Melayu	47	78,33
2.	Bugis	6	10
3.	Jawa	3	5
4.	Minang	2	3,33
5.	Cina	2	3,33
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005.



Sumber : Hasil Analisis, 2005.

**GAMBAR 4.5
KOMPOSISI SUKU BANGSA RESPONDEN**

Apabila kita lihat dari pembagian kelompok penduduk berdasarkan suku bangsa di atas, mayoritas dari responden adalah masyarakat Melayu (78,33 %). Hal ini bisa dimengerti karena Pulau Penyengat merupakan perkampungan masyarakat Melayu yang sejak abad 19 telah ditempati dan sebagai salah satu pusat kerajaan Melayu karena YAM Dipertuan Muda Riau (YDM ke V sampai X) memerintah dari pulau ini. Sejak pulau ini dibuka sebagai perkampungan penduduk, orang-orang Melayu yang merupakan penduduk tempatan tentu lebih banyak yang menempati pulau ini jika dibandingkan penduduk suku bangsa lainnya. Masuknya penduduk suku bangsa lainnya ke Pulau Penyengat berdasarkan catatan sejarah diawali oleh penduduk suku bangsa Bugis (10 %) yang merupakan jumlah terbanyak kedua dari keseluruhan jumlah responden. Selanjutnya ada juga penduduk suku bangsa lainnya, yaitu; suku bangsa Jawa (5 %), Minang (3,33 %) dan etnis Cina (3,33 %).

Keterlibatan suku bangsa Melayu yang paling banyak dalam partisipasi masyarakat ini dikarenakan suku bangsa inilah yang banyak tinggal di daerah

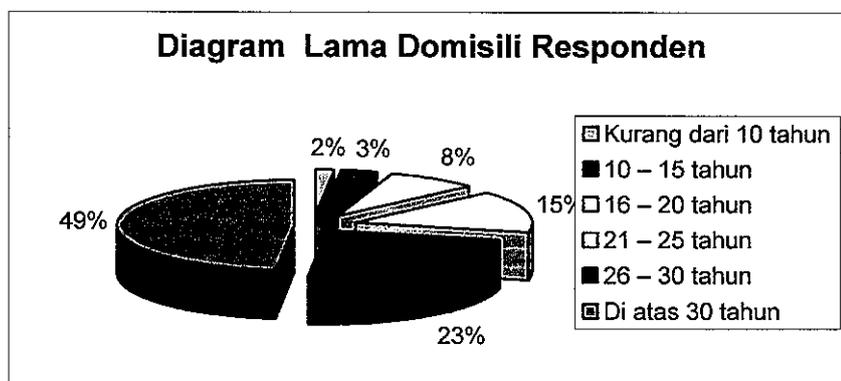
dekat benda cagar budaya, yang berada pada bagian tengah Pulau Penyengat. Beberapa suku bangsa lain yang tinggal di Pulau Penyengat bukan merupakan penduduk asli. Mereka adalah pendatang dari Jawa, Bugis, Minang, dan Cina. Proporsi partisipasi dari suku bangsa diluar Melayu ini lebih sedikit dikarenakan tempat tinggal mereka yang jauh dari lokasi benda cagar budaya, dan berada di daerah pesisir.

Faktor lama tinggal masyarakat juga mempengaruhi proses berlangsungnya partisipasi masyarakat. Dari hasil tabulasi yang dilakukan, terlihat bahwa masyarakat yang berdomisili lebih lama, yaitu diatas 30 tahun di Pulau Penyengat akan lebih banyak berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Sedangkan masyarakat pendatang yang baru tinggal di pulau ini mempunyai persentase yang relatif lebih kecil. Faktor keterikatan emosional dan ketaatan terhadap adat dan kebiasaan menjadikan mereka yang tinggal lebih lama di Pulau Penyengat mempunyai kewajiban sosial yang lebih banyak kepada tanah kelahirannya.

TABEL IV.7
LAMA BERDOMISILI RESPONDEN

NO	LAMA DOMISILI	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Kurang dari 10 tahun	1	1,67
2.	10 – 15 tahun	2	3,33
3.	16 – 20 tahun	5	8,33
4.	21 – 25 tahun	9	15
5.	26 – 30 tahun	14	23,33
6.	Di atas 30 tahun	29	48,33
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005.



Sumber : Hasil Analisis, 2005.

GAMBAR 4.6
KOMPOSISI LAMA DOMISILI

Dari tabel di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah responden yang paling banyak yaitu yang telah lebih dari 30 tahun menetap di Pulau Penyengat. Responden yang telah lebih dari 30 tahun tinggal di Pulau Penyengat ini jumlahnya hampir separoh dari keseluruhan jumlah responden. Rata-rata responden telah lebih dari 20 tahun berdomisili di Pulau Penyengat dan mereka merupakan penduduk asli.

Kelurahan Pulau Penyengat secara keseluruhan dibagi atas 7 kampung, yaitu; Kampung Jambat, Kampung Baru, Kampung Datuk, Kampung Ladi, Kampung Tengah, Kampung Bulang, dan Kampung Balik Kota. Tidak semua kampung menjadi tempat penyebaran kuesioner penelitian karena lokasi benda cagar budaya yang terpilih menjadi sampel hanya terletak di 3 (tiga) kampung. Berdasarkan hal demikian maka responden yang menjadi sampel juga berdomisili di sekitar lokasi benda cagar budaya bersangkutan. Lokasi kediaman responden terlihat pada Peta Lokasi Penyebaran Kuesioner.

Karakteristik internal responden tersebut merupakan karakteristik dasar masyarakat yang mempengaruhi berlangsungnya partisipasi masyarakat. Adanya karakter khas yang tidak terdapat secara umum di wilayah lain seperti suku bangsa, lama berdomisili, dan agama berkaitan erat mempengaruhi proses partisipasi. Hal ini sangat mendukung aktivitas memelihara kelestarian benda cagar budaya di Pulau Penyengat sebagai kekuatan lokal yang harus dioptimalkan.

4.1.2 Analisis Skala Peran Serta Partisipasi Masyarakat

Suatu kegiatan pemeliharaan dan pelestarian yang ingin melibatkan anggota masyarakat tentu sebaiknya terlebih dahulu dibicarakan dengan anggota masyarakat tersebut. Demikian juga kegiatan perencanaan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya yang dilakukan di Pulau Penyengat. Kegiatan perencanaan ini agar lebih optimal dibicarakan terlebih dahulu dalam pertemuan terbuka dengan anggota masyarakat di sekitar lokasi benda cagar budaya yang menjadi objek kegiatan.

Peran serta individu dalam kegiatan bersama dapat dilihat dari skala peran yang dilakukannya. Penilaian terhadap kriteria ini didasarkan pada frekuensi kehadiran anggota dalam pertemuan, keaktifan anggota dalam berdiskusi kelompok, keterlibatan anggota dalam mengikuti kegiatan fisik secara kelompok, serta kesediaan memberi iuran/sumbangan berbentuk uang yang telah ditetapkan



MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

TESIS

PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MELIHARA BENDA CAGAR BUDAYA DI PULAU PENYENGAT
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA NELAYU

LOKASI BCB DAN PERSEBARAN
KUESIONER

LEGENDA

PERSEBARAN KUESIONER

BATAS KAMPUNG (RW)

JALAN

PERSEBARAN PEMUKIMAN

LOKASI BENDA CAGAR BUDAYA

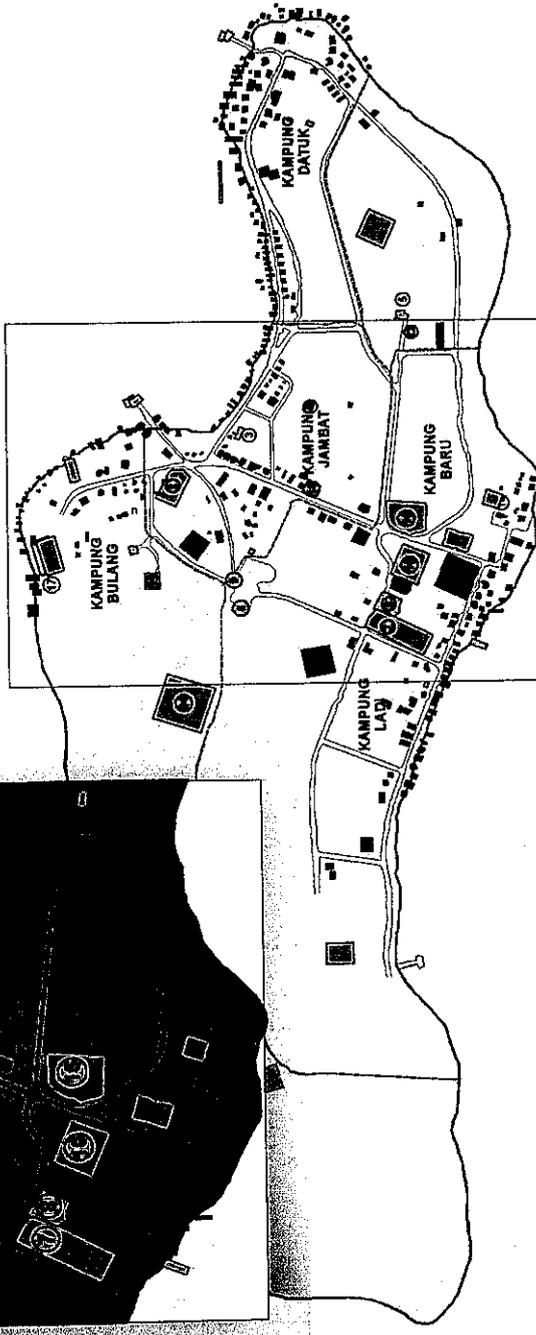
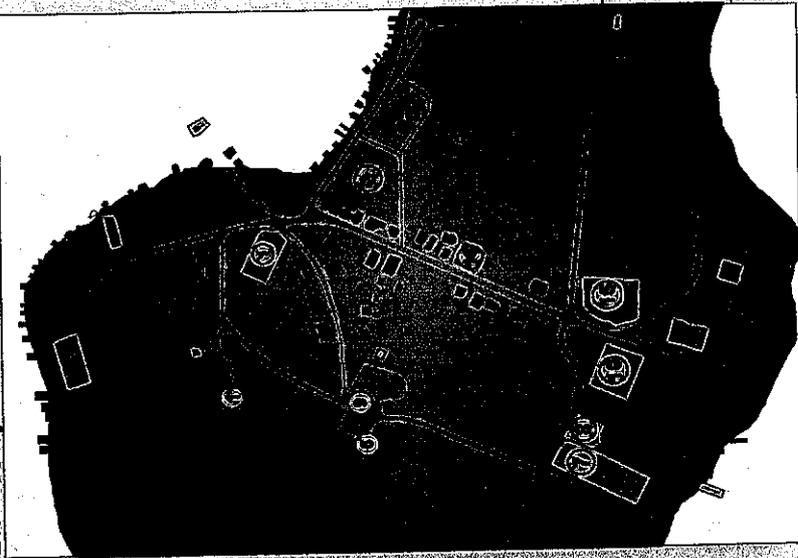
- 1 : MASJID PULAU BULUN RIAU
- 2 : MASJID PULAU BULUN RIAU KUBUR KHUSNA YANTUAN AHMADY
- 3 : BEKAS GEDUNG TARIH KIBALLAH
- 4 : KOMPLEKS MAKAM RAJA BIKRU PUTRI
- 5 : KOMPLEKS MAKAM RAJA HAJI FIRAIBILLAH
- 6 : BEKAS ETANA BULTAN ABDUL RAHMAN MUJAZAM SYAH
- 7 : GEDUNG TENDU BELK
- 8 : MASJID AL-MAJLIS
- 9 : BEKAS ETANA RAJA ALI MARUHM KUBURAN BASA
- 10 : ETANA BANJAH
- 11 : MAKAM RAJA ABDURRAHMAN YDM RAU KE VII
- 12 : MAKAM BAMBUNG FATMAH
- 13 : GEDUNG MERTUA TUNJUNGAN
- 14 : GEDUNG MERTUA TUNJUNGAN
- 15 : BUKIT BUKIT BUKIT KURSI
- 16 : BEKAS GEDUNG MAKKANAH
- 17 : BEKAS ETANA LAUT
- 18 : TAMAN PANTAI

ARAH	SKALA	NO.GBR
		4.7
1 : 11.000		NO.HAL
		93

SUMBER:

- Master Plan P.Penyengat Th 2003
- Hasil Analisis tahun 2005

Lokasi Penyebaran Kuesioner



Tingkat keaktifan seseorang dalam kegiatan pertemuan akan terlihat dari frekuensi kedatangannya mengikuti kegiatan pertemuan yang dilaksanakan tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan frekuensi kehadiran responden dalam mengikuti kegiatan pertemuan perencanaan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya; sangat sering dijawab oleh 15 orang responden (25 %), sering dinyatakan oleh 24 orang responden (40 %), dan kadang-kadang dijawab oleh 21 orang responden (35 %). Tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah hadir sama sekali. Kecenderungan perbedaan frekuensi partisipasi ini dimungkinkan oleh adanya perbedaan jumlah penduduk pada kampung-kampung wilayah studi, dimana pada proporsi kampung berpenduduk besar, justru frekuensi kegiatan warganya pada tingkatan sering.

TABEL IV.8
FREKUENSI KEHADIRAN RESPONDEN DALAM PERTEMUAN
PERENCANAAN PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN
BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	FREKUENSI KEHADIRAN DALAM PERTEMUAN	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Sangat sering	15	25
2.	Sering	24	40
3.	Kadang-kadang	21	35
4.	Tidak pernah hadir sama sekali	-	-
Jumlah		60	100

Sumber : Hasil Analisis. 2005

Berkaitan dengan tingkat keaktifan responden dalam kegiatan pertemuan membicarakan perencanaan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya yang dilaksanakan di Pulau Penyengat, 13 orang responden (21,67 %)

menyatakan sangat aktif mengikuti kegiatan pertemuan, kategori aktif dijawab 28 orang responden (46,67 %), kurang aktif dijawab oleh 19 orang responden (31,67 %), dan tidak aktif sama sekali dinyatakan oleh 2 orang responden (3,33 %).

Tabel IV.9 menunjukkan frekuensi kehadiran responden dalam kegiatan pertemuan pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat. Berdasarkan hasil jawaban yang diberikan oleh responden, sangat sering mengikuti pertemuan dinyatakan oleh 14 orang responden (23,33%), sering mengikuti pertemuan dijawab oleh 27 orang responden (45%), dan hanya kadang-kadang mengikuti pertemuan dijawab oleh 19 orang responden (31,67%). Selanjutnya, tidak ada seorangpun responden yang menyatakan tidak pernah hadir sama sekali dalam kegiatan pertemuan yang dilaksanakan.

TABEL IV.9
FREKUENSI KEHADIRAN DALAM PERTEMUAN PELAKSANAAN
PEMELIHARAAN BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	FREKUENSI KEHADIRAN DALAM PERTEMUAN	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Sangat sering	14	23,33
2.	Sering	27	45
3.	Kadang-kadang	19	31,67
4.	Tidak pernah hadir sama sekali	-	-
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

TABEL IV.10
TINGKAT KEAKTIFAN RESPONDEN DALAM PERTEMUAN
PERENCANAAN PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN
BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	TINGKAT KEAKTIFAN PERTEMUAN PERENCANAAN BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Sangat aktif	13	21,67
2.	Aktif	26	43,33
3.	Kurang aktif	19	31,67
4.	Tidak aktif sama sekali	2	3,33
J u m l a h		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan hasil tabulasi data yang berhubungan dengan tingkat keaktifan responden dalam mengikuti kegiatan pertemuan yang membicarakan perencanaan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya di atas menunjukkan bahwa hampir separuh dari jumlah keseluruhan responden menyatakan bahwa mereka selalu aktif (46,67 %) mengikuti pertemuan. Tingkat keaktifan terbesar kedua masuk pada kategori kurang aktif (32,67 %) dan selanjutnya sangat aktif (21,67 %) mengikuti kegiatan pertemuan. Disamping kategori jawaban di atas, ada juga responden yang mengatakan tidak pernah aktif sama sekali (3,33 %). Sehubungan dengan tingkat keaktifan ini memperlihatkan bahwa responden penelitian selalu dalam keadaan dan situasi aktif dalam mengikuti kegiatan pertemuan yang membicarakan perencanaan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat.

Dari kecenderungan tingkat keaktifan responden mengikuti kegiatan pertemuan dalam membicarakan perencanaan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya tersebut di atas adalah lebih banyak persentase responden yang

sering (40%) mengikuti pertemuan dari pada kategori jawaban lainnya. Persentase terbesar selanjutnya adalah responden yang frekuensi kedatangannya kadang-kadang (35%) mengikuti kegiatan pertemuan dan terakhir frekuensi jawaban yang diberikan sangat sering (25%). Tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah hadir sama sekali. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa dalam setiap pertemuan untuk merencanakan pemeliharaan benda cagar budaya semua responden pernah hadir walaupun frekuensi kehadirannya berbeda satu sama lainnya. Di samping itu, angka ini juga menunjukkan bahwa responden penelitian pada dasarnya sering mengikuti pertemuan yang diadakan guna merencanakan pemeliharaan benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat. Hal ini menunjukkan bahwa warga masyarakat peduli dengan kejadian di lingkungannya sehingga mereka secara sukarela hadir dalam pertemuan-pertemuan warga.

Tingkat keaktifan responden tidak hanya dilihat dari kegiatan pertemuan perencanaan, namun juga dari derajat keaktifannya mengikuti pertemuan pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya. Sehubungan dengan pertanyaan ini, sangat aktif dijawab oleh 12 orang responden (20 %), aktif dijawab oleh 32 orang responden (53,33 %), dan kurang aktif dijawab oleh 16 orang responden (26,67 %). Tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah aktif sama sekali dari kegiatan pertemuan yang diadakan.

Berdasarkan hasil tabulasi data tersebut di atas terlihat bahwa lebih dari separoh jumlah responden aktif (53,33%) aktif mengikuti pertemuan guna membicarakan pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya. Selanjutnya dari hasil tabulasi menunjukkan banyaknya responden kurang aktif

(26,67%) mengikuti pertemuan diikuti oleh kategori responden yang sangat aktif (20%). Besarnya persentase responden yang aktif mengikuti pertemuan guna membicarakan pelaksanaan pemeliharaan benda cagar budaya mengasumsikan bahwa pada dasarnya responden penelitian ini menyukai atau mengharapkan adanya pertemuan guna membicarakan pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat.

TABEL IV.11
TINGKAT KEAKTIFAN RESPONDEN DALAM PERTEMUAN
PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN
BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	TINGKAT KEAKTIFAN PERTEMUAN PELAKSANAAN BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Sangat aktif	12	20
2.	Aktif	32	53,33
3.	Kurang aktif	16	26,67
4.	Tidak aktif sama sekali	-	-
J u m l a h		60	100

Sumber : Hasil Analisis. 2005

Berdasarkan tabulasi data dari Tabel IV.11 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lebih dari sebagian responden atau lebih banyak responden menyatakan aktif (53,33%) mengikuti pertemuan yang dilaksanakan. Selanjutnya persentase kedua terbesar ditunjukkan oleh responden yang kurang aktif (26,67%) mengikuti pertemuan. Urutan terakhir ditempati oleh responden yang sangat aktif (20%) mengikuti kegiatan pertemuan. Tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah aktif sama sekali dari kegiatan pertemuan yang dilaksanakan. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa dalam setiap pertemuan untuk pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya semua responden

pernah aktif mengikuti pertemuan walaupun tingkat kehadiran mereka berbeda satu sama lainnya.

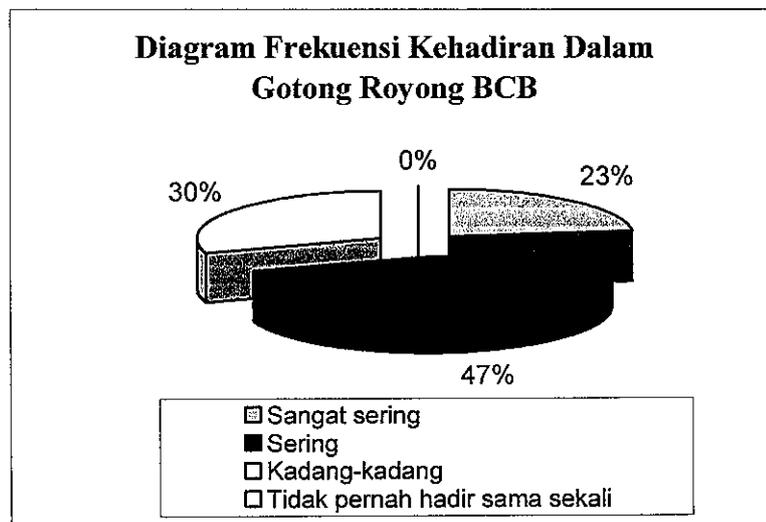
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian di lapangan (kelurahan Penyengat) bahwa pada setiap hari Jum'at selalu diadakan gotong-royong yang diikuti aparat kelurahan dan masyarakat setempat. Sewaktu hasil wawancara ini dicek silang dengan pertanyaan yang diajukan terhadap responden berkaitan dengan frekuensi kehadirannya dalam kegiatan gotong-royong yang diadakan secara bersama ini, diperoleh data, fakta dan informasi bahwa; 14 orang responden (23,33 %) menyatakan sangat sering mengikuti kegiatan gotong-royong yang diadakan, 28 orang responden (48,33 %) menyatakan sering mengikuti kegiatan gotong-royong yang diadakan, 18 orang responden (30 %) menyatakan hanya kadang-kadang mengikuti kegiatan gotong-royong yang diadakan, dan tidak ada seorangpun dari responden yang menyatakan tidak pernah aktif atau hadir sama sekali.

Kegiatan lain yang menjadi tolok ukur skala peran serta adalah kesediaan anggota/warga dalam kegiatan fisik yang diselenggarakan bersama. Berkaitan dengan Tabel IV.12 di bawah ini terlihat bahwa dari setiap kegiatan gotong-royong yang diadakan, lebih banyak diikuti oleh responden yang menyatakan sering (46,67 %) mengikuti kegiatan gotong-royong yang diadakan. Persentase terbanyak berikutnya adalah responden yang menyatakan hanya kadang-kadang (30 %) mengikuti kegiatan gotong-royong yang diadakan. Selanjutnya diikuti oleh kelompok responden yang sangat sering (23,33 %) mengikuti kegiatan gotong-royong yang dilaksanakan.

TABEL IV.12
FREKUENSI KEHADIRAN DALAM KEGIATAN GOTONG-ROYONG
MEMBERSIHKAN BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	FREKUENSI KEHADIRAN KEGIATAN GOTONG-ROYONG	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Sangat sering	14	23,33
2.	Sering	28	46,67
3.	Kadang-kadang	18	30
4.	Tidak pernah hadir sama sekali	-	-
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4. 7
GRAFIK FREKUENSI KEHADIRAN DALAM GOTONG ROYONG BCB

Tingkat partisipasi responden dalam memelihara dan melestarikan benda cagar budaya tidak hanya diukur dari frekuensi kehadiran dalam kegiatan gotong-royong membersihkan benda cagar budaya namun juga dari tingkat kesediaannya memberikan sumbangan uang atau membayar iuran guna keperluan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya tersebut. Berdasarkan hasil penyebaran

kuesioner yang dilakukan terhadap responden, dapat ditabulasikan bahwa; sangat sering memberi sumbangan dinyatakan oleh 9 orang responden (15 %), sering memberikan sumbangan dijawab oleh 22 orang responden (36,67 %), dan hanya kadang-kadang membayar sumbangan dinyatakan oleh 29 orang responden (48,33 %). Kategori jawaban tidak pernah memberi sumbangan tidak ada dijawab oleh responden.

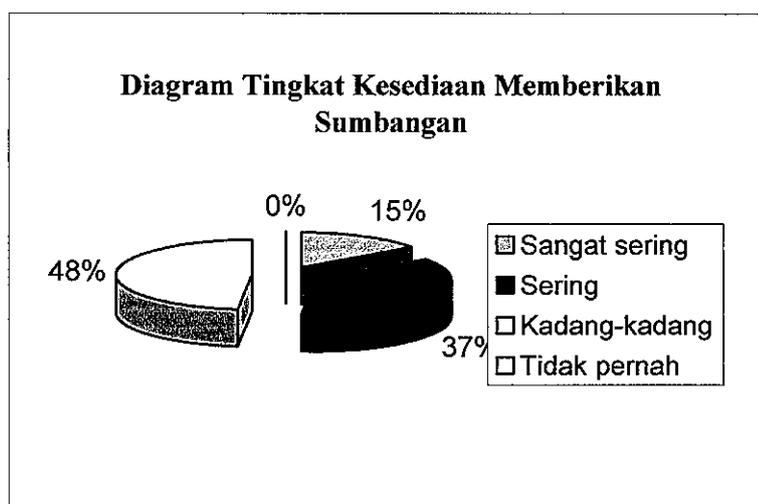
TABEL IV.13
TINGKAT KESEDIAAN RESPONDEN MEMBERIKAN SUMBANGAN
GUNA PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN BENDA CAGAR
BUDAYA

NO.	TINGKAT KESEDIAAN MEMBERIKAN SUMBANGAN	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Sangat sering	9	15
2.	Sering	22	36,67
3.	Kadang-kadang	29	48,33
4.	Tidak pernah	-	-
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan data yang terlihat pada Tabel IV.13 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian responden kadang-kadang membayar sumbangan (48,33%). Sedangkan pada tingkatan partisipasi sering dan amat sering, justru menduduki peringkat selanjutnya. Kondisi ini berkait dengan latar ekonomi dan mata pencaharian masyarakat yang menjadi penduduk Pulau Penyengat yang rata-rata adalah masyarakat berlatar ekonomi menengah. Belum adanya kemauan yang tinggi untuk secara total berpartisipasi dalam pemeliharaan aset cagar budaya di pulau ini serta masih kurangnya penyandang dana sukarela

yang membiayai pemeliharaan kekayaan pusaka di Pulau Penyengat juga mempengaruhi masih rendahnya tingkat kesediaan memberikan sumbangan.



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4. 8
GRAFIK TINGKAT KESEDIAAN MEMBERIKAN SUMBANGAN

Berdasarkan skala peran serta, maka partisipasi masyarakat di Pulau Penyengat belum tinggi, karena mayoritas variabel pada kriteria ini belum terjawab pada tingkat pilihan jawaban paling atau sangat.

4.1.3 Analisis Klasifikasi Tipe Partisipasi Masyarakat

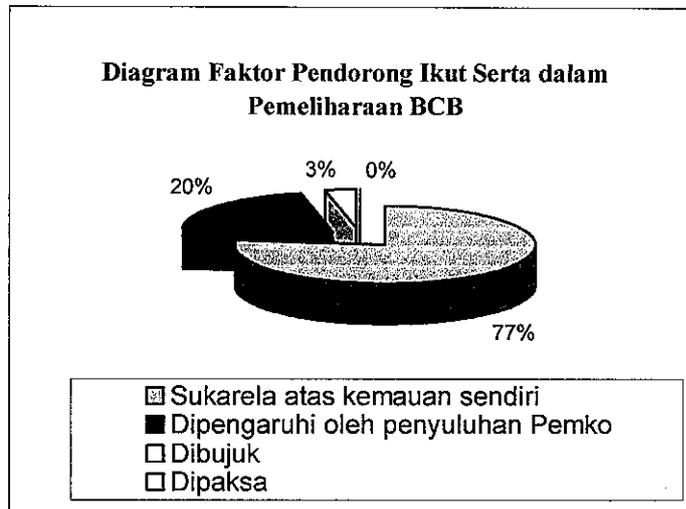
Pengklasifikasian tipe partisipasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana tipe yang terjadi pada masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi pemeliharaan benda cagar budaya di Pulau Penyengat, sebagai arahan untuk menyusun strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat. Pengklasifikasian ini dapat dilihat dari derajat kesukarelaan peserta/masyarakat dalam mengikuti kegiatan bersama dalam rangka pemeliharaan benda cagar budaya. Mayoritas

masyarakat (76,67%) mengikuti kegiatan partisipasi secara sukarela, tanpa adanya pengaruh dari luar dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Pulau Penyengat sangat tinggi. Kesadaran yang tinggi ini dimungkinkan sangat dipengaruhi oleh keterikatan emosional dengan tanah leluhurnya untuk memelihara peninggalan-peninggalan bersejarah sebagai tanda bakti kepada leluhurnya. Kecenderungan ini menggolongkan tipe partisipasi masyarakat ini berada pada tipe bebas.

TABEL IV.14
FAKTOR PENDORONG KEIKUTSERTAAN MEMELIHARA
BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	FAKTOR PENDORONG IKUT SERTA MEMELIHARA BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Sukarela atas kemauan sendiri	46	76,67
2.	Dipengaruhi oleh penyuluhan Pemko	12	20
3.	Dibujuk	2	3,33
4.	Dipaksa	-	-
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, Agustus 2005



Sumber : Hasil Analisis, Agustus 2005

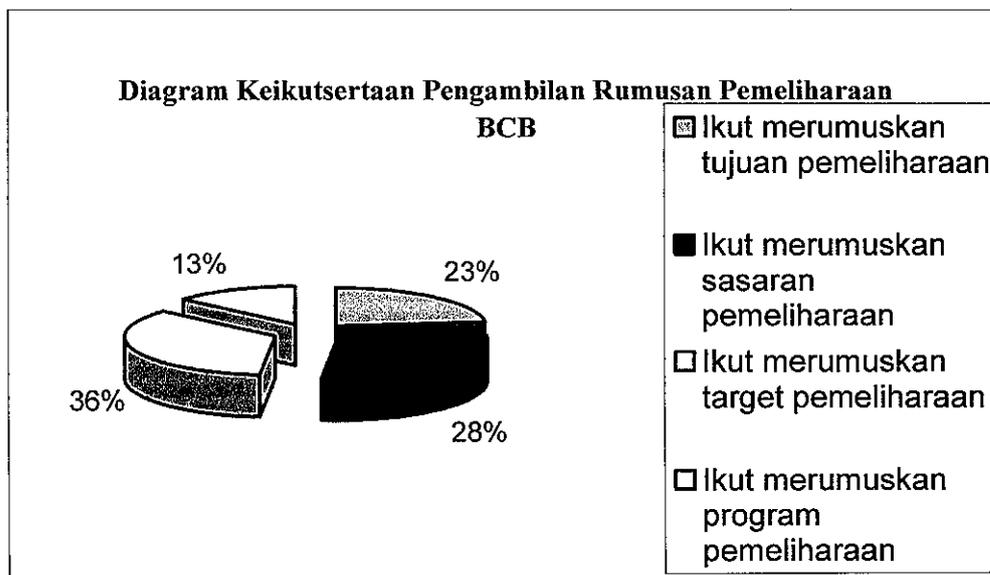
GAMBAR 4. 9
GRAFIK FAKTOR PENDORONG IKUT SERTA DALAM PEMELIHARAAN

Pengklasifikasian berdasarkan tipe juga bisa dilihat dari keterlibatan dalam tahapan proses pembangunan. Dalam tabel berikut, terlihat bahwa proporsi peran serta masyarakat dalam proses pengambilan rumusan pemeliharaan merata, dimana tujuan, sasaran, target, dan program pemeliharaan sudah mampu direncanakan oleh warga sendiri. Keseimbangan pembagian peran yang saling mendukung ini menjadikan semakin mantapnya pelaksanaan kegiatan yang berbasis pada kekuatan masyarakat karena ditopang oleh seluruh lapisan masyarakat secara seimbang. Secara tipikal, jenis ini menunjukkan partisipasi yang lengkap.

TABEL IV.15
KEIKUTSERTAAN DALAM PERTEMUAN PENGAMBILAN
RUMUSAN PEMELIHARAAN BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	KEIKUTSERTAAN PERUMUSAN MEMELIHARA BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Ikut merumuskan tujuan pemeliharaan	14	23,33
2.	Ikut merumuskan sasaran pemeliharaan	17	28,33
3.	Ikut merumuskan target pemeliharaan	21	35
4.	Ikut merumuskan program pemeliharaan	8	13,33
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4. 10
GRAFIK KEIKUTSERTAAN PENGAMBILAN RUMUSAN PEMELIHARAAN

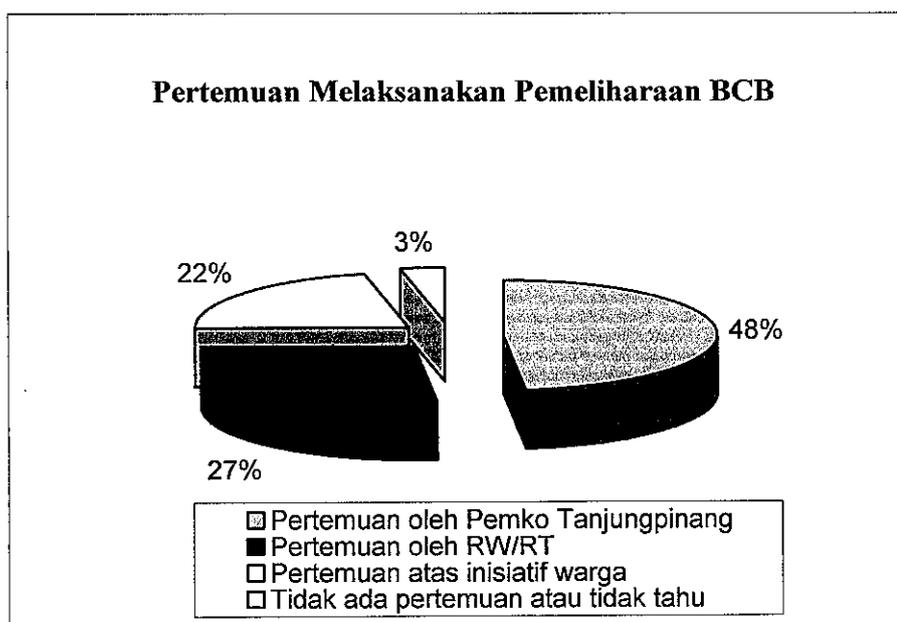
Gaya partisipasi terjadi dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan pemerintah. Keterlibatan ini akan menumbuhkan rasa saling percaya antar stakeholder, dimana masyarakat akan merasa terayomi oleh payung kepastian hukum pemerintah, sedangkan pemerintah akan merasa lega karena program-program pembangunannya dapat terlaksana dengan baik di lapangan berkat

kesediaan masyarakat melaksanakannya. Fungsi kontrol akan dengan sendirinya terbangun jika antar stakeholder sudah saling percaya.

TABEL IV.16
PERTEMUAN DALAM PELAKSANAAN MEMELIHARA
BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	PERTEMUAN PELAKSANAAN MEMELIHARA BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Pertemuan oleh Pemko Tanjungpinang	29	48,33
2.	Pertemuan oleh RW/RT	16	26,67
3.	Pertemuan atas inisiatif warga	13	21,67
4.	Tidak ada pertemuan atau tidak tahu	2	3,33
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, Agustus 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

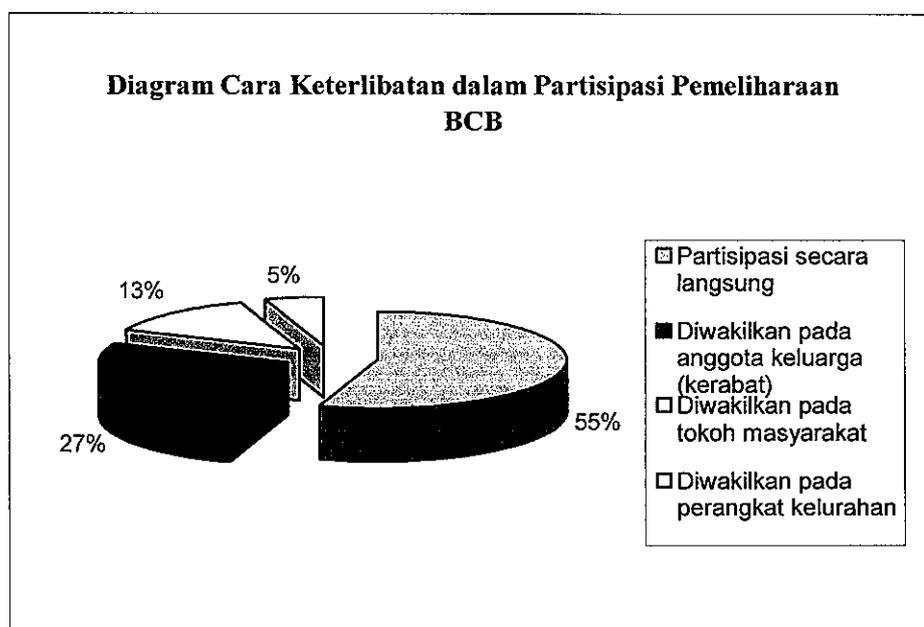
GAMBAR 4.11
GRAFIK PERTEMUAN MELAKSANAAN PEMELIHARAAN
BCB

Tipe cara keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi sudah banyak terlaksana secara langsung, yaitu sebesar 55% responden menyatakan mereka berpartisipasi secara langsung tanpa diwakilkan. Adanya tipe partisipasi yang diwakilkan merupakan proses wajar dalam tahapan menuju masyarakat partisipatif, sebelum secara utuh menjadi warga yang dengan sadar mengikuti proses perencanaan partisipatif tanpa diwakilkan. Adanya pengaruh latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah turut mempengaruhi cara keterlibatan yang belum sepenuhnya total. Dimungkinkan juga dari adanya gaya hidup yang tertutup/individualis juga mempengaruhi keterwakilan warga dalam berpartisipasi.

TABEL IV.17
PARTISIPASI BERDASARKAN CARA KETERLIBATAN
MEMELIHARA BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	PARTISIPASI BERDASARKAN CARA KETERLIBATAN	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Partisipasi secara langsung	33	55
2.	Diwakilkan pada anggota keluarga (kerabat)	16	26,67
3.	Diwakilkan pada tokoh masyarakat	8	13,33
4.	Diwakilkan pada perangkat kelurahan	3	5
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

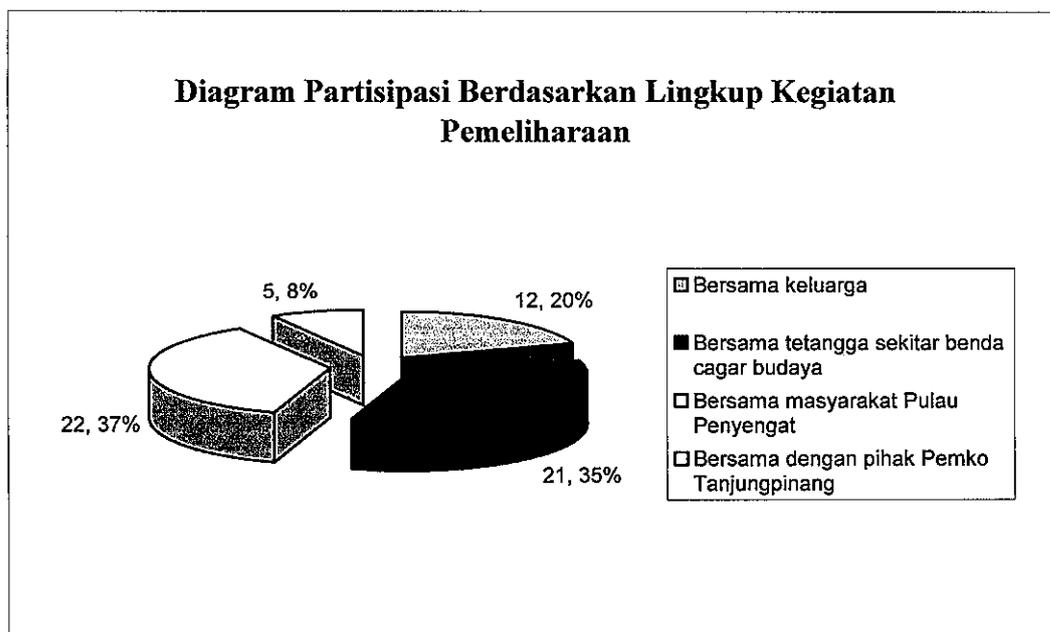
GAMBAR 4. 12
GRAFIK CARA KETERLIBATAN DALAM PARTISIPASI
PEMELIHARAAN BCB

Tabel IV.18 di bawah ini memperlihatkan partisipasi responden berdasarkan lingkup kegiatan pemeliharaan benda cagar budaya. Lingkup kegiatan pemeliharaan menurut responden biasanya dilakukan: bersama keluarga dinyatakan oleh 12 orang responden (20 %), bersama tetangga terdekat dengan lokasi benda cagar budaya dinyatakan oleh 21 orang responden (35 %), bersama masyarakat Pulau Penyengat dinyatakan oleh 16 orang responden (26,67 %), dan bersama dengan pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang dinyatakan oleh 11 orang responden (18,33 %). Kebersamaan dalam lingkup pemeliharaan merupakan perwujudan kerjasama dalam tahapan pemberdayaan masyarakat. Adanya kerjasama ini akan memantapkan pemberdayaan masyarakat.

TABEL IV.18
PARTISIPASI BERDASARKAN LINGKUP KEGIATAN
PEMELIHARAAN

NO.	PARTISIPASI BERDASARKAN LINGKUP PEMELIHARAAN	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Bersama keluarga	12	20,00
2.	Bersama tetangga sekitar benda cagar budaya	21	35,00
3.	Bersama masyarakat Pulau Penyengat	22	36,67
4.	Bersama dengan pihak Pemko Tanjungpinang	5	8,33
Jumlah		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4. 13
LINGKUP KEGIATAN PARTISIPASI BERDASARKAN LINGKUP KEGIATAN
PEMELIHARAAN

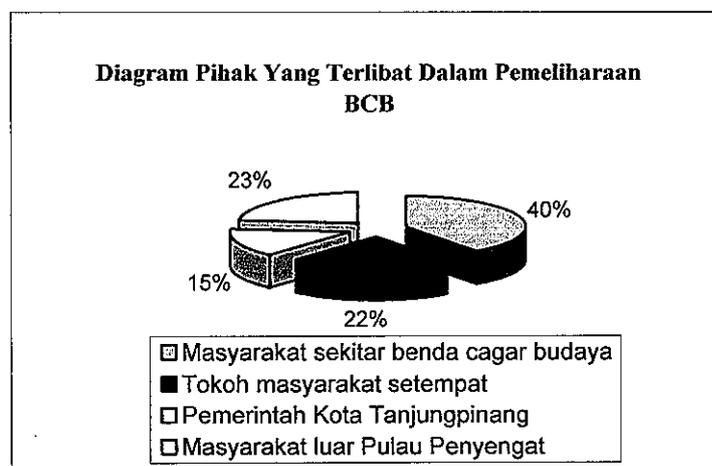
Dalam pemeliharaan benda cagar budaya, tentu ada pihak-pihak tertentu yang turut berpartisipasi merawat dan membersihkannya. Sehubungan dengan hal ini ketika ditanyakan siapa saja pihak yang terlibat, jawaban yang diberikan oleh

responden adalah: masyarakat sekitar benda cagar budaya dinyatakan oleh 24 orang (40 %), tokoh masyarakat setempat dijawab oleh 13 orang (21,67 %), Pemerintah Kota Tanjungpinang dijawab oleh 9 orang responden (15 %), dan masyarakat di luar Pulau Penyengat dinyatakan oleh 14 orang responden (23,33 %). (Tabel IV.19).

TABEL IV.19
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMELIHARAAN
BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMELIHARAAN BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Masyarakat sekitar benda cagar budaya	24	40
2.	Tokoh masyarakat setempat	13	21,67
3.	Pemerintah Kota Tanjungpinang	9	15
4.	Masyarakat luar Pulau Penyengat	14	23,33
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4. 14
GRAFIK PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMELIHARAAN BCB

Berdasarkan tabulasi data terhadap Tabel IV.19 berkaitan dengan pertanyaan pihak mana saja yang ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan benda cagar budaya, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat sekitar benda cagar budaya (40%) sangat menonjol jika dibandingkan dari pihak lainnya. Keterlibatan masyarakat di luar Pulau Penyengat menurut responden juga berpengaruh terhadap pemeliharaan benda cagar budaya di samping keterlibatan tokoh masyarakat setempat. Sementara itu keterlibatan Pemerintah Kota Tanjungpinang menurut responden kurang berperan.

4.1.4 Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Slamet (1994) dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan proyek pembangunan tersebut. Partisipasi dalam perencanaan merupakan pelibatan masyarakat yang paling tinggi karena masyarakat turut serta dalam membuat keputusan.

Sebelum timbulnya minat atau keinginan seseorang terhadap sesuatu sangat dipengaruhi atau tergantung kepada pengetahuannya terhadap hal tersebut. Demikian halnya dengan responden yang menjadi sampel penelitian ini. Pada dasarnya pengetahuan inilah yang akhirnya menimbulkan minat dan keinginan untuk mencintai sesuatu hal. Ketika ditanyakan kepada responden apakah ada pertemuan atau pembicaraan dalam perencanaan pemeliharaan benda cagar budaya, 29 orang (48,33 %) menjawab ada pertemuan atau pembicaraan yang dilakukan atas inisiatif Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan mengundang warga setempat, 17 orang (28,33 %) menyatakan ada pertemuan atau pembicaraan

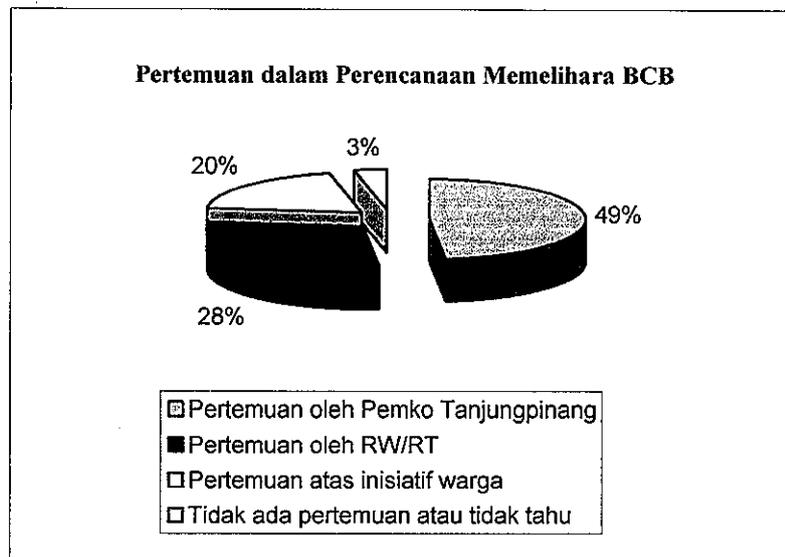
yang dilakukan atas inisiatif RW/RT, 12 orang (20 %) menyatakan ada pertemuan atau pembicaraan yang dilakukan atas inisiatif warga sekitar lokasi benda cagar budaya, dan 2 orang (3,33 %) menjawab tidak ada pertemuan atau tidak tahu.

TABEL IV.20
PERTEMUAN DALAM PERENCANAAN MEMELIHARA
BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	PERTEMUAN PERENCANAAN MEMELIHARA BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Pertemuan oleh Pemko Tanjungpinang	29	48,33
2.	Pertemuan oleh RW/RT	17	28,33
3.	Pertemuan atas inisiatif warga	12	20
4.	Tidak ada pertemuan atau tidak tahu	2	3,33
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Tabel IV.20 menunjukkan bahwa pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah kota Tanjungpinang sangat berperan dalam perencanaan pemeliharaan benda cagar budaya di Pulau Penyengat (48,33%). Namun demikian pertemuan yang dilakukan atas inisiatif RW/RT (28,33%) dan pertemuan yang dilakukan atas inisiatif warga (20%) juga berperan dalam perencanaan pemeliharaan benda cagar budaya. Di samping jawaban tersebut ada juga responden yang menyatakan tidak ada pertemuan atau pembicaraan dalam arti kata tidak tahu adanya pertemuan tersebut (3,33%).



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4.15
GRAFIK PERTEMUAN DALAM PERENCANAAN
MEMELIHARA BCB

Selanjutnya ketika ditanyakan bentuk keikutsertaan responden dalam pertemuan atau pembicaraan mengenai rencana pemeliharaan benda cagar budaya, jawaban yang diberikan responden sangat bervariasi sesuai dengan kriteria yang ada dalam lembaran kuesioner. Bentuk partisipasi yang diberikan oleh responden adalah; ikut merumuskan tujuan pemeliharaan dijawab oleh 14 orang (23,33 %), ikut merumuskan sasaran pemeliharaan dinyatakan oleh 17 orang (28,33 %), ikut merumuskan target pemeliharaan dijawab oleh 19 orang (31,67 %), dan ikut merumuskan program pemeliharaan dinyatakan oleh 10 orang responden (16,67 %). (Lihat Tabel IV.21).

TABEL IV.21
KEIKUTSERTAAN RESPONDEN DALAM PERTEMUAN
PERENCANAAN
MEMELIHARA BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	KEIKUTSERTAAN PERENCANAAN MEMELIHARA BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Ikut merumuskan tujuan pemeliharaan	14	23,33
2.	Ikut merumuskan sasaran pemeliharaan	17	28,33
3.	Ikut merumuskan target pemeliharaan	19	31,67
4.	Ikut merumuskan program pemeliharaan	10	16,67
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4.15
GRAFIK KEIKUTSERTAAN PERTEMUAN PERENCANAAN
PEMELIHARAAN BCB

Tindak lanjut dari pertemuan atau pembicaraan perencanaan pemeliharaan benda cagar budaya mesti ada pelaksanaan yang konkrit agar proses pemeliharaan benda cagar budaya tersebut dapat dilestarikan. Ketika ditanyakan

kepada responden apakah ada pertemuan atau pembicaraan yang dilakukan untuk melaksanakan pemeliharaan benda cagar budaya, jawaban responden tidak jauh berbeda dengan jawaban yang diberikan terhadap pertemuan atau pembicaraan perencanaan memelihara benda cagar budaya. Jawaban yang diberikan responden adalah: ada pertemuan atau pembicaraan untuk pelaksanaan pemeliharaan benda cagar budaya atas inisiatif pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang dinyatakan oleh 29 orang (48,33 %) responden, ada pertemuan atau pembicaraan yang dilakukan atas inisiatif oleh RW/RT dijawab oleh 16 orang responden (26,67 %), ada pertemuan atau pembicaraan yang dilakukan atas inisiatif warga sekitar benda cagar budaya dinyatakan oleh 13 orang responden (21,67 %), dan tidak ada pertemuan atau tidak tahu dijawab oleh 2 orang responden (3,33%). Berdasarkan hasil tabulasi data ini menunjukkan bahwa pertemuan atas inisiatif pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang lebih banyak diketahui oleh responden dari pada pertemuan yang dilakukan oleh pihak lainnya.

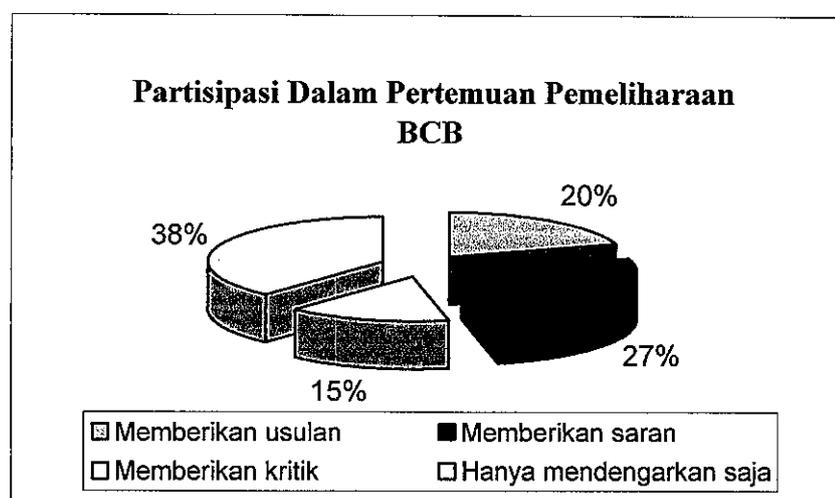
Dalam pelaksanaan suatu pertemuan atau pembicaraan tentu ada rumusan yang dihasilkan atas musyawarah dan mufakat dari peserta yang mengikuti pertemuan tersebut. Hasil dari rumusan ini dapat dilihat pada Tabel IV.22 yang memperlihatkan angka-angka sebagai berikut: keikutsertaan merumuskan tujuan pemeliharaan dijawab oleh 14 orang responden (23,33%), keikutsertaan merumuskan sasaran pemeliharaan dinyatakan oleh 17 orang responden (28,33%), keikutsertaan merumuskan target pemeliharaan dijawab oleh 21 orang responden (35%), dan keikutsertaan merumuskan program pemeliharaan dinyatakan oleh 8 orang responden (13,33%).

Sewaktu dilaksanakan pertemuan atau pembicaraan guna memelihara benda cagar budaya tentu ada bentuk partisipasi yang diberikan oleh peserta rapat yang mengikuti pertemuan tersebut. Ketika hal ini ditanyakan kepada responden, jawaban yang diberikan setelah dilakukan tabulasi data adalah; memberikan usulan dinyatakan oleh 12 orang responden (20 %), memberikan saran dinyatakan oleh 16 orang responden (26,67 %), memberikan kritik dinyatakan oleh 9 orang responden (15 %), dan hanya mendengarkan saja dijawab oleh 23 orang responden (38,33 %).

TABEL IV.22
PARTISIPASI DALAM PERTEMUAN PEMELIHARAAN
BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	PARTISIPASI PERTEMUAN PEMELIHARAAN BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Memberikan usulan	12	20,00
2.	Memberikan saran	16	26,67
3.	Memberikan kritik	9	15,00
4.	Hanya mendengarkan saja	23	38,33
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

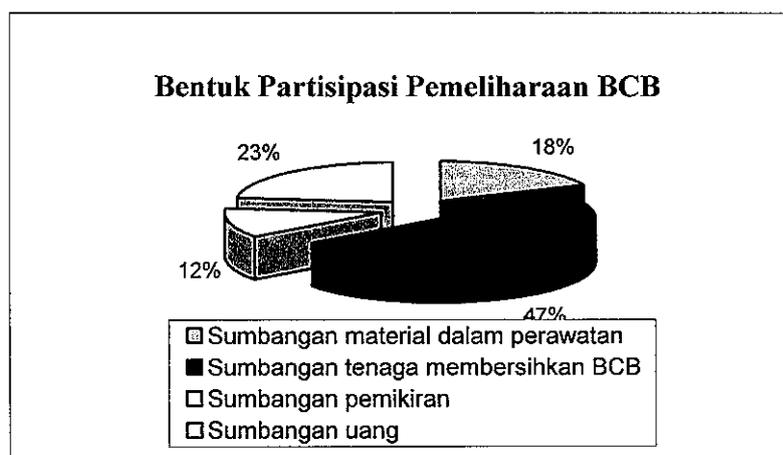
GAMBAR 4.16
GRAFIK PARTISIPASI DALAM PERTEMUAN PEMELIHARAAN BCB

Berbagai cara atau upaya dilakukan seseorang terhadap sesuatu hal yang menimbulkan minat dan keinginannya terhadap sesuatu benda tersebut. Demikian halnya dengan responden penelitian ini ketika menyadari bahwa benda cagar budaya yang ada di sekitarnya harus dipelihara dan dilestarikan. Minat dan perhatiannya guna memelihara dan melestarikan benda cagar budaya yang ada di lingkungannya dituangkan dalam bentuk; memberikan sumbangan materi dalam perawatan dinyatakan oleh 11 orang responden (18,33 %), memberikan sumbangan tenaga ketika membersihkan benda cagar budaya dinyatakan oleh 28 orang (46,67 %), memberikan sumbangan pemikiran dinyatakan oleh 7 orang responden (11,67 %), dan memberikan sumbangan uang dinyatakan oleh 14 orang responden (23,33 %). (Lihat Tabel IV.23).

TABEL IV.23
BENTUK PARTISIPASI DALAM PEMELIHARAAN
BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	BENTUK PARTISIPASI PEMELIHARAAN BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Sumbangan material dalam perawatan	11	18,33
2.	Sumbangan tenaga membersihkan BCB	28	46,67
3.	Sumbangan pemikiran	7	11,67
4.	Sumbangan uang	14	23,33
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4. 17
GRAFIK PARTISIPASI DALAM PERTEMUAN PEMELIHARAAN BCB

Minat, keinginan, dan perhatian seseorang terhadap sesuatu hal tentu ada faktor yang melatarbelakanginya. Demikian juga halnya dengan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Ketika ditanyakan faktor yang melatarbelakangi responden ikut berpartisipasi dalam memelihara benda cagar budaya, jawaban yang diberikan: secara sukarela atas kemauan sendiri dinyatakan oleh 46 orang (76,67 %), dipengaruhi oleh penyuluhan yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Tanjungpinang dinyatakan oleh 12 orang responden (20 %), dan dibujuk agar ikut berpartisipasi dinyatakan oleh 2 orang responden (3,33 %). Tidak ada responden yang ikut berpartisipasi atas dasar paksaan.

Bentuk partisipasi yang diberikan atau dilakukan oleh seseorang berdasarkan cara keterlibatannya dapat terjadi secara langsung oleh yang bersangkutan dan dapat juga diwakilkan kepada orang lain yang dipercaya.

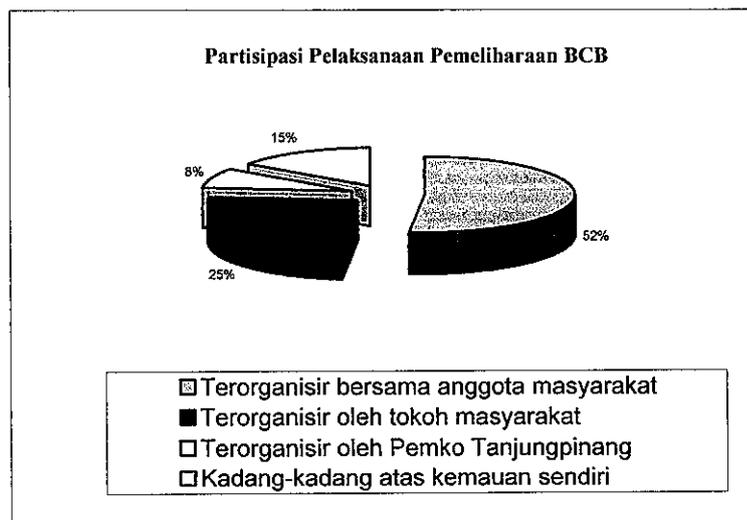
Berkaitan dengan penelitian ini, bentuk partisipasi yang dilakukan oleh responden berdasarkan cara keterlibatannya adalah; partisipasi secara langsung dilakukan oleh 33 orang responden (55 %), diwakilkan kepada anggota keluarga atau kerabat dilakukan oleh 16 orang responden (26,67 %), diwakilkan kepada tokoh masyarakat setempat dilakukan oleh 8 orang responden (13,33 %), dan diwakilkan kepada ketua RT dilakukan oleh 3 orang responden (5 %).

Pelaksanaan partisipasi dalam memelihara benda cagar budaya wujudnya dapat dilakukan atas kemauan sendiri maupun diorganisir dengan pihak lain. Pada hakekatnya berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden, pelaksanaan partisipasi dalam pemeliharaan benda cagar budaya yang dilakukan di Pulau Penyengat; terorganisir bersama anggota masyarakat lainnya dinyatakan 31 orang responden (51,67 %), terorganisir oleh tokoh masyarakat dinyatakan oleh 13 orang responden (21,67 %), diorganisir oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dijawab 7 orang responden (11,67 %), dan kadang-kadang atas kemauan sendiri menurut pendapat 9 orang responden (15 %).

TABEL IV.24
PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PEMELIHARAAN
BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	PARTISIPASI PELAKSANAAN PEMELIHARAAN BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Terorganisir bersama anggota masyarakat	31	51,67
2.	Terorganisir oleh tokoh masyarakat	15	25,00
3.	Terorganisir oleh Pemko Tanjungpinang	5	8,33
4.	Kadang-kadang atas kemauan sendiri	9	15,00
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, Agustus 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4. 18
GRAFIK PARTISIPASI PELAKSANAAN PEMELIHARAAN BCB

4.1.5 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya pada bab kajian teoritis, untuk mengukur peran serta masyarakat diukur berdasarkan frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan, keaktifan anggota kelompok dalam berdiskusi, keterlibatan anggota dalam kegiatan fisik, dan kesediaan memberi iuran rutin atau sumbangan berbentuk uang yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan kajian penelitian ini, maka tingkat partisipasi responden yang menjadi sampel dari

penelitian ini, maka tingkat partisipasi responden yang menjadi sampel dari penelitian ini juga akan diukur berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Namun sebelum masuk pada kajian yang bersangkutan, maka dilihat terlebih dahulu minat, perhatian dan keinginan dari responden terhadap pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat. Besarnya minat, perhatian dan keinginan seseorang tentu saja akan mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam suatu kegiatan atau pekerjaan.

Untuk melihat tingkat partisipasi responden akan diukur berdasarkan tingkat sangat sering, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah sama sekali. Tingkat partisipasi responden diukur berdasarkan interval penilaian sebagai berikut:

- Sangat sering/aktif diberikan apabila responden mengikuti lebih dari 80 % dari kegiatan yang dilakukan,
- Sering/aktif diberikan apabila responden dalam tingkatan partisipasinya berada pada angka 60 – 80 % dari kegiatan yang dilaksanakan,
- Kadang-kadang/kurang aktif diberikan apabila responden kurang dari 60% tingkat partisipasinya ketika diadakan kegiatan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya, dan
- Tidak pernah sama sekali menandakan bahwa responden tidak pernah terlibat dalam kegiatan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya.

Tabel IV.25 berikut ini menunjukkan minat responden dalam pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya Melayu di Pulau Penyengat. Berdasarkan hasil tabulasi data terlihat bahwa 18 orang (30%) sangat berminat

untuk memelihara dan melestarikan, 26 orang (43,33%) menjawab cukup berminat, 11 orang (18,33%) menyatakan kurang berminat, dan 5 orang (8,33%) mengatakan tidak mempunyai minat sama sekali.

Pada dasarnya responden penelitian ini menunjukkan sikap atau perilaku yang cukup berminat (43,33 %) dalam memelihara dan melestarikan benda cagar budaya yang ada di sekitarnya. Di samping itu banyak juga dari responden yang sangat berminat (30%) diikutsertakan dalam pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya. Sebaliknya ada juga yang kurang berminat (18,33%) dan bahkan tidak mempunyai minat sama sekali (8,33%). Berdasarkan minat responden dalam pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya ini dapat disimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan tingkat partisipasi responden menunjukkan bahwa pada dasarnya responden penelitian ini cukup mempunyai minat dalam memelihara dan melestarikan benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat.

TABEL IV.25
MINAT RESPONDEN DALAM PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN
BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	MINAT MEMELIHARA DAN MELESTARIKAN BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Sangat berminat	18	30
2.	Cukup berminat	26	43,33
3.	Kurang berminat	11	18,33
4.	Tidak berminat sama sekali	5	8,33
JUMLAH		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Selanjutnya dalam penelitian ini juga ditanyakan bagaimana perhatian responden terhadap pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya yang ada di

Pulau Penyengat. Sehubungan dengan pertanyaan ini jawaban yang diberikan adalah; sangat perhatian dinyatakan oleh 18 orang responden (30%), cukup perhatian dijawab oleh 26 orang responden (43,33%), kurang perhatian dijawab oleh 13 orang responden (21,67%), dan tidak ada perhatian atau acuh saja dinyatakan oleh 3 orang responden (5%).

TABEL IV.26
PERHATIAN RESPONDEN TERHADAP PEMELIHARAAN DAN
PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	PERHATIAN TERHADAP PELESTARIAN BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Sangat perhatian	18	30
2.	Cukup perhatian	26	43,33
3.	Kurang perhatian	13	21,67
4.	Tidak ada perhatian (acuh saja)	3	5
	J u m l a h	60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan Tabel IV.26 terlihat bahwa hampir separoh dari keseluruhan jumlah responden menyatakan cukup perhatian (43,33 %) terhadap pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat. Hampir sepertiga dari jumlah responden menyatakan sangat perhatian (30 %) dan sekitar seperlima dari jumlah responden mengatakan kurang perhatian (21,67 %) terhadap pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya. Sementara itu sisanya menyatakan tidak ada perhatian atau bersikap acuh saja (5 %) terhadap upaya yang dilakukan oleh responden lainnya dalam kegiatan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat tersebut. Jika dikaitkan dengan tingkat partisipasi dalam memelihara benda cagar budaya, dapat

disimpulkan bahwa responden cukup perhatian terhadap benda cagar budaya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.

Tabel IV.27 menunjukkan keinginan responden dalam memelihara dan melestarikan benda cagar budaya Melayu yang ada di Pulau Penyengat. Berdasarkan hasil tabulasi data terlihat bahwa 16 orang responden (26,67%) sangat berkeinginan untuk memelihara dan melestarikan, 25 orang (41,67%) menjawab cukup berkeinginan, 14 orang (23,33%) menyatakan kurang keinginan, dan 5 orang (8,33%) mengatakan tidak mempunyai keinginan sama sekali.

TABEL IV.27
KEINGINAN RESPONDEN DALAM MEMELIHARA DAN
MELESTARIKAN BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	KEINGINAN MEMELIHARA BENDA CAGAR BUDAYA	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Sangat berkeinginan	16	26,67
2.	Cukup berkeinginan	25	41,67
3.	Kurang keinginan	14	23,33
4.	Tidak ada keinginan sama sekali	5	8,33
JUMLAH		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Sehubungan dengan pertanyaan tentang keinginan memelihara dan melestarikan benda cagar budaya tersebut di atas, hasil tabulasi data menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang menyatakan cukup berkeinginan (41,67%) untuk memelihara dan melestarikan benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat jika dibandingkan dari pada kategori jawaban lainnya. Urutan kedua dan ketiga ditempati oleh responden yang tergolong dalam kategori sangat berkeinginan (26,67%) dan kurang keinginan (23,33%). Seperti halnya pertanyaan menyangkut minat responden dalam memelihara dan melestarikan benda cagar

budaya, jumlah responden yang mengatakan tidak mempunyai keinginan (8,33%) sama jumlahnya dengan yang mengatakan tidak mempunyai minat dalam memelihara dan melestarikan benda cagar budaya yang ada di di lingkungannya (Pulau Penyengat). Berdasarkan tabulasi data ini dapat disimpulkan bahwa responden cukup berkeinginan untuk memelihara dan melestarikan benda cagar budaya.

Setelah melihat bagaimana minat, perhatian dan keinginan responden dalam kegiatan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat, selanjutnya ditelusuri bagaimana pula tingkat partisipasi atau peran sertanya dalam kegiatan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya tersebut.

Dari analisis yang telah dilakukan, proses partisipasi yang terjadi di Pulau Penyengat dalam upaya menuju pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya, maka tingkatan partisipasinya berada pada tahap *Placation* atau perujukan.

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Beberapa masyarakat yang berpengaruh adalah tokoh-tokoh masyarakat, para pemuka agama, dan orang-orang yang dituakan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota lainnya wakil-wakil dari berbagai instansi pemerintah. Adanya beberapa lembaga yang terdapat di Pulau Penyengat, seperti Balai Maklumat, Balai Adat,

Yayasan Indera Sakti yang melayani kegiatan wisata dan dokumentasi merupakan suatu cikal bakal keterlibatan masyarakat lokal dalam mengelola dan memelihara kawasan cagar budaya di pulau ini. Kedudukan lembaga-lembaga ini yang masih milik perorangan merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat setempat yang sangat tinggi.

Dalam segi pengorganisasian, di masyarakat belum terbentuk suatu lembaga formal yang menampung kegiatan partisipasi secara rutin. Adanya aktivitas spontan yang berlangsung dalam masyarakat, seperti misalnya hajatan kampung, pemeliharaan situs keluarga, membentuk suatu aksi partisipasi spontan masyarakat untuk bergabung saling bantu.

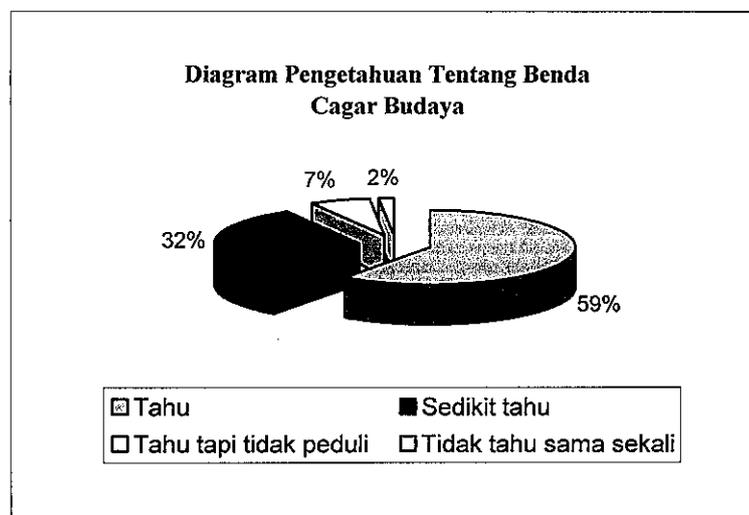
4.2 Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat Berbasis Partisipasi Masyarakat

Berkaitan dengan peninggalan sejarah dan budaya yang ada di pulau Penyengat memang merupakan benda-benda yang mesti dipelihara dan harus dilestarikan. Sehubungan dengan hal ini ketika dipertanyakan pengetahuan responden terhadap benda cagar budaya Pulau Penyengat yang harus dilestarikan, jawaban responden; mengetahui sebanyak 32 orang (53,33 %), sedikit mengetahui dijawab 21 orang (35 %), tidak tahu sama sekali dinyatakan oleh 4 orang (6,67 %), dan mengetahui tapi tidak peduli 3 orang (5 %).

TABEL IV.28
PENGETAHUAN TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	PENGETAHUAN TENTANG BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Tahu	36	60
2.	Sedikit tahu	19	31,67
3.	Tahu tapi tidak peduli	4	6,67
4.	Tidak tahu sama sekali	1	1,67
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005

GAMBAR 4. 19
GRAFIK PENGETAHUAN TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

Berdasarkan angka-angka yang terdapat pada Tabel IV.28 terlihat bahwa pada dasarnya responden tahu (60 %) bahwa benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat memang harus dilestarikan. Mereka yang tahu ini tentu saja mempunyai pengetahuan yang lebih banyak dari beberapa responden lainnya. Selanjutnya dari hasil tabulasi data ini menunjukkan bahwa ada juga responden yang sedikit tahu (31,67 %) tentang upaya pemeliharaan benda cagar budaya. Ada juga responden (6,67 %) yang mengetahui benda cagar budaya harus dilestarikan

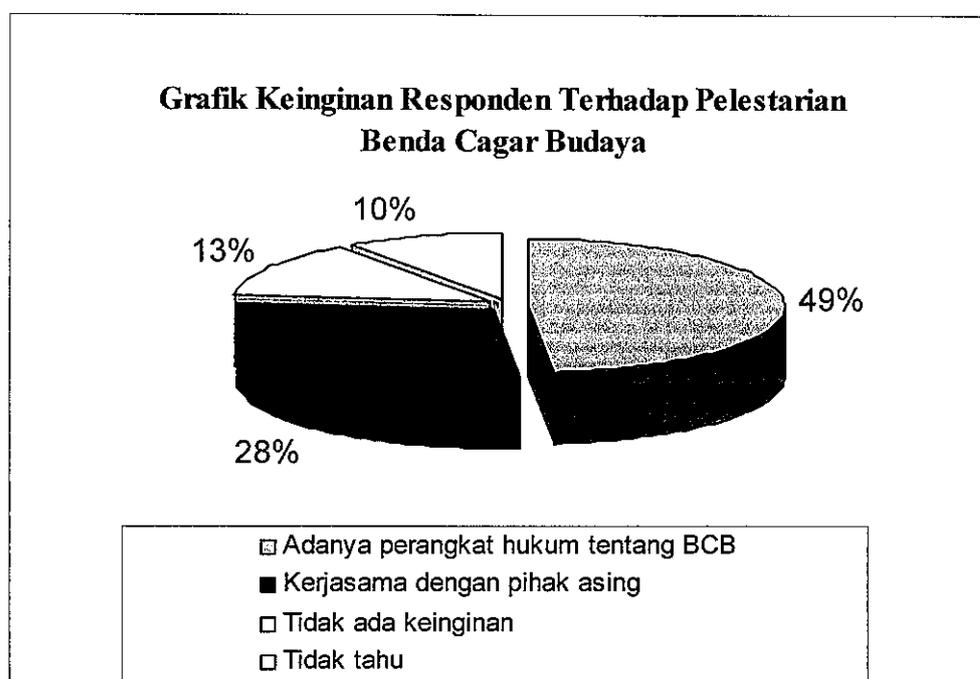
tapi tidak mempunyai kepedulian untuk melestarikannya karena tentu saja tidak ada minat, perhatian dan keinginan. Hanya satu orang responden (1,67 %) yang tidak mengetahui bahwa benda cagar budaya yang ada di sekitarnya harus dilestarikan. Sehubungan dengan pengetahuan tentang pelestarian benda cagar budaya ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya responden mempunyai pengetahuan yang memadai untuk melestarikan benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat. Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh responden ini merupakan modal awal bagi langkah selanjutnya untuk melestarikan benda cagar budaya yang berada di tengah-tengah lingkungannya.

Selanjutnya ketika ditanyakan jika benda cagar budaya perlu dilestarikan, apa yang diinginkan dari pemerintah, jawaban yang diberikan oleh responden; adanya perangkat hukum terhadap benda cagar budaya untuk pelestarian dijawab oleh 29 orang responden (48,33 %), kerjasama dengan pihak asing dinyatakan oleh 17 orang responden (28,33 %), tidak berbuat sesuatupun dijawab oleh 8 orang responden (13,33 %), dan tidak tahu dinyatakan oleh 6 orang responden (10 %).

TABEL IV.29
KEINGINAN RESPONDEN TERHADAP PELESTARIAN
BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	KEINGINAN PELESTARIAN BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Adanya perangkat hukum tentang BCB	29	48,33
2.	Kerjasama dengan pihak asing	17	28,33
3.	Tidak ada keinginan	8	13,33
4.	Tidak tahu	6	10,00
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005.



Sumber : Hasil Analisis, 2005.

GAMBAR 4.20
GRAFIK KEINGINAN RESPONDEN TERHADAP PELESTARIAN
BENDA CAGAR BUDAYA

Sehubungan dengan pertanyaan apa yang diinginkan responden dari pemerintah untuk pelestarian benda cagar budaya, besar keinginan dari mereka adanya perangkat hukum terhadap benda cagar budaya untuk pelestarian (48,33 %). Selanjutnya ada responden yang menginginkan adanya jalinan kerjasama dengan pihak asing (28,33 %). Dari kedua alternatif jawaban yang diberikan oleh responden ini menunjukkan besarnya perhatian responden terhadap pelestarian benda cagar budaya yang ada di lingkungannya. Sebaliknya, ada juga sebagian kecil responden yang tidak berbuat sesuatupun (13,33 %) dan tidak tahu apa yang harus dimintakan kepada pemerintah (10 %).

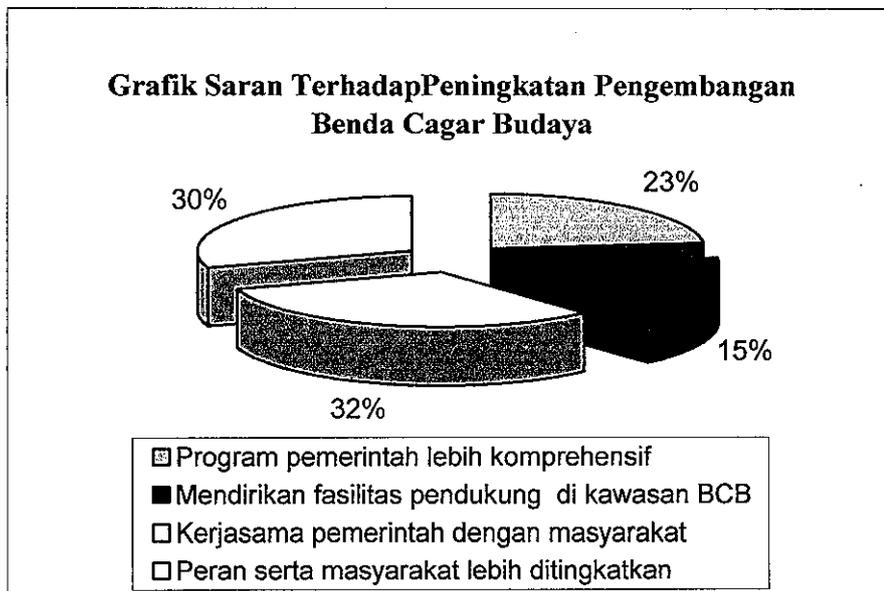
Tabel IV.30 mengisyaratkan saran tindak dari responden guna peningkatan pengembangan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya

Tabel IV.30 mengisyaratkan saran tindak dari responden guna peningkatan pengembangan pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat. Saran responden terhadap peningkatan pengembangan benda cagar budaya di Pulau Penyengat; adalah; program pemerintah yang lebih komprehensif dalam melestarikan benda cagar budaya disarankan oleh 14 orang (23,33 %), mendirikan fasilitas pendukung di kawasan benda cagar budaya disarankan oleh 9 orang (15 %), adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat setempat disarankan oleh 19 orang responden (31,67 %), dan peran serta masyarakat setempat lebih ditingkatkan disarankan oleh 18 orang responden (30 %).

TABEL IV.30
SARAN TERHADAP PENINGKATAN PENGEMBANGAN
BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	SARAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN BCB	RESPONDEN	PERSENTASE
1.	Program pemerintah lebih komprehensif	14	23,33
2.	Mendirikan fasilitas pendukung di kawasan BCB	9	15
3.	Kerjasama pemerintah dengan masyarakat	19	31,67
4.	Peran serta masyarakat lebih ditingkatkan	18	30
J U M L A H		60	100

Sumber : Hasil Analisis, 2005



Sumber : Hasil Analisis, 2005.

GAMBAR 4.21
GRAFIK SARAN TERHADAP PENINGKATAN PENGEMBANGAN
BENDA CAGAR BUDAYA

Berdasarkan saran terhadap peningkatan dan pengembangan benda cagar budaya terlihat bahwa besar keinginan dari responden terjalannya kerja sama pemerintah dan masyarakat setempat (31,67 %) serta adanya peningkatan peran serta masyarakat setempat (30 %). Berkaitan dengan saran yang disampaikan ini menunjukkan bahwa besar harapan dari sebagian besar responden agar pelibatan masyarakat setempat dalam pemeliharaan benda cagar budaya lebih ditingkatkan atau diutamakan. Selanjutnya ada juga responden yang menyarankan program pemerintah yang lebih komprehensif dalam melestarikan benda cagar budaya (23,33 %) dan mendirikan fasilitas pendukung di kawasan benda cagar budaya (15 %).

Benda cagar budaya di Pulau Penyengat merupakan peninggalan sejarah dan budaya yang sangat berharga dan memang harus dipelihara serta dilestarikan.

Benda cagar budaya di Pulau Penyengat merupakan peninggalan sejarah dan budaya yang sangat berharga dan memang harus dipelihara serta dilestarikan. Untuk melestarikannya tentu melalui perencanaan yang matang oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Beberapa kendala di lapangan menyebabkan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk memelihara dan melestarikan benda cagar budaya di Pulau Penyengat tidak berjalan secara semestinya, antara lain perkembangan kawasan Pulau Penyengat, status kepemilikan tanah, status administrasi Pulau Penyengat, serta pemeliharaan benda cagar budaya dan lingkungannya.

Perkembangan dan pembangunan di Pulau Penyengat cukup pesat. Hal ini ditandai dengan adanya daerah-daerah terbangun baru yang bermunculan. Kekhawatiran akan makin banyaknya pendatang yang memasuki Pulau Penyengat akan mengakibatkan penambahan ruang yang harus segera dialokasikan. Padahal pada kawasan yang kaya akan benda cagar budaya, aturan membangunnya sangat diperhatikan. Kawasan situs tidak dibolehkan menjadi area terbangun, karena didalamnya terdapat benda-benda cagar budaya yang harus dilindungi.

Status kepemilikan tanah masyarakat di Pulau Penyengat masih ada yang belum bersertifikat. Banyak masyarakat yang masih mempunyai surat tanah berstatus *grant* dan belum bersertifikat resmi. Hal ini berkaitan dengan sejarah kepemilikan tanah masyarakat Pulau Penyengat yang merupakan tanah peninggalan kerajaan dan kolonial Belanda. Tanah di sekitar situs tersebut merupakan tanah hak milik. Keberadaan status tanah tersebut akan menyulitkan pemerintah dalam proses konservasi kawasan yang mengandung benda cagar

budaya jika nantinya situs tersebut harus dilindungi dalam jangkauan radius tertentu, dan harus mengorbankan tanah milik masyarakat.

Adanya *overlapping* status administrasi Pulau Penyengat yang belum secara legal formal menjadi milik Pemerintah Kota Tanjungpinang, dan masih menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau menjadikan penanganan Pulau Penyengat tidak optimal dilakukan oleh pemerintah kota. Padahal untuk terselenggaranya program pemerintah yang baik, harus didukung oleh status formal wilayah yang bersangkutan, sehingga anggaran dana yang dikeluarkan juga dapat dianggarkan dengan jelas. Ketimpangan ini menjadikan keterlibatan pemerintah tidak total menangani pemeliharaan dan penanganan benda cagar budaya.

Faktor jarak lokasi tempat tinggal masyarakat terhadap keberadaan benda cagar budaya tidak mempengaruhi besarnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan dan pelestariannya. Beberapa tempat yang mengandung benda cagar budaya yaitu bekas gedung Engku Haji Daud, Istana Bahjah, bekas gedung Tengku Bilik, Makam Yang Dipertuan Muda VII, Gedung Mesiu tampak tidak terpelihara. Bangunannya kusam dan di sekitarnya tumbuh rumput-rumput liar yang cukup tinggi sehingga kondisinya tampak tidak terawat. Namun masyarakat yang tinggal dekat dengan benda cagar budaya tersebut tidak melakukan tindakan untuk membersihkan dan merawat. Partisipasi mereka tidak nampak dalam hal kepedulian merawat benda cagar budaya. Mereka tidak secara otomatis membersihkan dan merawat situs tersebut, sehingga pada aktivitas pemeliharaan tingkat partisipasi masyarakat masih kurang.

Ketidakjelasan status tanah dan pemeliharaan benda cagar budaya tersebut menyebabkan keraguan di pihak pemerintah kota, sehingga belum ada produk perencanaan yang secara jelas mengatur pembangunan di pulau ini. Untuk mengembangkan Pulau Penyengat diperlukan produk perencana yang lebih detail lagi sehingga perencanaan dapat berlangsung secara menyeluruh dan komprehensif. Permasalahan status tanah yang belum bersertifikat pada beberapa lahan penduduk serta lokasi situs cagar budaya yang perlu diperjelas status hukumnya guna kelancaran perencanaan selanjutnya. Pensertifikatan tanah menurut Undang-Undang yang berlaku secepatnya perlu dilakukan guna menjelaskan status antara tanah milik pribadi atau milik adat. Diperlukan upaya penyelamatan situs dengan menetapkan radius wilayah situs cagar budaya sebagai daerah yang terlindungi dan bebas dari bangunan yang mengancam keberadaannya.

Proses peningkatan partisipasi masyarakat melibatkan unsur dari bawah yaitu masyarakat dan dari atas atau pemerintah. Artinya, inisiatif dari masyarakat untuk memelihara dan melestarikan lingkungan cagar budayanya harus ditangkap oleh pemerintah sebagai sinyal positif yang harus ditindaklanjuti untuk dibimbing dan diarahkan sebagai suatu gerakan pemberdayaan masyarakat dalam usaha memajukan daerahnya. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya akan menguntungkan masyarakat secara ekonomis, baik langsung maupun tidak, karena adanya potensi pengembangan Pulau Penyengat sebagai kawasan wisata budaya. Masyarakat dapat menjadi

pelaku kegiatan pariwisata dengan cara menyediakan jasa-jasa pelayanan wisata, maupun dengan cara memasarkan produk unggulan/khas kawasan.

Adanya berbagai kepentingan itulah yang menjadikan perlunya pemberdayaan masyarakat setempat guna mengatur daerahnya sendiri, sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Dalam konteks Pulau Penyengat, keberadaan unsur wisata merupakan suatu umpan yang baik guna mendatangkan keuntungan ekonomis warga. Masyarakat setempat harus mampu dan mandiri mengelola wilayahnya. Keterlibatan secara bersama-sama antar warga juga menjadikan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan mudah.

4.3 Rumusan Analisis

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa rumusan analisis berikut ini.

1. Dari perhatian masyarakat dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Hal ini ditandai oleh jawaban responden yang cukup perhatian (43,33 %) terhadap pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat. Banyaknya responden yang kurang perhatian terhadap pemeliharaan benda cagar budaya, yaitu sebanyak 21,67% dan bahkan sebanyak 5% bersikap acuh tak acuh dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah setempat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Mereka toh tidak akan mendapatkan keuntungan secara ekonomis melalui

keikutsertaannya dalam berpartisipasi memelihara benda cagar budaya, sehingga dianggap tak masalah tidak ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan situs bersejarah tersebut.

2. Dari keinginan/niat masyarakat dapat disimpulkan bahwa mereka mempunyai partisipasi cukup tinggi. Hal ini ditandai oleh kecenderungan jawaban responden yang menyatakan mereka cukup berkeinginan (41,67%) berpartisipasi memelihara dan melestarikan benda cagar budaya melalui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. Masih kurangnya minat pada beberapa persen golongan responden (28,33%) dan bahkan tidak berminat sama sekali (8,33%) mengindikasikan masih kurangnya motivasi individu dan belum berhasilnya aktor penggerak partisipasi dalam menanamkan kesadaran masyarakat.
3. Dari minat masyarakat dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki tingkat partisipasi cukup tinggi. Hal ini ditandai oleh jawaban mereka yang cukup berminat (41,67%) untuk ikut serta terhadap aktivitas pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Beberapa responden yang mempunyai kesadaran pemeliharaan terhadap benda cagar budaya mungkin dipengaruhi oleh keberadaan benda cagar budaya tersebut yang tidak secara langsung berada di lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat pendatang yang tidak mempunyai keterikatan emosional terhadap budaya dan adat istiadat setempat juga mempengaruhi tingkat kesadaran dalam memelihara benda cagar budaya.

4. Berdasarkan karakteristik umur responden menunjukkan bentuk partisipasi yang diberikan berupa sumbangan tenaga yang persentase tertinggi dilakukan oleh kelompok umur 20 – 29 tahun (15 %). Sementara itu tingkat partisipasi dengan kategori aktif yang diberikan oleh responden kelompok umur 40 – 49 tahun (21,67 %).
5. Berdasarkan tingkat pendidikan responden terlihat bahwa bentuk partisipasi yang diberikan responden berupa sumbangan tenaga yang lebih banyak dilakukan responden tingkat pendidikan SLTP (20 %). Tingkat partisipasi aktif juga ditunjukkan oleh responden tingkat pendidikan SLTP (23,33 %).
6. Berdasarkan karakteristik jenis pekerjaan responden menunjukkan bahwa bentuk partisipasi dengan memberikan sumbangan tenaga lebih besar dilakukan kelompok pekerjaan swasta (18,33 %). Sedangkan tingkat partisipasinya kategori aktif yang lebih banyak dilakukan oleh responden yang bergerak di bidang swasta (16,67 %). Banyak sektor swasta yang terlibat dalam usaha pelestarian benda cagar budaya. Keterlibatan aktif sektor swasta ini dipengaruhi oleh adanya insentif dari pihak Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Batusangkar terhadap pengelola/penjaga benda cagar budaya.
7. Berdasarkan perbedaan jenis kelamin responden memperlihatkan bahwa bentuk partisipasi dengan memberikan sumbangan tenaga lebih banyak dilakukan responden laki-laki (45 %). Tingkat partisipasi persentase terbesar kategori aktif juga dilakukan responden laki-laki (38,33%).

Tingkat partisipasi perempuan dalam pemeliharaan benda cagar budaya lebih sedikit daripada laki-laki mengingat banyak perempuan masih lebih mementingkan urusan domestik/rumah tangganya daripada melibatkan diri dalam urusan-urusan publik.

8. Dari pembedaan suku bangsa responden menunjukkan bahwa bentuk partisipasi dengan memberikan sumbangan tenaga lebih banyak dilakukan suku bangsa Melayu (41,67 %). Jumlah angka yang sama juga ditunjukkan oleh responden suku bangsa Melayu dengan tingkat partisipasi aktif. Keterikatan terhadap akar budaya menjadi faktor penentu besarnya tingkat partisipasi karena mereka mengetahui betul bagaimana sejarah dan peran benda-benda cagar budaya tersebut dalam kebudayaan masyarakatnya, sehingga secara otomatis masyarakat akan terus memelihara peninggalan nenek moyangnya karena hal itu sama halnya sebagai bentuk perwujudan penghormatan terhadap leluhurnya. Akan halnya para pendatang yang berasal dari suku lain mempunyai kadar partisipasi yang lebih rendah karena dimungkinkan mereka tidak mengetahui nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam benda cagar budaya tersebut.
9. Secara umum penelitian ini banyak melibatkan responden beragama Islam dan bentuk partisipasi yang diberikan dengan memberikan sumbangan tenaga sebesar 46,67 %. Demikian juga halnya dengan tingkat partisipasi yang diberikan responden beragama Islam ini persentasenya sama dengan yang mereka untuk bentuk partisipasi. Benda-benda cagar budaya yang

terdapat di Pulau Penyengat merupakan peninggalan dari peradaban Islam. Masyarakat dari golongan agama lain mempunyai tingkat partisipasi lebih rendah dimungkinkan karena masih adanya sifat fanatisme terhadap agamanya, sehingga bersikap acuh tak acuh terhadap benda-benda cagar budaya yang tidak berkaitan dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

10. Dari karakteristik lama berdomisili responden menunjukkan bahwa bentuk partisipasi memberikan sumbangan tenaga dan tingkat partisipasi menunjukkan derajat aktif masing-masing sebesar 20% diberikan oleh kelompok responden yang telah lebih dari 30 tahun berdomisili di sekitar benda cagar budaya. Faktor lamanya bermukim akan menimbulkan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap lingkungannya. Kepuasan batin dalam mengabdikan dirinya memelihara lingkungan bersejarah menjadi faktor utama penggerak tingginya tingkat partisipasi warga yang telah bermukim lama. Bagi para pendatang akan tidak menjadi suatu kepentingan bagi mereka untuk menjaga lingkungannya, terutama di lingkungan benda cagar budaya, karena belum tertanam dalam hati apa arti lingkungan tempat tinggal bagi dirinya.
11. Perbedaan berdasarkan alamat tempat tinggal memperlihatkan bahwa responden yang bertempat tinggal di Kampung Jambak lebih tinggi bentuk partisipasi dengan memberikan sumbangan tenaga (20 %) dan tingkat partisipasi menunjukkan derajat aktif (18,33 %). Tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ada tidaknya atau sedikit

banyaknya benda cagar budaya di lingkungan tempat tinggalnya. Padahal melestarikan benda-benda pusaka tidak harus berada satu tempat dengan yang dilestarikannya.

12. Secara umum, sangat dimungkinkan untuk dibina partisipasi masyarakat guna menangkap peran mereka dalam memanfaatkan wilayah tempat tinggalnya. Keuntungan bersama akan dirasakan jika masyarakat benar-benar secara sukarela menyumbangkan jiwa dan pikirannya untuk kepentingan bersama.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Partisipasi masyarakat di Pulau Penyengat terhadap benda cagar budaya terlihat dari adanya perhatian, keinginan/niat, dan minat dari anggota masyarakat untuk memelihara benda cagar budaya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Perhatian, keinginan/niat, dan minat ini pada akhirnya memperlihatkan bentuk dan tingkat partisipasi dalam memelihara benda cagar budaya. Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang dikelompokkan berdasarkan variabel umur, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, suku bangsa, agama, lama domisili di sekitar benda cagar budaya, dan alamat tempat tinggal.

Berdasarkan karakteristik masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi anggota masyarakat memelihara dan melestarikan benda cagar budaya adalah: suku bangsa, agama, dan lama domisili di sekitar benda cagar budaya. Masyarakat Melayu yang beragama Islam dan merupakan penduduk asli (tempatan) di Pulau Penyengat mempunyai perhatian, keinginan/niat, dan minat yang cukup besar untuk memelihara benda cagar budaya di Pulau Penyengat sebagai upaya pelestarian warisan budaya Melayu.

Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam memelihara benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat disebabkan latar belakang budaya masyarakat yang memiliki hubungan sejarah dengan benda cagar budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Umumnya bangunan bersejarah yang ada di Pulau Penyengat

merupakan makam leluhur masyarakat Pulau Penyengat. Secara turun-temurun keterkaitan sejarah dan budaya ini terus dibina dan dijaga.

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat Pulau Penyengat dapat dilihat dari derajat kesukarelaan, cara keterlibatan, keterlibatan dalam berbagai tahap proses pembangunan, tingkatan organisasi, intensitas dan frekuensi kegiatan, lingkup kegiatan, efektivitas, keterlibatan, dan gaya partisipasi.

Dalam klasifikasi derajat kesukarelaan, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Pulau Penyengat termasuk dalam kategori bebas, artinya masyarakat mayoritas telah melibatkan dirinya secara sukarela dalam proses pemeliharaan benda cagar budaya yang tengah berlangsung. Cara keterlibatan mereka terjadi secara langsung, baik dalam kegiatan berdiskusi, melakukan tindakan pemeliharaan, maupun menyumbangkan material untuk perbaikan. Organisasi pemberdayaan masyarakat belum terbentuk secara resmi dan kegiatannya masih bersifat spontan. Kegiatan partisipasi ini melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah, dengan tujuan utama untuk pemeliharaan benda cagar budaya sebagai perwujudan dari penghormatan terhadap adat istiadat yang dimilikinya.

Adapun tingkatan partisipasi yang dicapai oleh masyarakat Pulau Penyengat dalam pemeliharaan benda cagar budaya sedang mencapai tahapan *Partnership* atau Kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat. Masih ada beberapa fase yang mencirikan tahapan *Placation* atau Perujukan, karena pihak pemerintah masih mempunyai andil yang besar dalam mempengaruhi dan menentukan gerak partisipasi masyarakat. Masyarakat belum bisa secara mandiri mengelola kawasannya tanpa adanya rangsangan dan dukungan dari pihak lain, yang dalam hal

ini adalah pemerintah. Kedudukan pemerintah sebagai motor penggerak yang disambut baik oleh masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya, menjadikan hubungan keduanya diwujudkan sebagai mitra yang saling menguatkan dan sejajar demi mencapai tujuan bersama, walaupun latar belakang antara keduanya berbeda.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa rekomendasi yang patut untuk dipertimbangkan:

1. Bentuk pengelolaan terhadap benda cagar budaya yang dilakukan pemerintah selama ini dirasa kurang aspiratif dan tidak melihat masyarakat setempat sebagai potensi. Masyarakat di Pulau Penyengat sebenarnya memiliki partisipasi yang cukup tinggi namun tidak dapat diaktualisasikan karena berbeda kepentingan antara pemerintah kota dengan penduduk setempat yang merupakan etnis Melayu. Pemerintah Kota Tanjungpinang mempunyai kepentingan terhadap benda cagar budaya karena merupakan aset di bidang pariwisata. Sementara itu masyarakat setempat mempunyai kepentingan karena benda cagar budaya tersebut merupakan warisan nenek moyang yang harus tetap terpelihara berdasarkan adat kebiasaan mereka (tradisi Melayu). Oleh sebab itu diperlukan satu kesatuan gerak dan langkah antara pemerintah kota dan masyarakat setempat sehingga terdapat keterpaduan yang memudahkan pemerintah kota melaksanakan program pengembangan benda cagar budaya dengan masyarakat yang tetap dengan cara tradisinya merawat dan memelihara warisan leluhurnya.

2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi merupakan potensi di dalam pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya. Kecenderungan adanya perhatian, keinginan, dan minat ini dapat diarahkan untuk menopang program pemerintah kota dalam memelihara dan melestarikan benda cagar budaya dan memajukan Pulau Penyengat.
3. Partisipasi masyarakat setempat memiliki peranan yang penting sekaligus menentukan arah pengembangan kawasan benda cagar budaya. Untuk itu, menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam mengelola benda cagar budaya dan situs yang ada di Pulau Penyengat merupakan hal yang utama dan harus dilakukan agar tidak ada lagi kasus penduduk yang merusak benda cagar budaya serta tidak mendirikan rumah di areal situs budaya yang ada di pulau tersebut.
4. Diperlukan penyuluhan serta sosialisasi terhadap pemeliharaan benda cagar budaya pada masyarakat yang bertempat tinggal di Pulau Penyengat sehingga mereka lebih berperan aktif dan mempunyai partisipasi yang tinggi dalam memelihara benda cagar budaya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Selama ini dirasakan partisipasi masyarakat hanya terlihat jika ada program dari pemerintah kota. Hendaknya diupayakan masyarakat setempat bertanggungjawab terhadap benda cagar budaya yang ada di lingkungannya dan mengarahkan mereka secara swadaya merawat dan memelihara benda cagar budaya tersebut.
5. Diperlukan segera penanganan sertifikasi tanah yang masih belum jelas status kepemilikannya, sehingga dalam penanganan kawasan selanjutnya tidak mendatangkan konflik kepemilikan lahan

6. Pengesahan status hukum Pulau Penyengat sebagai bagian dari Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga terjadi koordinasi pemerintahan yang tidak tumpang tindih dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau.
7. Penguatan pemberdayaan masyarakat terus menerus guna pemeliharaan dan pengelolaan benda cagar budaya yang lebih terkoordinasi. Pemberdayaan juga harus dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, sehingga pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mempunyai efek yang positif bagi masyarakat itu sendiri.
8. Perlu segera disusun peraturan untuk pengelolaan benda cagar budaya di Pulau Penyengat dalam bentuk yang lebih detail.

Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah:

1. Mengingat benda cagar budaya yang ada di Pulau Penyengat merupakan milik masyarakat Kota Tanjungpinang bahkan Propinsi Kepulauan Riau, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut yang respondennya lebih heterogen dan mencakup masyarakat Kota Tanjungpinang agar keberadaan benda cagar budaya baik yang terdapat di Pulau Penyengat maupun di Kota Tanjungpinang dapat segera diselamatkan.
2. Setelah mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat di Pulau Penyengat, maka perlu dibangun suatu model partisipasi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Pulau Penyengat, sehingga program pemeliharaan dan pelestarian benda cagar budaya di Pulau Penyengat dapat berhasil dengan baik.
3. Diperlukan kajian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pulau Penyengat untuk menopang aktivitas pariwisata budaya yang akan

dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi, 2002. Edisi Revisi V. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Astrid S. Susanto. 1979. *Pengaruh Pariwisata Terhadap Kebudayaan*. Makalah dalam Seminar Pembinaan Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata. Yogyakarta. 5-9 Maret 1979.
- D, Samsuridjal dan Kaelany HD. 1997. *Peluang Di Bidang Pariwisata*. Jakarta. Mutiara Sumber Widya.
- Gunn, Clare A. 1993. *Tourism Planning*. New York. Taylor and Francis.
- Hall, Antony (dkk). 1986. *Community Partisipation, Social Development and State*. London. Methven & Co.
- Hamidy, UU. 1995. *Orang Melayu Di Riau*. Pekanbaru. UIR Press.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. LP3ES
- Karyono, M. 1997. *Kepariwisataan*. Jakarta. IKAPI.
- Koentjaraningrat. 1978. *Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta. Gramedia.
- 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia.
- Kusmayadi dan Endar Sugiatro. 2000. *Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisataan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengetahuan Kepariwisataan*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan : Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mill, R.C. 2000. *Tourism The International Bussiness*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta. Grafindo.
- Mulyadi dan Nurhayati. 2002. *Pengertian Pariwisata*. Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar Modul I. Jakarta. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Menbudpar.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Page, S. 1995. *Urban Tourism*. New York. Routledge.
- Panudju, Bambang. 1999. Pengadaan Perumahan Kota Dengan Perang Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bandung. Penerbit Alumni
- Poerwadarminta. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Ross, F. Glenn. 1998. Psikologi Pariwisata. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Sammeng. 2000. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta
- Savilla, Can sulo. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Et alih bahasa. Tuwu, Alimuddin. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Shawed, William. 1994. *Critical Issues In Tourism*. London. Blackwell Publishers.
- Sigit, Soehardi. 1999. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen*. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Sinar, Tengku Lukman. 2001. *Jati Diri Melayu*. Medan. Lembaga. MABMI.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed). 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES.
- Sinulingga, Budi P. 1999. *Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta. Pusataka Sinar Harapan.
- Slamet. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- Smith, Stephen L.J. 1989. *Tourism Analisis A Handbook*. NewYork. Longman Scientific and Technical.
- Soekadijo, R.G. *Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage"*. Jakarta. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta. Rajawali.
- , 2001. *Pengantar Sosiologi*. (Edisi Baru). Jakarta. Rajawali.
- Spillane, J. 1996. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta. Kanisius.

----- 1998. *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta. Kanisius.

Sugiantoro, Ronny. 2000. *Pariwisata Antara Obsesi dan Realita*. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa.

Sukowinarto. 2002. *Visi dan Misi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata*. Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar Modul II. Jakarta. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Menbudpar..

Surachmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode Teknik*. Bandung. Tarsito.

Sulistya, Djoko Budhi. 2002. *Indonesia Yogyakarta, Petunjuk Wisata*. Yogyakarta. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Yogyakarta.

Wahab, Salah. 1996. *Managemen Kepariwisataan*. Jakarta. Pradya Paramita.

Waluyo, Harry. 1994/1995. *Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Pariwisata*. (Studi Kasus Di Daerah Riau Kepulauan Propinsi Riau). Jakarta. Depdikbud.

Youti, A Oka. 1999. *Psikologi Pelayanan Wisata*. Jakarta. Gramedia.

Yudohusodo, Siswono. 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta.

TESIS/PRA TESIS/ SKRIPSI

Aminah, Intan Rosyidatul. 2004. *Wisata Budaya Sebagai Daya Tarik Dalam Penawaran Pariwisata Kota Surakarta*. Semarang. Universitas Diponegoro.

Evrizal, Wan. 2004. *Partisipasi masyarakat dalam Pemeliharaan Prasarana Pasca Pelaksanaan Program P2D Di Kecamatan bantam kabupaten Bengkalis*. Semarang. Program Studi magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.

Purnamawati, Ati. 2001. *Minat Wisatawan Terhadap Obyek dan Daya Tarik Wisata Kota Di Kota Bandung*. (Tesis). Semarang. Undip.

Wibisana, Gunawan. 1989. *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Peremajaan Pasar*. Bandung. Program Pasca Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB.

Widyaninduto, Sigit. 2002. *Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Malang*, Semarang. Universitas Diponegoro.

HASIL PENELITIAN

- Hadinoto, K. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Novendra, dkk. 2000. *Tempat-Tempat Bersejarah di Kepulauan Riau*. Tanjungpinang. Bappeda Kepri.
- De Saputra, Syahrial et al. 1996. *Persepsi Tentang Etos Kerja Kaitannya Dengan Nilai Budaya Masyarakat Melayu Daerah Riau*. Pekanbaru. Depdikbud.

MAKALAH

- Adishakti, Laretna T. 2000. *Apa Pusaka Kota Bersejarah*. Yogyakarta. Dialog 2 Lintas Pemerhati dan Pecinta Kota Bersejarah Yogyakarta.
- , 2003. *Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Bersejarah : Futuristik Berdasar Pusaka Lokal*. Dirjen Perencanaan Perkotaan dan Pedesaan KIMPRASWIL.
- , 2003. *Pelestarian Pusaka Budaya; Masyarakat Sebagai Pusat Pengelolaan Perubahan*. Bali. Pra Kongres Kebudayaan.
- , 2003. *Pusaka : Keanekaragaman, keunikan, dan Kerangka Dasar Gerakan Pelestarian*. Jakarta. Jakarta. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Budisantoso, S. 1979. *Pariwisata dan Pengaruhnya terhadap Nilai-Nilai Budaya*. Makalah dalam Seminar Pembinaan Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata. Yogyakarta. 5-9 Maret 1979
- Draft Kaliurang. 2003. *Piagam Pelestarian Pusaka Saujana Indonesia*. Yogyakarta. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

BUKU DATA/LAPORAN

- Bappeko. 2003. *Tanjungpinang Dalam Angka 2002*. Tanjungpinang.
- Bappeko. *Profil Tanjungpinang 2003*. Tanjungpinang.
- Bappeko. 2003. *Potensi dan Peluang Investasi Kota Tanjungpinang*. Tanjungpinang..
- Bappeko. 2003. *Laporan Penyusunan Master Plan Pulau Penyengat Sebagai Kawasan Cagar Budaya Melayu*. Tanjungpinang.

Depdikbud. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya*. Jakarta. Badan Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dan Yayasan Riau Lingga. *Pendataan Benda Peninggalan Sejarah, Lembaga Adat, Kesenian Rakyat Tradisional dan Sinopsis Peninggalan Sejarah Kota Tanjungpinang*. Tanjungpinang. 2002.

Dinas Pariwisata Kota Tanjungpinang dan BPS Kab. Kepulauan Riau. 2002. *Statistik Pariwisata Kota Tanjungpinang 2002*. Tanjungpinang

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. *Profil Kebudayaan dan Pariwisata*. Jakarta

KORAN

Tingkatkan Kunjungan Wisata. , *Pemko Perlu Poles Objek Wisata*. Selasa, 29 Juni 2004 *Hal 7* Kol 1-2. Pos Metro Bintan.